



LAPORAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi komprehensif atas ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen bangsa. GERMAS hadir sebagai sebuah gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Di Kabupaten Pasuruan, implementasi GERMAS selama lima tahun terakhir telah berjalan dinamis dengan dukungan kebijakan yang kuat dari Pemerintah Daerah serta partisipasi aktif lintas sektor.

Tahun 2025 menjadi fase krusial yang penuh tantangan sekaligus prestasi. Kita patut bersyukur bahwa komitmen bersama telah membuahkan hasil nyata, di antaranya keberhasilan Kabupaten Pasuruan mencapai status *Open Defecation Free* (ODF) 100% pada tahun 2024, penurunan prevalensi stunting yang sangat signifikan hingga menyentuh angka 3,9%, serta perbaikan indikator kesehatan ibu dan anak. Capaian-capaian ini merupakan bukti bahwa perubahan perilaku hidup bersih dan sehat mulai mengakar di masyarakat kita.

Namun, laporan ini juga memotret tantangan transisi epidemiologi yang sedang kita hadapi. Peningkatan tren penyakit tidak menular seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus, serta fluktuasi penyakit menular seperti DBD, menjadi pengingat bahwa tugas kita belum selesai. Data-data ini menjadi landasan evaluasi yang objektif untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih agresif dan deteksi dini yang lebih masif di masa mendatang.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Pasuruan atas arahan dan payung regulasi yang konsisten, kepada seluruh Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan yang telah bahu-membahu menyukseskan GERMAS. Sinergi ini adalah kunci utama keberhasilan kita.

Secara khusus, apresiasi yang mendalam kami tujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan GERMAS tidak dapat bertumpu pada sektor kesehatan semata, melainkan memerlukan orkestrasi lintas sektor yang harmonis. Keterlibatan aktif rekan-rekan OPD mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat telah membuktikan bahwa paradigma 'Kesehatan adalah Tanggung Jawab Bersama' benar-benar terimplementasi dengan baik di daerah kita. Integrasi indikator berwawasan kesehatan ke dalam program kerja masing-masing OPD inilah yang menjadi daya ungkit utama dalam mengakselerasi pencapaian target-target GERMAS selama lima tahun terakhir.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menjadi referensi yang konstruktif bagi perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasuruan pada periode selanjutnya. Mari terus bergerak, wujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sehat, bugar, produktif, dan sejahtera.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.



DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	XI
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I GAMBARAN UMUM & KEBIJAKAN GERMAS DAERAH.....	4
GAMBARAN UMUM DAERAH.....	4
1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	4
1.2. Potensi Sumber Daya Daerah	6
A. Topografi	6
B. Geologi dan Jenis Tanah.....	10
C. Klimatologi.....	16
D. Penggunaan Lahan	16
E. Potensi Pengembangan Wilayah	18
1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	27
A. Daya Dukung Air	27
B. Daya Dukung Pangan	29
1.4. Ketahanan Energi	30
1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	32
1.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim	35
1.7. Demografi	43
A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	43
B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	45
C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	48

D.Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan.....	53
E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan.....	55
F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut.....	57
G.Proyeksi Demografi.....	59
1.8.Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	65
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	65
B. Indeks/Rasio Gini.....	67
C.Angka Kemiskinan	69
D.Tingkat Pengangguran Terbuka	72
E. PDRB Perkapita.....	74
F. Indeks Pembangunan Manusia.....	75
1.9.Data Dinas Kesehatan P2KB Tahun 2025	79
A. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025	79
B. Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025 di Kabupaten Pasuruan ..	81
C. Perkembangan AKB di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2025.....	82
D. Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2025.....	85
E. Perkembangan Prevalensi Stunting Tahun 2021-2025	87
F. Kasus TBC di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	89
G.Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025.....	92
H.Cakupan Penderita HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025	103
I. Penderita DM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025.....	105
J. Penderita ODGJ di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025.....	107
K. Penderita Hipertensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025	108
L. Capaian ODF Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025.....	110
KEBIJAKAN GERMAS DAERAH	111



BAB II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	114
2.1.Rincian Daftar Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	114
1. Bappelitbangda	114
2. BNN Kabupaten Pasuruan.....	115
3. BPJS Kesehatan.....	117
4. BUMN	119
5. Bupati Pasuruan	120
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	122
7. Dinas Kesehatan.....	124
8. Dinas Ketenagakerjaan.....	127
9. Dinas Komunikasi dan Informatika.....	129
10.Dinas Lingkungan Hidup.....	130
11.Dinas Pariwisata	132
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	134
13.DP3AP2KB	136
14.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	139
15.Dinas Perhubungan	141
16.Dinas Perikanan	143
17.Dinas Perindustrian dan Perdagangan	145
18.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	147
19.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	148
20.Dinas Sosial.....	150
21.Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	153
22.Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.....	155
23.Kodim 0819.....	157

24. Polres Pasuruan	159
2.2. Evaluasi Capaian dan Perkembangan.....	160
1. Bappelitbangda	160
2. BNN Kabupaten Pasuruan.....	161
3. BPJS Kesehatan	163
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	163
5. Dinas Kesehatan.....	165
6. Dinas Komunikasi dan Informatika	165
7. Dinas Lingkungan Hidup	166
8. Dinas Pariwisata	167
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	168
10. DP3AP2KB	169
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	170
12. Dinas Perhubungan	171
13. Dinas Perikanan	172
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	173
15. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	174
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	174
17. Dinas Sosial.....	175
18. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.....	176
2.3. Tantangan Pelaksanaan Germas.....	177
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT	181
3.1. Rekomendasi Secara Umum	181
3.2. Langkah Tindak Lanjut.....	184
BAB IV LAMPIRAN	190
4.1. Bappelitbangda.....	190

4.2. BNN Kabupaten Pasuruan	197
4.3. BPJS Kesehatan.....	204
4.4. Bupati Pasuruan	211
4.5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	216
4.6. Dinas Kesehatan	223
4.7. Dinas Ketenagakerjaan	229
4.8. Dinas Komunikasi dan Informatika	235
4.9. Dinas Lingkungan Hidup.....	243
4.10. Dinas Pariwisata	250
4.11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	256
4.12. DP3AP2KB	262
4.13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	271
4.14. Dinas Perhubungan	279
4.15. Dinas Perikanan.....	288
4.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	294
4.17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	300
4.18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	307
4.19. Dinas Sosial	314
4.20. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	321
4.21. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.....	327
4.22. Kodim 0819.....	333
4.23. Polres Pasuruan	338
4.24. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	344



DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya	4
1.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya	9
1.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	12
1.4 Iklim Kabupaten Pasuruan.....	16
1.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	17
1.6 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....	46
1.7 Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024	48
1.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024	50
1.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024	52
1.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	54
1.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	55
1.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	56
1.13 Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	57
1.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	58
1.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	59
1.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	61
1.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	62
1.18 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	71
1.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	75
1.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	76
3.1 Matriks Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025-2026	188
4.1 Formulir Identifikasi Masalah Bappelitbangda	190
4.2 Formulir Evaluasi Bappelitbangda	192
4.3 Formulir Identifikasi Masalah BNN Kabupaten Pasuruan	197
4.4 Formulir Evaluasi BNN Kabupaten Pasuruan	199
4.5 Formulir Identifikasi Masalah BPJS Kesehatan	204

4.6	Formulir Evaluasi BPJS Kesehatan	205
4.7	Formulir Evaluasi Bupati Pasuruan.....	211
4.8	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	216
4.9	Formulir Evaluasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	218
4.10	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Kesehatan	223
4.11	Formulir Evaluasi Dinas Kesehatan	224
4.12	Formulir Evaluasi Dinas Ketenagakerjaan	229
4.13	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika	235
4.14	Formulir Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika	238
4.15	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Lingkungan Hidup	243
4.16	Formulir Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup	224
4.17	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pariwisata.....	250
4.18	Formulir Evaluasi Dinas Pariwisata.....	251
4.19	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ...	256
4.20	Formulir Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	257
4.21	Formulir Identifikasi Masalah DP3AP2KB.....	262
4.22	Formulir Evaluasi DP3AP2KB.....	263
4.23	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	271
4.24	Formulir Evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	273
4.25	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan.....	279
4.26	Formulir Evaluasi Dinas Perhubungan.....	283
4.27	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perikanan	288
4.28	Formulir Evaluasi Dinas Perikanan	289
4.29	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	294
4.30	Formulir Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	295
4.31	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ..	300
4.32	Formulir Evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	302



4.33	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	307
4.34	Formulir Evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	309
4.35	Formulir Identifikasi Masalah Dinas Sosial.....	314
4.36	Formulir Evaluasi Dinas Sosial	316
4.37	Formulir Evaluasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.	321
4.38	Formulir Identifikasi Masalah Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan	327
4.39	Formulir Evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan	328
4.40	Formulir Evaluasi Kodim 0819	333
4.41	Formulir Evaluasi Polres Pasuruan.....	338
4.42	Matrik Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.....	344



DAFTAR GAMBAR

1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	6
1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian.....	8
1.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan.....	17
1.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan	26
1.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029.....	28
1.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	29
1.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024.....	32
1.8 Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024.....	33
1.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	39
1.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	41
1.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2020-2024	43
1.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	44
1.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	47
1.14 Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	67
1.15 Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	69
1.16 Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	71
1.17 TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	73
1.18 IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	78
1.19 Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025	79
1.20 Grafik Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025	81
1.21 Grafik Tren Kematian Bayi 2019-2025	83
1.22 Grafik Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI).....	86
1.23 Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025	88
1.24 Grafik Penemuan Terduga TBC per Puskesmas 2025.....	90
1.25 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2021	93



1.26	Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2022.....	95
1.27	Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2023.....	97
1.28	Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2024.....	99
1.29	Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2025.....	102
1.30	Grafik Tren Penemuan Kasus HIV Kabupaten Pasuruan 2021-2025	104
1.31	Grafik Tren Penderita DM Kabupaten Pasuruan 2021-2025.....	106
1.32	Grafik Tren Penderita ODGJ Berat Kabupaten Pasuruan 2021-2025.....	107
1.33	Grafik Tren Penderita Hipertensi Kabupaten Pasuruan	109
1.34	Grafik Persentase Capaian ODF Kabupaten Pasuruan 2021-2025.....	110
2.1	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik.....	115
2.2	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit	115
2.3	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik.....	117
2.4	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	117
2.5	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi.....	119
2.6	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik.....	119
2.7	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik.....	124
2.8	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik.....	124
2.9	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan	132
2.10	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	132
2.11	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	134
2.12	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	134
2.13	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	136
2.14	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	136
2.15	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	138
2.16	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	138
2.17	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	141
2.18	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	141



2.19	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	143
2.20	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit.....	143
2.21	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	147
2.22	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	147
2.23	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	150
2.24	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	150
2.25	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan.....	153
2.26	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik	153
2.27	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	157
2.28	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit.....	157

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Laporan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai manifestasi akuntabilitas publik serta dokumentasi komprehensif atas upaya strategis daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasuruan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab sektoral semata, melainkan telah bertransformasi menjadi gerakan sistematis yang menuntut sinergi lintas sektor. Tahun 2025 diidentifikasi sebagai fase transisi krusial, di mana pemerintah daerah berupaya mengonsolidasikan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Analisis Konteks Kewilayahan Secara geo-ekonomis, Kabupaten Pasuruan menempati posisi strategis sebagai simpul dalam koridor ekonomi vital Jawa Timur yang menghubungkan Surabaya, Jember/Banyuwangi, dan Malang. Dukungan infrastruktur jalan tol yang terintegrasi telah mengukuhkan daerah ini sebagai destinasi investasi primadona. Namun, keunggulan geografis ini diimbangi dengan variabilitas topografi yang tinggi, membentang dari kawasan pesisir dataran rendah hingga pegunungan Bromo dan Welirang. Kondisi ini membawa implikasi logis berupa potensi kebencanaan hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang menuntut kesiapsiagaan sistem kesehatan yang resilien.

Capaian Kinerja Strategis Evaluasi kinerja tahun 2025 mencatatkan sejumlah prestasi monumental yang merefleksikan efektivitas intervensi kebijakan. Indikator paling signifikan terlihat pada keberhasilan Kabupaten Pasuruan mencapai predikat *Open Defecation Free* (ODF) 100% pada tahun 2024, sebuah lompatan drastis dari capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 60%. Status ini berhasil dipertahankan hingga periode pelaporan 2025. Prestasi serupa tercatat pada penurunan prevalensi *stunting* yang mencapai angka 3,9%, serta perbaikan indikator kesehatan ibu dan anak. Dalam aspek kepatuhan institusional, Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Kantor Bupati dan sektor BUMN menunjukkan performa ekselen dengan skor evaluasi mandiri tertinggi (34), memposisikan diri sebagai teladan utama (*role model*) dalam internalisasi budaya GERMAS.

Dinamika Implementasi dan Disparitas Lintas Sektor Kendati capaian makro menunjukkan tren positif, analisis mikro menyingkap adanya disparitas kualitas implementasi antar-instansi yang menempatkan Kabupaten Pasuruan pada fase "Transisi Administratif menuju Budaya Kerja". Evaluasi terhadap berbagai OPD menunjukkan variasi tantangan yang multidimensi:

1. Dinas Perikanan: Instansi ini telah menunjukkan keberpihakan pada fasilitas kesejahteraan pegawai melalui penyediaan ruang laktasi dan sudut baca yang representatif. Namun, terdapat kelemahan substansial dalam aspek pemantauan kesehatan klinis pegawai yang belum berjalan optimal.
2. Kementerian Agama (Kemenag): Sebagai institusi dengan modal sosial yang kuat di masyarakat, Kemenag memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Akan tetapi, ditemukan praktik pengelolaan limbah yang kontra-produktif, yakni pembakaran sampah kertas, yang bertentangan dengan prinsip kesehatan lingkungan yang diusung GERMAS.
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP): Teridentifikasi adanya kelemahan administratif, di mana instansi ini belum melengkapi data demografi pegawai secara komprehensif dalam proses evaluasi, yang menghambat pemetaan status kesehatan aparatur secara akurat.
4. Kesenjangan Anggaran Sanitasi: Terdapat anomali pada pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), di mana realisasi anggaran pada Semester I tercatat nihil (Rp0), dan realisasi Semester II sangat minim dibandingkan pagu yang tersedia, mengindikasikan adanya hambatan dalam eksekusi program sanitasi di tingkat lapangan.

Kabupaten Pasuruan saat ini tengah menghadapi beban ganda penyakit (*double burden of disease*). Di satu sisi, terjadi transisi epidemiologi yang ditandai dengan peningkatan tren Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Hipertensi dan Diabetes Mellitus, yang berkorelasi erat dengan gaya hidup. Di sisi lain, penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman laten dengan angka kasus yang stagnan pada 27 kasus di tahun 2025. Fenomena ini menegaskan urgensi pergeseran paradigma dari kuratif menjadi promotif-preventif.

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, laporan ini merumuskan kerangka tindak lanjut untuk mempercepat institusionalisasi GERMAS:

1. Jangka Pendek (Triwulan I): Fokus diarahkan pada pemenuhan instrumen administratif dan pelaksanaan aktivitas fisik berbiaya rendah (*Low Hanging Fruits*), serta penguatan landasan yuridis melalui penerbitan Instruksi Bupati.
2. Jangka Menengah (Semester II): Integrasi indikator perilaku sehat ke dalam sistem manajemen kinerja pegawai (SKP/e-Kinerja), menjadikan kesehatan fisik sebagai prasyarat produktivitas birokrasi.
3. Reorientasi Insentif: Mekanisme *GERMAS Award* perlu direformasi dengan menggeser fokus penilaian dari ketersediaan fasilitas fisik semata menuju penilaian berbasis upaya (*effort-based*), seperti persentase partisipasi skrining kesehatan dan kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
4. Intervensi Spesifik: Rekomendasi teknis diberikan kepada instansi terkait, termasuk kewajiban bagi Kemenag untuk mengalihkan metode pemusnahan dokumen dari pembakaran menuju daur ulang atau pemanfaatan Bank Sampah.

Sebagai konklusi, keberhasilan GERMAS di Kabupaten Pasuruan tidak dapat bertumpu pada satu sektor dominan. Diperlukan orkestrasi lintas sektor yang harmonis dan berkelanjutan untuk mempertahankan capaian ODF dan stunting, sekaligus memitigasi risiko penyakit tidak menular. Sinergi holistik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan kunci determinan dalam mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan yang sehat, bugar, produktif, dan sejahtera.

BAB I**GAMBARAN UMUM & KEBIJAKAN GERMAS DAERAH****GAMBARAN UMUM DAERAH****1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah**

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21

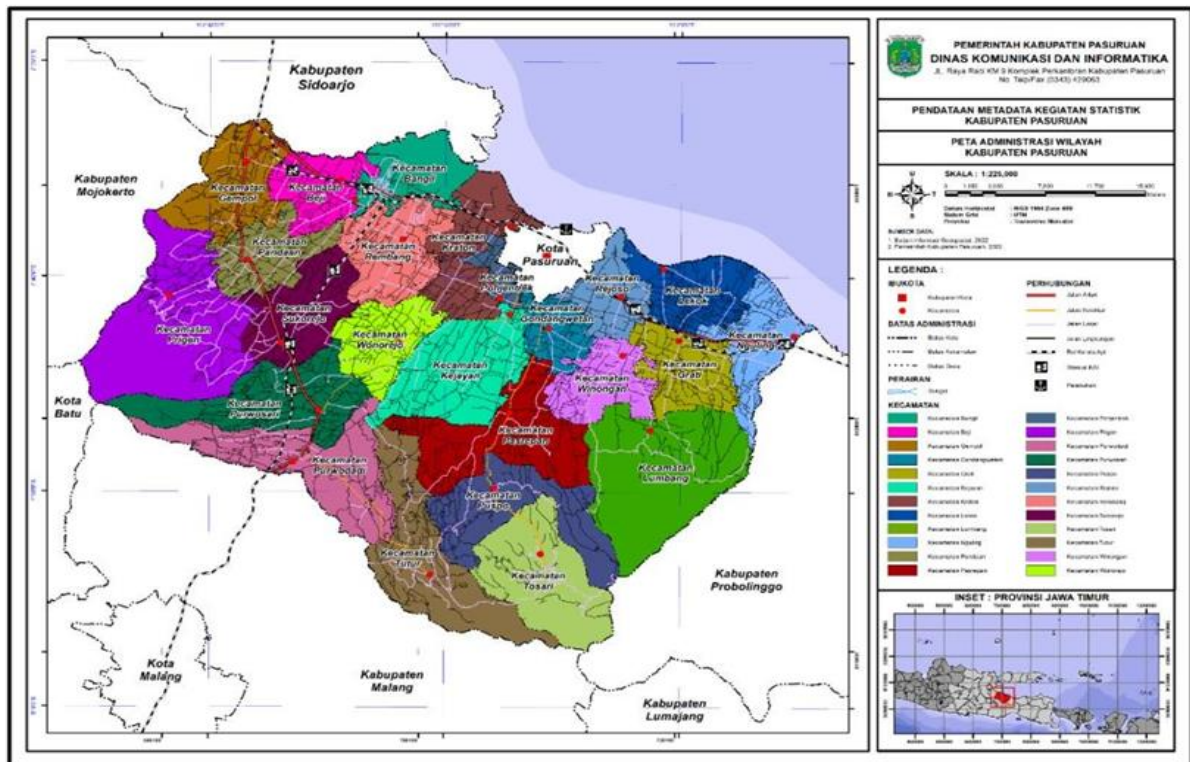
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun

visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2. Potensi Sumber Daya Daerah

A. Topografi

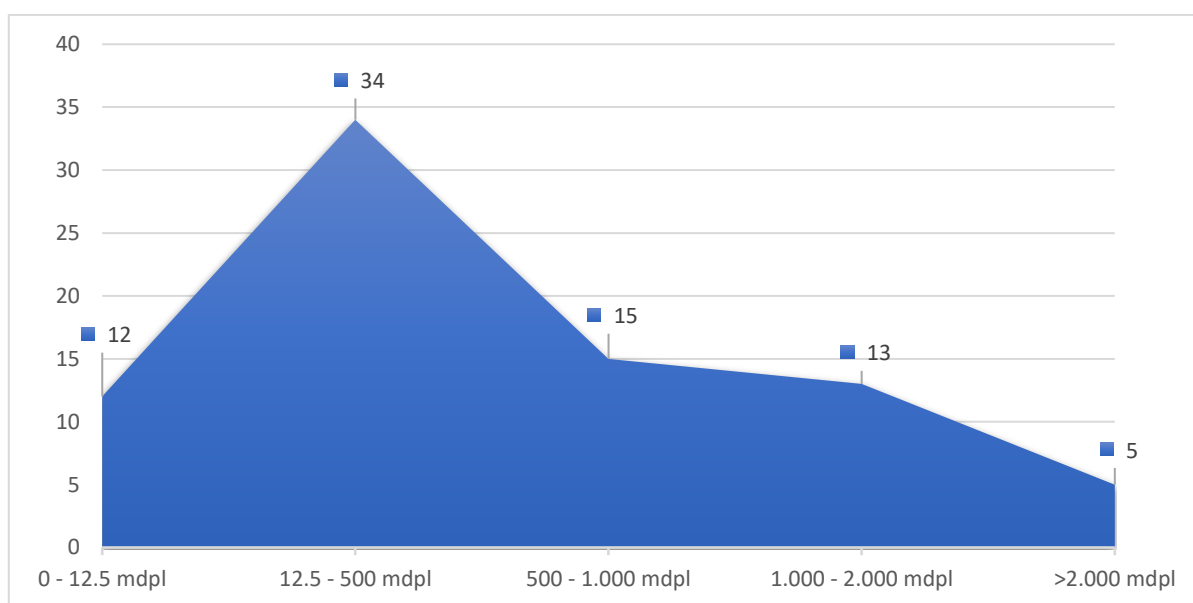
Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelerengannya yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengannya, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengannya 0 - 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejos, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengannya 2 - 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengannya 5 - 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengannya 8 - 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.

5. Zona Kelereng 15 - 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.
6. Zona Kelereng 25 - 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
7. Zona Kelereng > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke

dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembangan usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 - 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring	Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 - 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi

batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang

mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartar tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartar atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartar tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartar Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 1.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan 2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
	2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian

ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan biasanya berkisar antara sedang hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.
2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat

keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.

4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.
5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan (top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-



umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

C. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

Tabel 1.4 Iklim Kabupaten Pasuruan

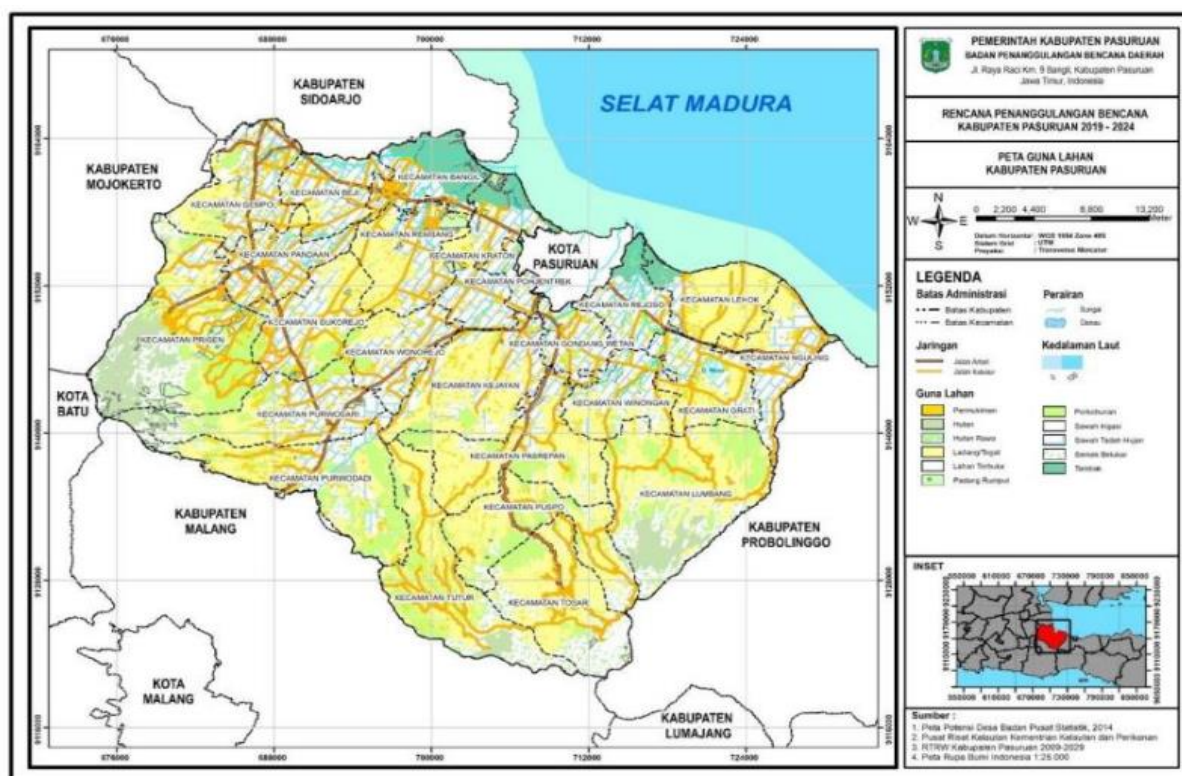
Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini

terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 1.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 1.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006

No	Penggunaan	Presentase
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara ekonomis, Kabupaten Pasuruan dianugerahi berbagai keunggulan komparatif maupun kompetitif yang menjadi potensi daerah yang sangat strategis. Apabila seluruh potensi tersebut dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan manajemen yang tepat, maka hal tersebut akan menjadi katalisator utama dalam mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah secara signifikan. Salah satu pilar utama yang menjadi keunggulan tersebut adalah:

1. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi, yang telah menghubungkan hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Aksesibilitas yang tinggi ini memberikan dukungan yang sangat vital bagi akselerasi perkembangan di berbagai sektor strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata, produktivitas pertanian, kemajuan sektor industri, serta kelancaran transportasi. Lebih jauh lagi, konektivitas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas.

Selain mengandalkan prasarana jalan raya, sistem transportasi logistik barang dan mobilitas jasa juga diperkuat dengan dukungan moda transportasi berbasis rel. Jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarana pendukung yang efisien, dengan melayani dua koridor utama yang strategis, yakni jurusan selatan (Surabaya - Bangil - Malang - Blitar) dan jurusan timur (Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi).

Sebagai daerah yang memiliki basis perekonomian kuat pada sektor pertanian dan industri, Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi teknis yang handal. Infrastruktur ini berfungsi krusial dalam mendukung produktivitas lahan pertanian serta kebutuhan air baku bagi kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang tersedia dirancang untuk mampu mengairi lahan pertanian secara memadai, yang pengelolaannya dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan irigasi partisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan air.

Sementara itu, dari sisi pengembangan investasi, ketersediaan Kawasan Industri yang terpadu menjadi nilai tambah tersendiri. Kawasan ini telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, termasuk fasilitas pengelolaan limbah yang berstandar serta fasilitas penunjang lainnya. Keunggulan kawasan ini semakin nyata dengan adanya konektivitas langsung (aksesibilitas) menuju jaringan jalan tol yang menghubungkan arah Surabaya - Malang hingga Banyuwangi/Bali, yang menjamin efisiensi logistik.

Tidak hanya itu, ketersediaan komponen infrastruktur utilitas dasar lainnya juga telah terpenuhi dalam jumlah yang cukup memadai, meliputi ketersediaan air bersih, suplai energi listrik yang stabil, jaringan pipa gas untuk industri, serta infrastruktur telekomunikasi yang modern. Dengan demikian, ekosistem infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan."

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan menyimpan kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan bernilai tinggi, mencakup berbagai spektrum mulai dari keindahan alam, kekayaan sejarah, hingga inovasi wisata buatan dan agrowisata. Salah satu daya tarik utama yang menjadi primadona dan telah

diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo. Destinasi ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik serta pemandangan kaldera yang spektakuler.

Selain pesona Bromo, Kabupaten Pasuruan juga dianugerahi berbagai wisata alam lainnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Wisata berbasis perairan dan air terjun menjadi unggulan, meliputi Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru yang legendaris, keindahan Danau Ranu Grati, serta kejernihan Sumber Air Umbulan. Deretan air terjun eksotis lainnya yang patut dikunjungi antara lain Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, hingga Air Terjun Coban Waru. Tidak hanya di dataran tinggi, potensi wisata bahari dan pesisir juga tersedia, seperti Pantai Pasir Panjang di Kecamatan Lekok, serta ekosistem Hutan Mangrove yang asri di Pantai Penunggul (Kecamatan Nguling), Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.

Dari aspek sejarah dan spiritualitas, Kabupaten Pasuruan kaya akan situs wisata budaya dan religi yang menjadi saksi perjalanan peradaban masa lampau. Peninggalan masa klasik Hindu-Buddha dapat ditemukan pada situs Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, serta situs Dewa Wisata Purbakala Tambak Sari. Jejak sejarah perjuangan juga terekam di Goa Jepang/Inna Tretes. Sementara itu, wisata religi Islam atau ziarah makam leluhur meliputi Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, dan Makam Mbah Segoropuro. Bagi para pencari ketenangan spiritual, terdapat pula lokasi pertapaan seperti Pertapaan Abiyoso dan Pertapaan Indrokilo.

Melengkapi keindahan alam dan budaya, sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan Wisata Buatan yang menawarkan alternatif rekreasi modern dan pengalaman baru bagi wisatawan keluarga. Beberapa destinasi unggulan dalam kategori ini antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park.

Sektor pertanian yang subur di Kabupaten Pasuruan juga diintegrasikan menjadi daya tarik Wisata Agro yang edukatif dan rekreatif. Destinasi ini tersebar luas, meliputi Agrowisata Apel, Agro Kopi, serta Agro Bunga Krisan dan Paprika yang terpusat di Kecamatan Tutar. Selain itu, terdapat pula sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutar dan Kecamatan Grati, budidaya Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, serta sentra Agro Durian yang dapat ditemui di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutar, dan Puspo. Destinasi agrowisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi meliputi Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutar, wisata sejarah industri Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, perkebunan Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, wisata edukasi Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, serta hamparan harum Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Terakhir, Kabupaten Pasuruan juga memfasilitasi segmen Wisata Minat Khusus yang menawarkan pengalaman eksklusif dan petualangan. Destinasi yang masuk dalam kategori ini antara lain Taman Safari Indonesia II yang terkenal sebagai konservasi satwa, kawasan elit Taman Dayu, fasilitas olahraga golf di Finna Golf & Country Club, kawasan wisata Kaliandra, Bukit Flora, serta area berkemah di Baung Camp. Pengembangan pariwisata ini juga diperkuat dengan keberadaan Desa Wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-desa wisata ini tersebar strategis di berbagai kecamatan, yaitu di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutar, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Winongan.

3. Potensi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Pasuruan, dengan spektrum yang luas meliputi industri skala besar, menengah, hingga industri kecil. Persebaran industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang baik, yakni meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Kejayan. Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) tumbuh

subur dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Sektor IKM ini bergerak dalam berbagai bidang yang variatif, antara lain industri makanan dan minuman, kerajinan bordir, tekstil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), konveksi, meubel kayu, serta kerajinan logam.

Dalam peta industri kreatif daerah, salah satu sektor unggulan yang telah memiliki reputasi kuat adalah kerajinan bordir, konveksi, dan batik. Kecamatan Bangil telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan bordir dengan keunggulan kompetitif pada desain yang inovatif dan kualitas yang prima. Tingginya permintaan pasar yang sering kali melebihi kapasitas produksi di Bangil memicu terbentuknya jejaring produksi yang meluas ke kecamatan penyangga lainnya, seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, dan Winongan. Jangkauan pemasaran produk bordir ini tidak hanya mendominasi pasar lokal, tetapi juga sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah. Di sektor lain, industri konveksi berkembang pesat di Kecamatan Gempol dengan spesialisasi produk berupa celana jeans, kaos, dan celana olahraga (sport). Tidak ketinggalan, industri batik pewarna alam juga menunjukkan eksistensinya yang semakin diakui oleh konsumen mancanegara, dengan pasar ekspor mencakup Korea, Malaysia, dan Australia.

Potensi sumber daya alam juga mendorong berkembangnya sentra industri kayu dan meubel. Sentra-sentra ini tersebar di berbagai titik, antara lain di Desa Sentul (Kecamatan Purwodadi), Desa Tambaksari (Kecamatan Kraton), Desa Wonorejo (Kecamatan Wonorejo), Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan (Kecamatan Pohjentrek), serta wilayah Kecamatan Winongan dan Rejoso. Para pengrajin di wilayah ini sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari mainan edukatif anak-anak, aksesoris otomotif (setir mobil, handle persneling, dashboard), kotak tisu, papan catur, hingga produk furnitur atau meubel. Pemasaran produk berbasis kayu ini telah menjangkau pasar domestik hingga internasional.

Selain kayu, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra kerajinan logam mulia, khususnya perak, yang berpusat di Kecamatan Bangil dan Gempol. Karya pengrajin perak ini telah berhasil menembus pasar global, termasuk ekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Di sisi lain, industri

pendukung otomotif berupa industri kecil spare part kendaraan bermotor tumbuh berkembang di Kecamatan Winongan, dengan distribusi pasar utama menyuplai kebutuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Untuk mendukung iklim investasi, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri terpadu, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Sebagai kawasan berikat, PIER menawarkan lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan menjanjikan bagi para investor. Selain PIER, pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan kawasan peruntukan industri di luar area tersebut yang membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan industri baru di masa depan.

Sektor industri kecil makanan dan minuman (mamin) yang berbasis bahan baku lokal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di seluruh kecamatan. Salah satu ikon kuliner, yaitu sentra Pia di Kecamatan Gempol, terus berkembang dan menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan pemasaran yang meluas ke Malang dan Surabaya. Potensi agroindustri juga dimanfaatkan dengan baik, seperti industri olahan apel, kopi, dan susu yang tumbuh di Kecamatan Tukur; serta industri aneka keripik yang tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari, dan Purwodadi. Di wilayah pesisir, industri pengolahan hasil perikanan berkembang di Kecamatan Rejos, Lekok, Grati, Bangil, dan Beji. Terdapat pula produk unik seperti minuman herbal Pokak di Kecamatan Winongan serta olahan sirup dan dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri potensial ini memberikan optimisme dan harapan baru bagi penguatan ekonomi sektor riil daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan industri kecil menengah ini juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pemasaran yang strategis, seperti Kawasan Wisata Masjid Cheng Hoo, Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, kawasan Taman Dayu, serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol yang berfungsi sebagai etalase produk-produk lokal.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di

Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2025, wilayah ini memiliki bentang alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Keanekaragaman Sektor Pertanian dan Perkebunan Di sektor pertanian, Kabupaten Pasuruan memproduksi berbagai komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Purwodadi, Wonorejo, hingga Grati.

Kekuatan utama lainnya terletak pada sektor hortikultura yang terbagi berdasarkan topografi wilayah. Wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Tukur, Puspo, dan Tosari menjadi sentra sayuran dan buah subtropis, menghasilkan kentang, paprika, wortel, kubis, serta buah-buahan premium seperti apel dan stroberi. Sementara itu, wilayah dataran rendah dan menengah dikenal sebagai penghasil buah tropis unggulan, khususnya Mangga Gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta, serta Alpukat, Pisang Cavendish, Durian, dan Jeruk. Tak hanya buah dan sayur, florikultura juga berkembang pesat dengan komoditas tanaman hias, Anggrek, Krisan, dan Bunga Sedap Malam yang banyak ditemui di wilayah Prigen, Rembang, dan Bangil.

Sektor perkebunan komersial didukung oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tebu menjadi tanaman yang dominan di banyak kecamatan, disusul oleh Kopi dan Cengkeh yang tumbuh subur di lereng pegunungan, serta komoditas lain seperti Kapuk, Tembakau, dan Kelapa.

Sentra Peternakan yang Produktif Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai sentra peternakan yang vital. Populasi ternak tersebar merata dengan spesialisasi tertentu. Komoditas sapi potong dan unggas (ayam buras, petelur, pedaging, itik) dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun, yang menjadi ciri khas adalah peternakan Sapi Perah. Wilayah seperti Tukur, Puspo, Purwodadi, Grati, dan Lekok menjadi pusat produksi susu segar yang signifikan. Selain itu, ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci juga dikembangkan secara luas oleh masyarakat sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sektor Perikanan: Dari Kolam hingga Laut Potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan melengkapi kekayaan agrarisnya. Sektor ini terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di empat kecamatan dataran tinggi (Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang) yang memang difokuskan untuk agrikultur pegunungan.

Di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling sektor perikanan sangat dominan dengan hasil laut dan tambak. Perikanan tangkap menghasilkan tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap, kepiting, dan udang. Sementara itu, budidaya tambak (air payau) di wilayah ini memproduksi Bandeng, Udang (Windu, Vanamei), dan Rumput Laut dalam jumlah besar.

Untuk wilayah daratan (non-pesisir), budidaya perikanan air tawar berkembang pesat melalui metode kolam. Komoditas utamanya meliputi Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, dan Patin. Keunikan tersendiri terdapat di Kecamatan Grati, yang selain memiliki potensi laut, juga mengembangkan budidaya sistem Jaring Apung (kemungkinan besar di Ranu Grati) dengan komoditas seperti Nila, Tombro, dan Gurami.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan ekosistem ekonomi yang kuat dengan pembagian zonasi komoditas yang jelas antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir.

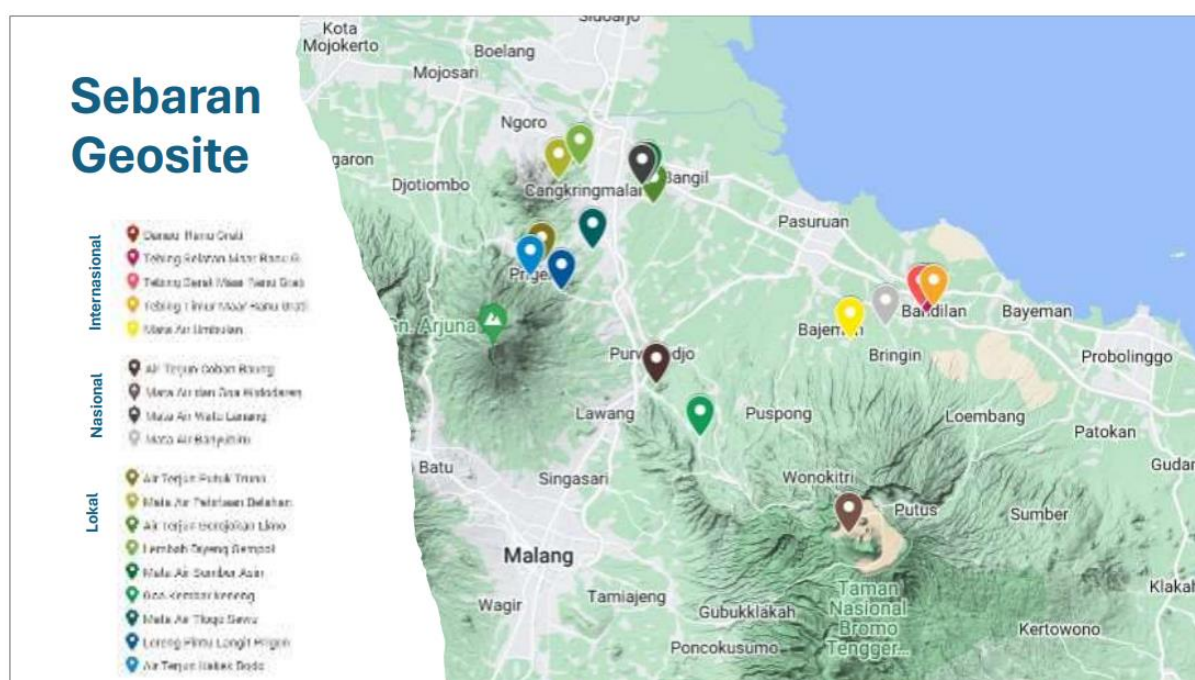
5. Potensi Keragaman Geologi

Berdasarkan pelaksanaan kajian mendalam mengenai Geoheritage (warisan geologi) yang dilakukan pada Tahun 2024, telah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai bentuk keragaman geologi (geodiversity) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Temuan ini menunjukkan kekayaan fenomena geologis yang signifikan. Adapun hasil identifikasi geodiversity tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki nilainya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Geoheritage Bertaraf Internasional Pada tingkatan tertinggi ini, terdapat 5 (lima) situs geologi yang memiliki nilai signifikansi dunia. Situs-situs tersebut meliputi fenomena hidrologi Mata Air Artesis Umbulan, serta kompleks vulkanik purba Ranu Grati yang terdiri secara rinci atas Danau Maar Ranu Grati beserta formasi dinding kalderanya, yakni Tebing Barat

Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, dan Tebing Selatan Maar Ranu Grati.

- 2) Geoheritage Bertaraf Nasional Pada tingkatan nasional, teridentifikasi sebanyak 4 (empat) situs geologi yang menjadi aset penting negara. Kelompok ini mencakup Mata Air Artesis Banyubiru, pesona alam Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, serta keunikan sistem hidrologi dan speleologi di Mata Air dan Goa Widodaren.
- 3) Geoheritage Bertaraf Lokal Pada tingkatan lokal, terdapat keragaman geologi yang paling banyak jumlahnya, yakni 9 (sembilan) situs. Situs-situs ini meliputi Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, bentang alam Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, serta fenomena geologi unik Brown Canyon Gempol.



Gambar 1.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

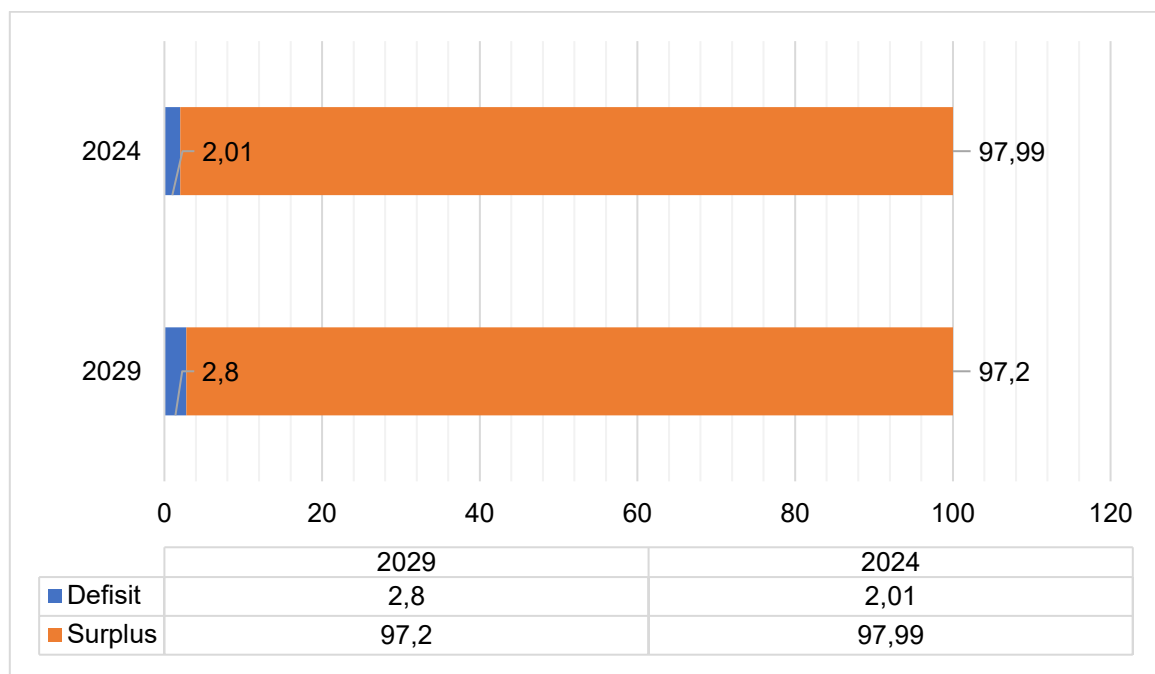
Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun

secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



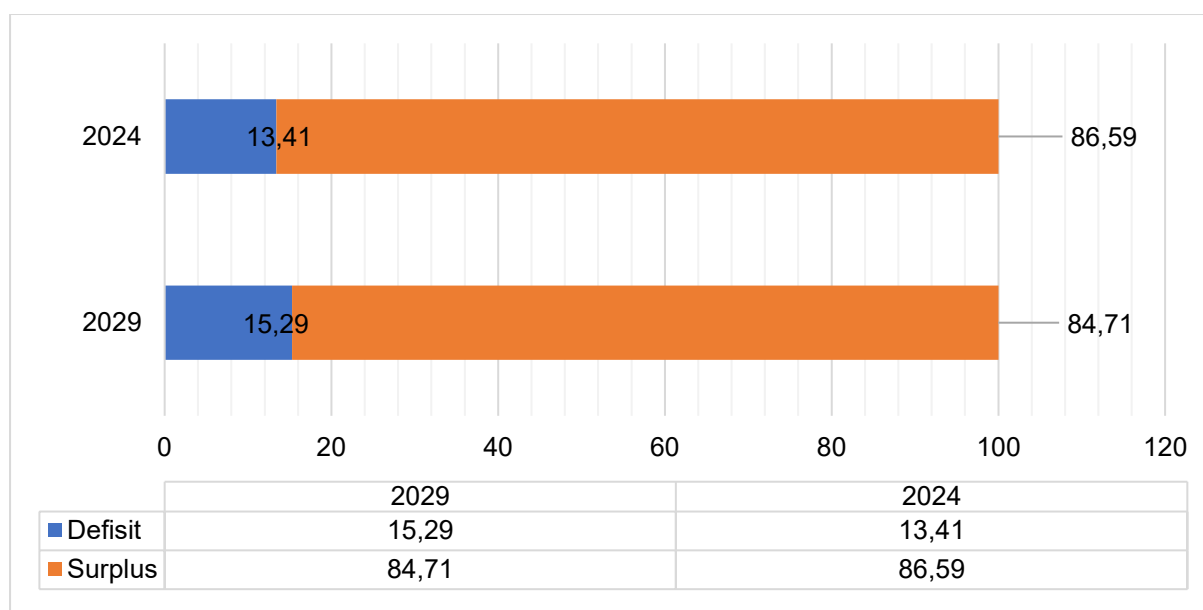
Gambar 1.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 1.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

1.4. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendongkrak permintaan energi.

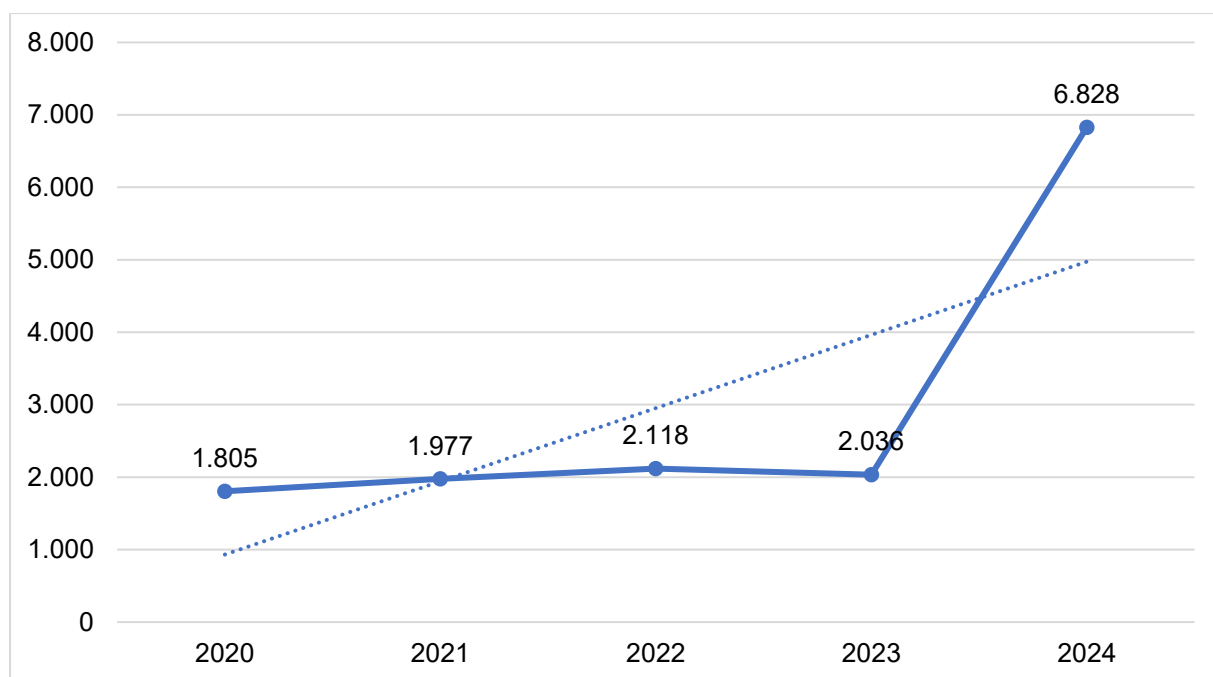
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 1.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

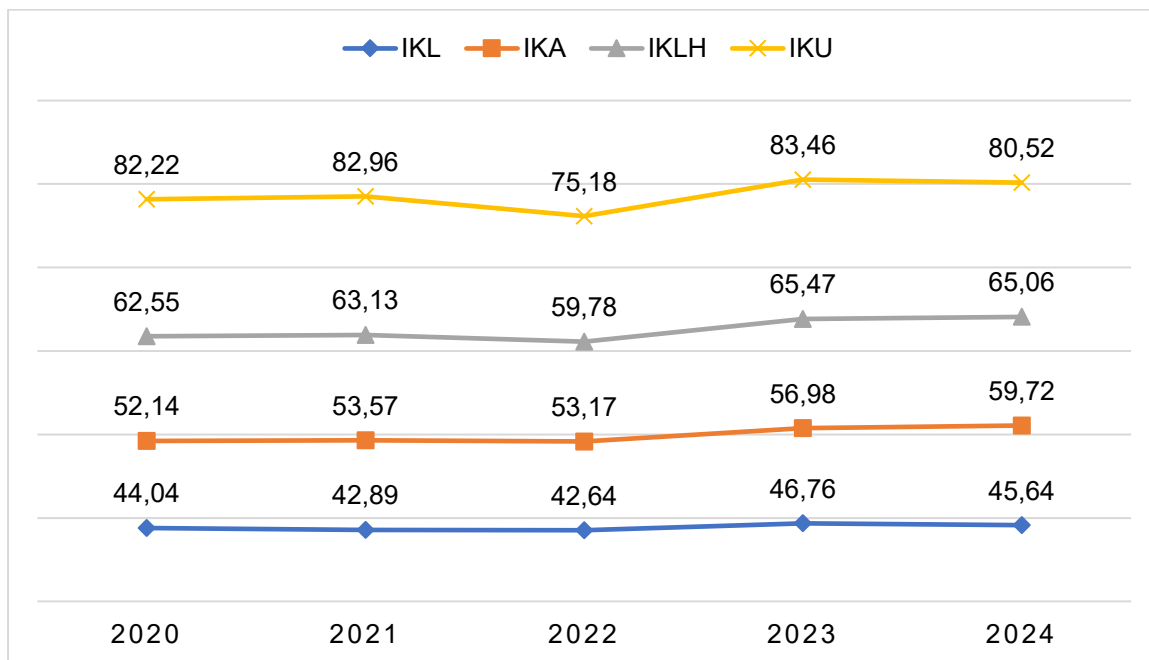
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang

sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 1.8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh

merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.

2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

1.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai wilayah atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengalami dampak buruk dari berbagai jenis fenomena, baik itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia (*man-made disaster*). Tingginya tingkat kerawanan ini tidak terlepas dari karakteristik kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks dan beragam. Keberadaan jajaran gunung berapi aktif, hamparan dataran rendah yang luas, serta kondisi ekologis dataran tinggi yang mulai mengalami degradasi

lingkungan, menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki spektrum potensi bencana alam yang cukup luas.

Berdasarkan pemetaan potensi, terdapat enam kategori utama kawasan rawan bencana di wilayah ini, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Wilayah Kabupaten Pasuruan diapit oleh aktivitas vulkanik yang signifikan. Potensi ini terbagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Kawasan Gunung Bromo yang memiliki area rawan bencana seluas 1.320 Ha serta daerah dengan status waspada seluas 751 Ha. Area ini secara administratif mencakup Desa Ngadirejo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, dan Desa Kedawung yang terletak di Kecamatan Tosari. Kedua, Kawasan Gunung Welirang yang memiliki area rawan bencana seluas 1.368 Ha dan daerah waspada seluas 809 Ha. Wilayah paparannya meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, serta meluas hingga Desa Cendono, Desa Sumberejo, dan Desa Tambaksari di wilayah Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah Mengingat topografi wilayah yang berbukit, potensi kawasan rawan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi cukup luas, yakni mencapai 37.626,4 Ha. Kerawanan ini secara spesifik terdapat di wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam, yaitu lebih dari 40% (kelerengan > 40%). Zona merah kerawanan longsor ini terkonsentrasi di kawasan dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan Rawan Banjir Ancaman hidrometeorologi berupa banjir memiliki potensi luasan terdampak sebesar 11.948,15 Ha. Bencana ini dominan mengancam wilayah dataran rendah atau daerah hilir yang menjadi muara dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan yang masuk dalam zona rawan ini antara lain Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan. Mekanisme banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan di

daerah hulu sungai yang tidak mampu tertampung sehingga mengakibatkan air meluap ke kawasan hilir. Selain banjir luapan sungai, terdapat pula ancaman banjir pasang air laut atau *rob* yang secara spesifik mengancam wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton.

4. Kawasan Rawan Angin Puyuh/Puting Beliung Fenomena cuaca ekstrem berupa angin puyuh atau puting beliung memiliki potensi kejadian di wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo. Selain itu, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di beberapa kecamatan lain, mengingat adanya tren anomali iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memicu kejadian serupa di lokasi yang lebih luas.
5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Potensi kebakaran hutan mengancam wilayah-wilayah yang memiliki tutupan vegetasi hutan dan semak belukar yang kering, terutama saat musim kemarau. Area yang rentan meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, serta Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Selain itu, kawasan pegunungan di R. Soeryo serta kompleks Pegunungan Arjuno, Welirang, dan Penanggungan yang mencakup wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol juga memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.
6. Kawasan Rawan Kekeringan Ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan risiko berdasarkan intensitas dan dampaknya, yaitu:
 - Ancaman Kekeringan Tinggi: Berpotensi terjadi secara meluas di beberapa desa, meliputi:
 - Kecamatan Lumbang: Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbung.

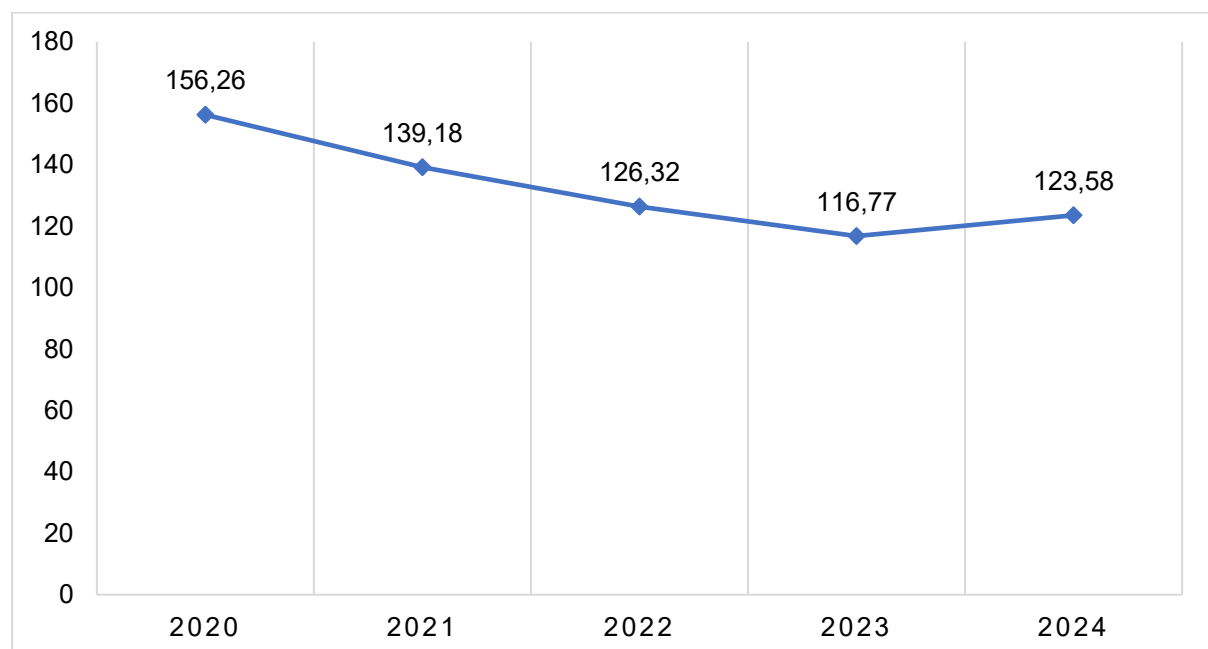
- Kecamatan Kejayan: Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo.
 - Kecamatan Lekok: Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang.
 - Kecamatan Winongan: Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi.
 - Kecamatan Puspo: Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran.
 - Kecamatan Gempol: Desa Bulusari.
 - Kecamatan Grati: Desa Karanglo.
- Ancaman Kekeringan Sedang: Teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pasrepan, mencakup Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo.
 - Ancaman Kekeringan Rendah: Terjadi pada skala terbatas di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) serta Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Seluruh potensi kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya dipotret secara sistematis dan dianalisis secara komprehensif melalui instrumen Indeks Risiko Bencana (IRB). Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko secara kuantitatif dengan menilai probabilitas serta besaran dampak yang diperkirakan akan muncul apabila suatu ancaman benar-benar termanifestasi menjadi peristiwa bencana di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, IRB tidak hanya merekam keberadaan ancaman, tetapi juga menggambarkan konsekuensi nyata yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia, aset, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah.

Secara metodologis, IRB merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu indeks ancaman (hazard) yang merepresentasikan intensitas dan frekuensi potensi bahaya, indeks kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan tingkat

keterpaparan dan kelemahan sistem sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan, dan indeks kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan gambaran risiko yang utuh dan proporsional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang objektif dan terukur.

Hasil pengkajian risiko bencana berbasis IRB ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Strategi PRB diarahkan secara simultan untuk menekan tingkat bahaya dan kerentanan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan aspek sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, IRB berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat preventif dan berorientasi pada ketahanan wilayah. Adapun tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan secara visual disajikan dalam gambar berikut sebagai ilustrasi dinamika tingkat risiko bencana dari waktu ke waktu.:



Gambar 1.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

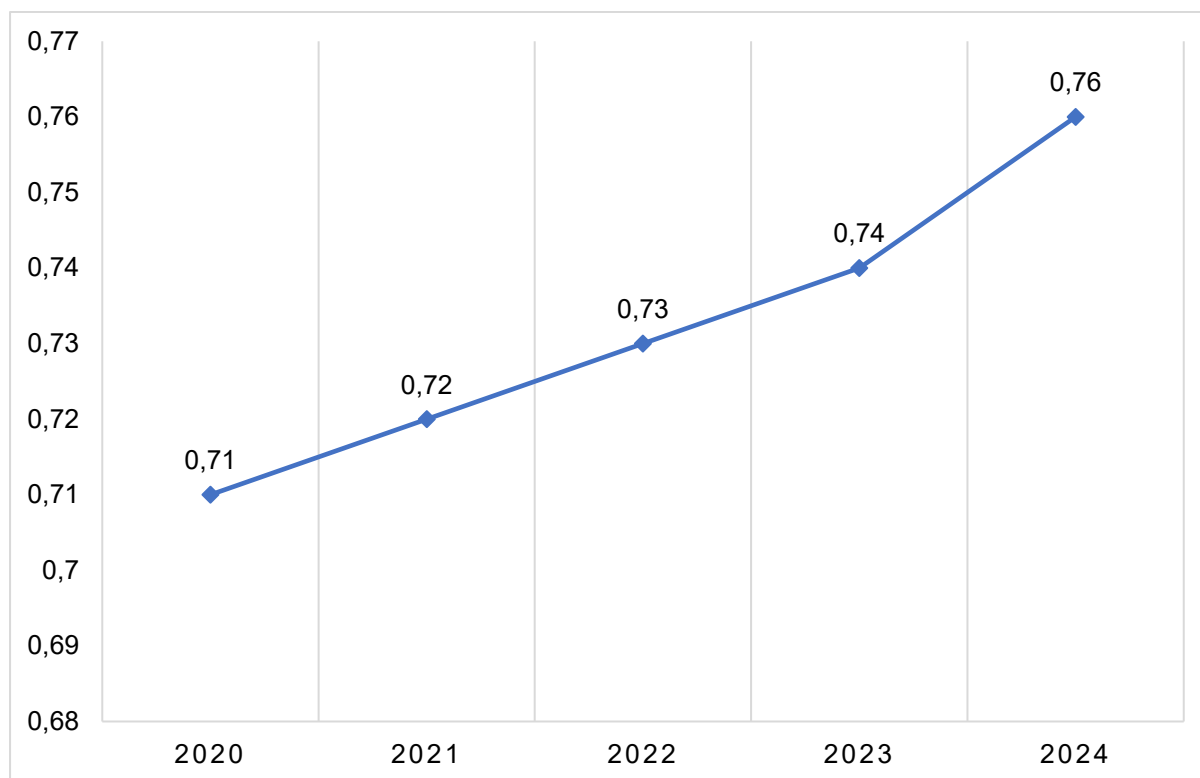
Catatan: Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data runtun waktu (*time series*) yang mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan capaian yang sangat positif dan menggembirakan. Indikator keberhasilan ini tercermin jelas dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang secara konsisten mengalami tren penurunan di setiap tahun pelaporannya. Akumulasi dari berbagai upaya strategis penurunan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan ini telah berhasil mengubah peta kerawanan daerah, sehingga menempatkan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori risiko bencana tingkat Sedang, sebuah perbaikan status yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian substansial dalam penurunan risiko bencana ini didorong secara signifikan oleh penguatan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, utamanya melalui akselerasi program pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Progresivitas pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh ini terlihat sangat nyata dari data pertumbuhan tahunan yang terus menunjukkan grafik meningkat. Pada tahun 2020, tercatat baru terdapat 10 desa/kelurahan yang berstatus tangguh bencana. Jumlah ini kemudian bertambah secara bertahap menjadi 14 desa/kelurahan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 18 desa/kelurahan pada tahun 2022, dan mencapai 20 desa/kelurahan pada tahun 2023. Puncaknya, terjadi lonjakan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024 dengan total capaian kumulatif sebanyak 30 desa/kelurahan yang telah berhasil dikukuhkan statusnya sebagai wilayah tangguh bencana.

Ditinjau secara teoritis maupun praktis, tren penurunan nilai IRB ini memiliki korelasi linier yang kuat dan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman. Fenomena positif ini selaras dengan naiknya grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebuah metrik yang merepresentasikan tingkat kesiapan dan ketangguhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keseluruhan siklus manajemen bencana. Peningkatan ketahanan daerah yang solid ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi penguatan lima pilar utama kapasitas yang fundamental, yaitu penguatan struktur kelembagaan yang responsif, optimalisasi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang masif kepada publik, serta

implementasi upaya mitigasi fisik maupun non-fisik dan kesiapsiagaan yang terencana dengan matang. Gambaran komprehensif mengenai hubungan kausalitas antara penurunan risiko dan peningkatan ketahanan daerah ini disajikan secara visual dalam Gambar berikut:



Gambar 1.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

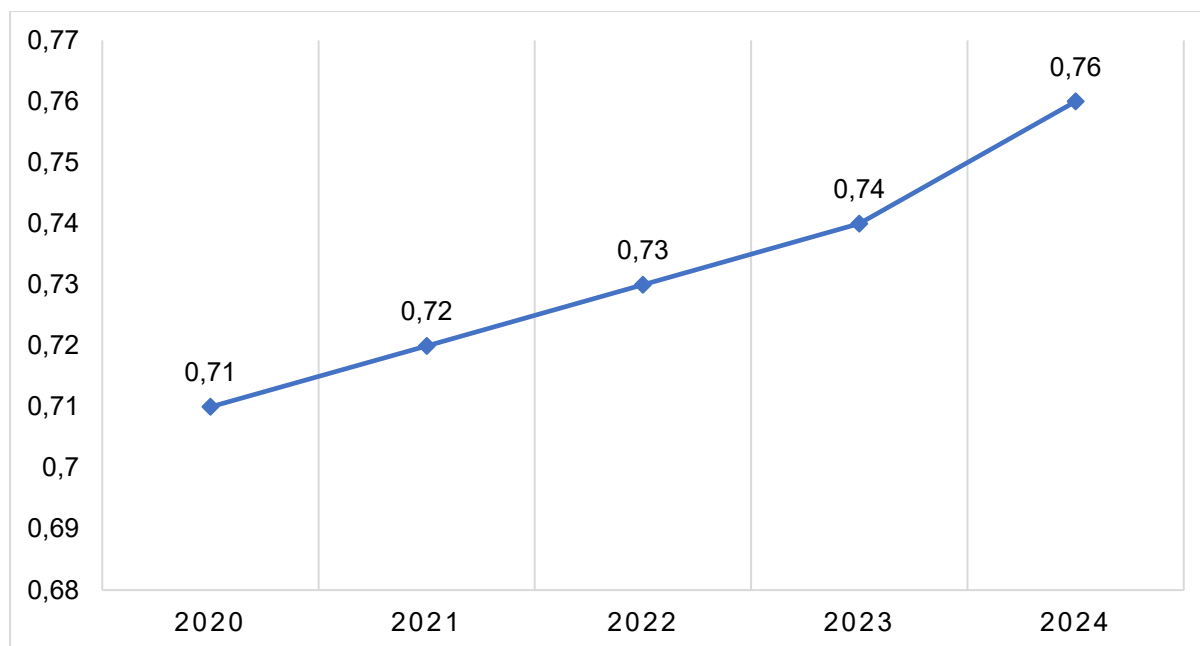
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Eskalasi fenomena bencana alam yang melanda suatu wilayah kini tidak lagi dapat dipandang secara parsial sebagai akibat tunggal dari faktor kerawanan geofisik lokal semata. Lebih jauh dari itu, frekuensi dan intensitas bencana telah berakselerasi secara dramatis akibat dampak destruktif dari fenomena global perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu efek domino yang luas, sistemik, dan multidimensi, yang tidak hanya mengancam stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi dan menghambat produktivitas daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum melalui munculnya vektor penyakit baru, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang vital. Secara spesifik, ancaman langsung yang paling nyata dan meresahkan dari krisis iklim ini bermanifestasi dalam bentuk kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang secara spesifik membahayakan keberlangsungan kawasan

pesisir melalui ancaman abrasi dan banjir rob, serta anomali cuaca berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang polanya semakin volatil, acak, dan sulit diprediksi dampaknya.

Merespons dinamika lingkungan yang semakin kritis tersebut, implementasi upaya mitigasi perubahan iklim menjadi langkah mutlak, imperatif, dan mendesak yang harus dilakukan guna mereduksi risiko kerusakan sistemik bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam kerangka strategis ini, pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menempati posisi sentral sebagai langkah fundamental atau batu pijakan awal. Upaya inventarisasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan komprehensif guna mengidentifikasi, mengukur, serta memetakan sumber-sumber emisi karbon secara presisi. Tujuannya adalah agar strategi pengurangan emisi dapat dirumuskan secara *evidence-based* dan dieksekusi secara terukur, sistematis, serta tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penyumbang emisi terbesar, seperti sektor energi, limbah, maupun pertanian.

Selanjutnya, efektivitas kinerja mitigasi daerah ini dievaluasi secara ketat melalui indikator intensitas emisi GRK, dengan fokus utama pada parameter Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂eq). Berdasarkan hasil pemantauan data terintegrasi melalui platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Nasional Rendah Karbon (AKSARA) dengan data mutakhir yang diakses pada tanggal 30 Mei 2024, tercatat fakta yang menggembirakan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif berupa kenaikan grafik yang sangat signifikan sejak tahun dasar 2020. Lonjakan capaian angka potensi penurunan ini bukan sekadar representasi statistik di atas kertas semata, melainkan sebuah manifestasi konkret dari kuatnya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berkontribusi aktif menyukseskan upaya global mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang rendah karbon, hijau, dan berkelanjutan. Adapun rincian detail mengenai tren capaian komitmen penurunan emisi ini divisualisasikan secara lengkap pada Gambar berikut:



Gambar 1.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

1.7. Demografi

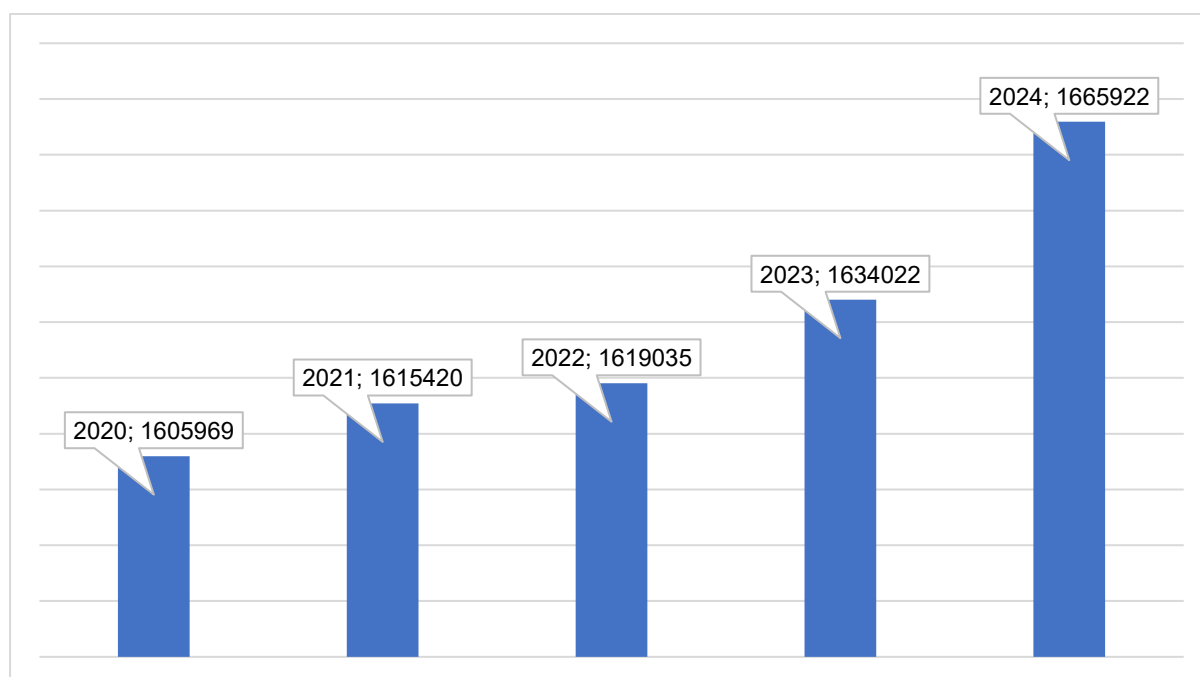
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan,

dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 1.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969

jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

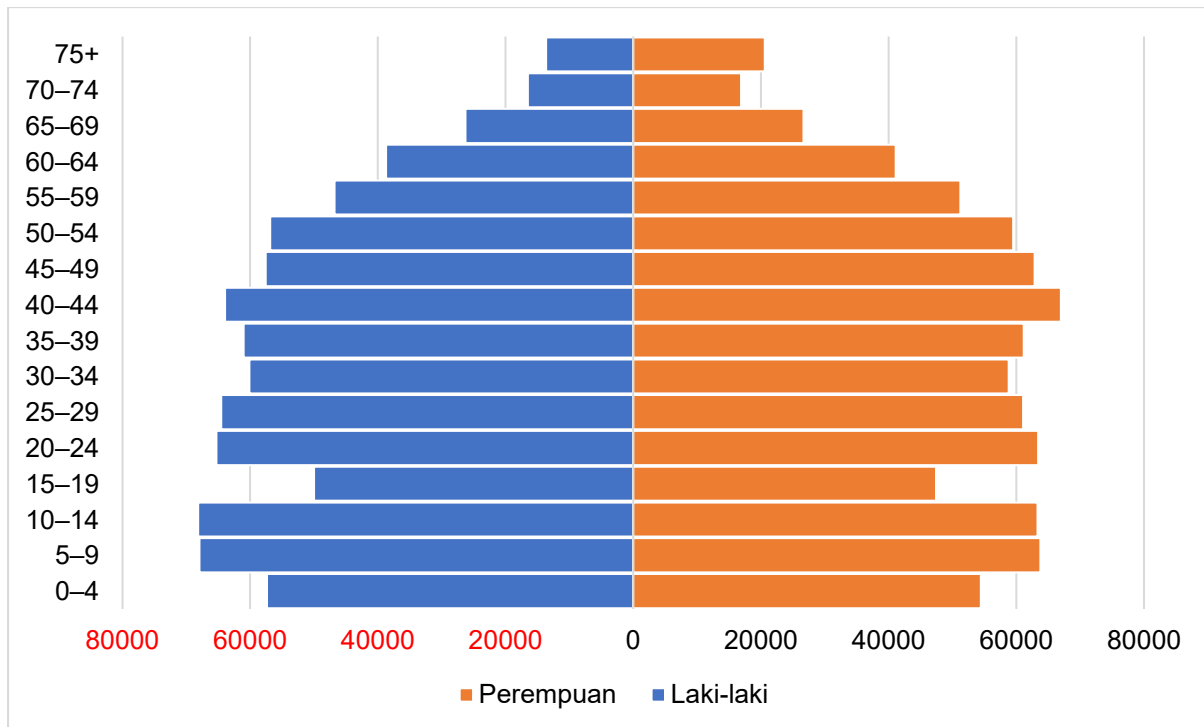
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 1.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.

2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/ km^2 , angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/ km^2 . Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya

seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara

jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini

mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 1.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)*

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai 30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 1.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/ belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat				
	SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat				
	SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 1.13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24
5	Tamat SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024,

struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghucu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 1.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan

infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.

2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan

setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini

memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (*young dependency ratio*).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (*aging population*). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 1.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

1.8. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

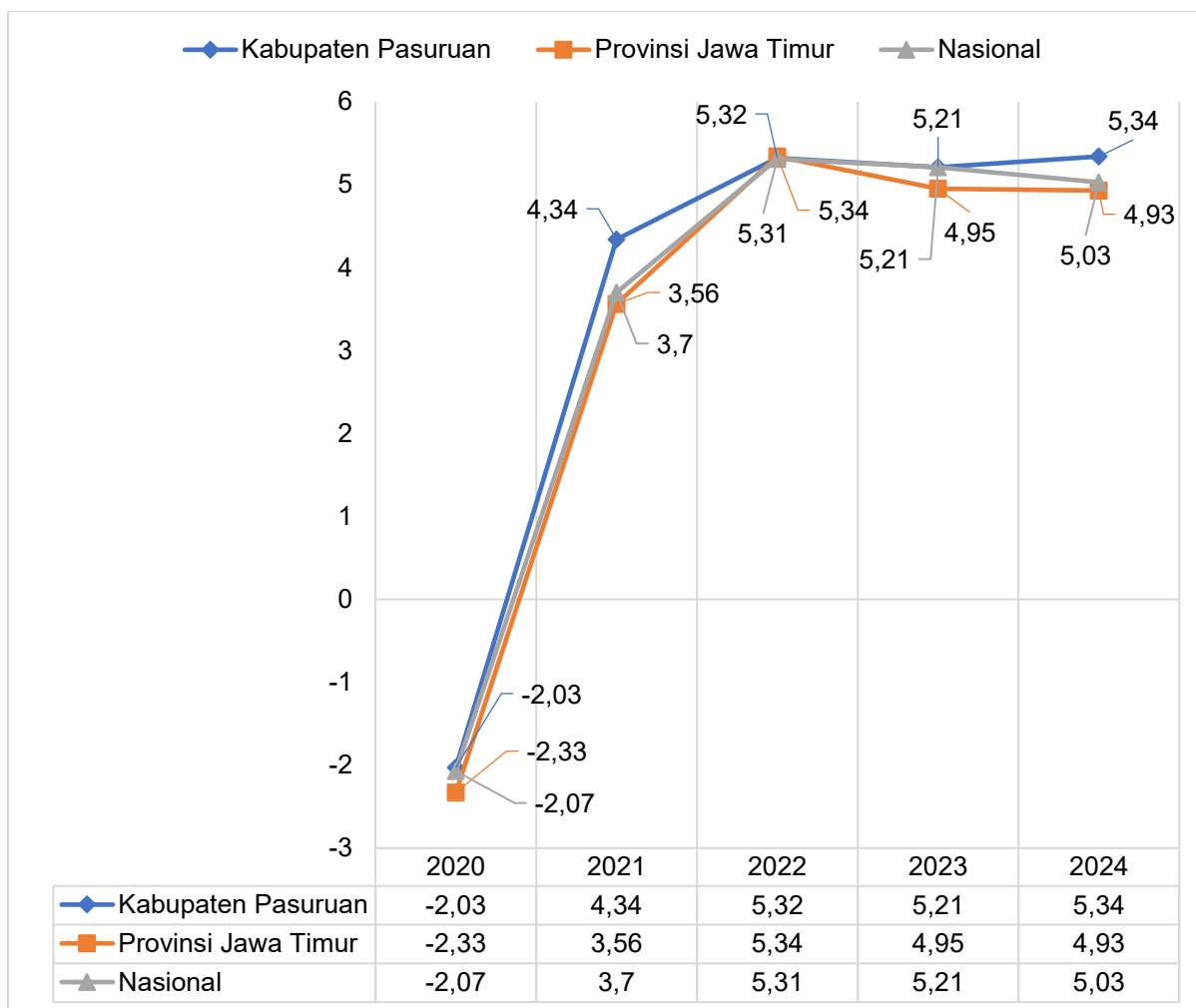
Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak

cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 1.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

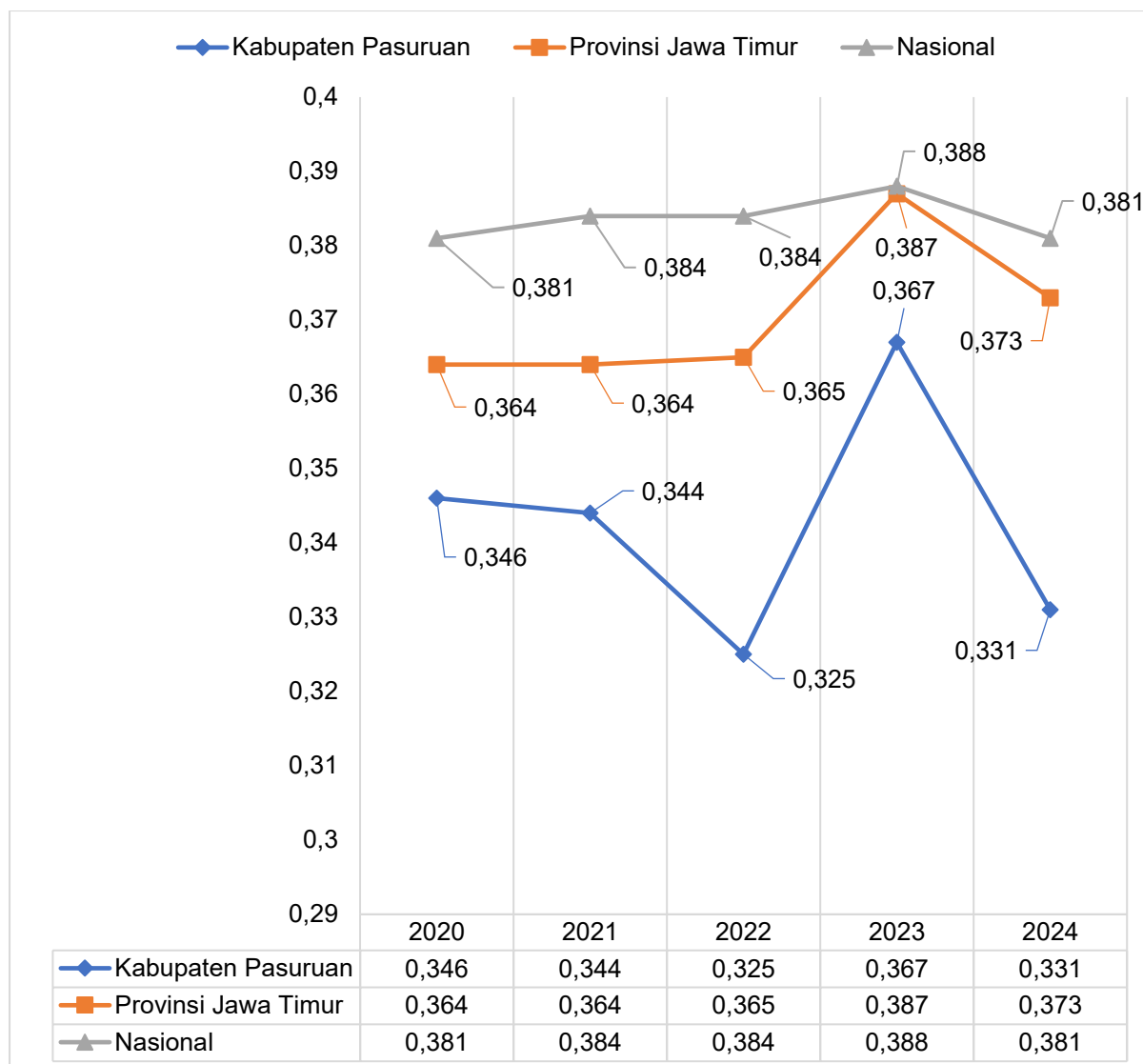
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk

hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

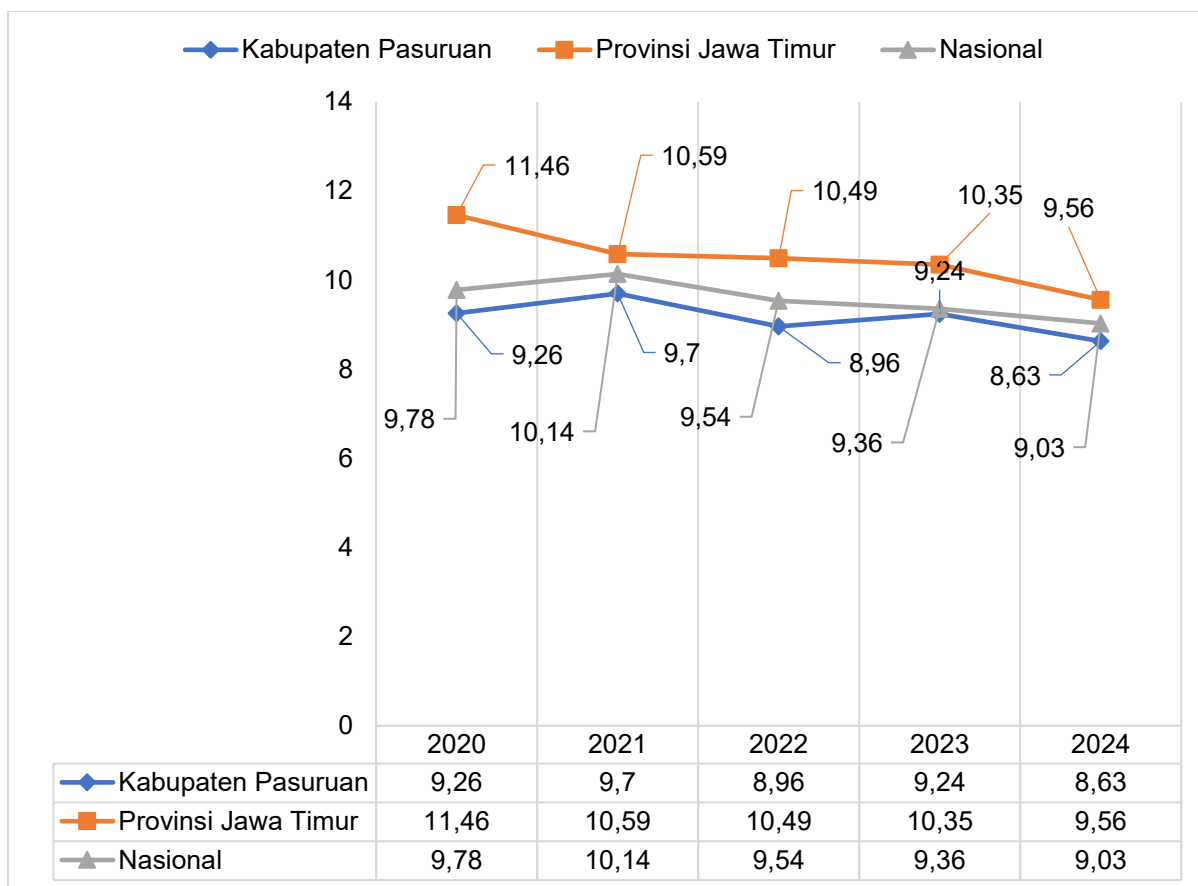
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 1.16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 1.18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

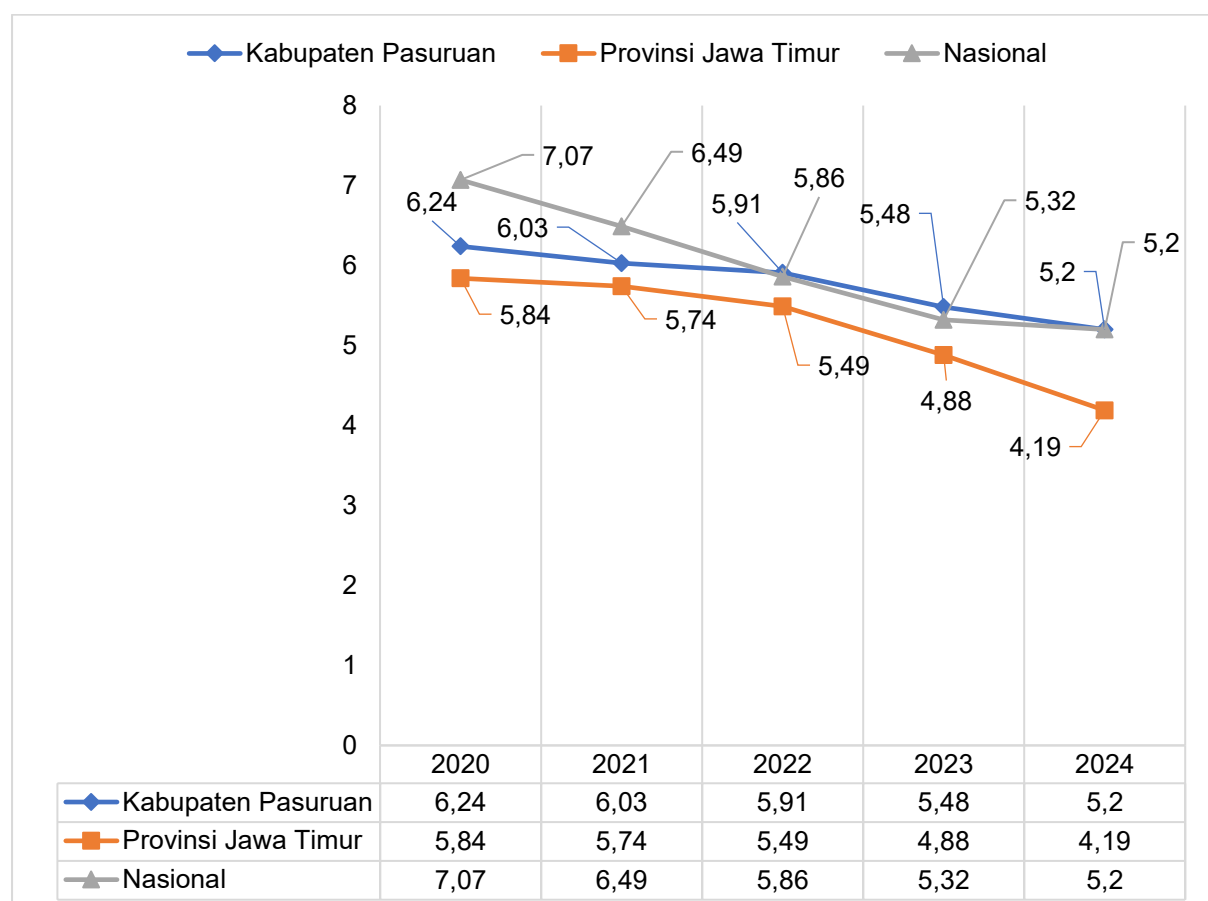
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 1.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 1.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" ($IPM \geq 70$) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 1.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78

Uraian	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

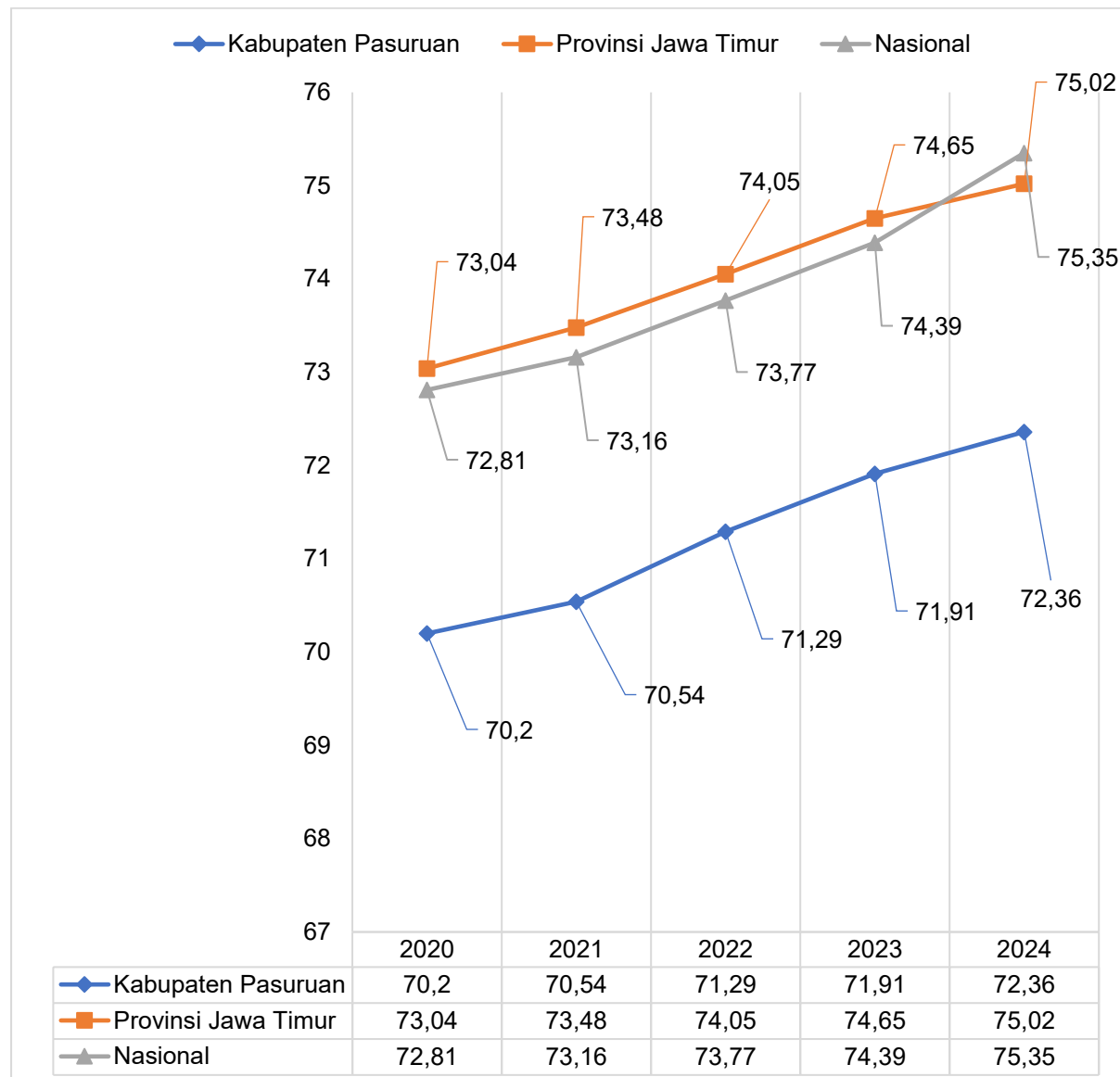
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif

ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



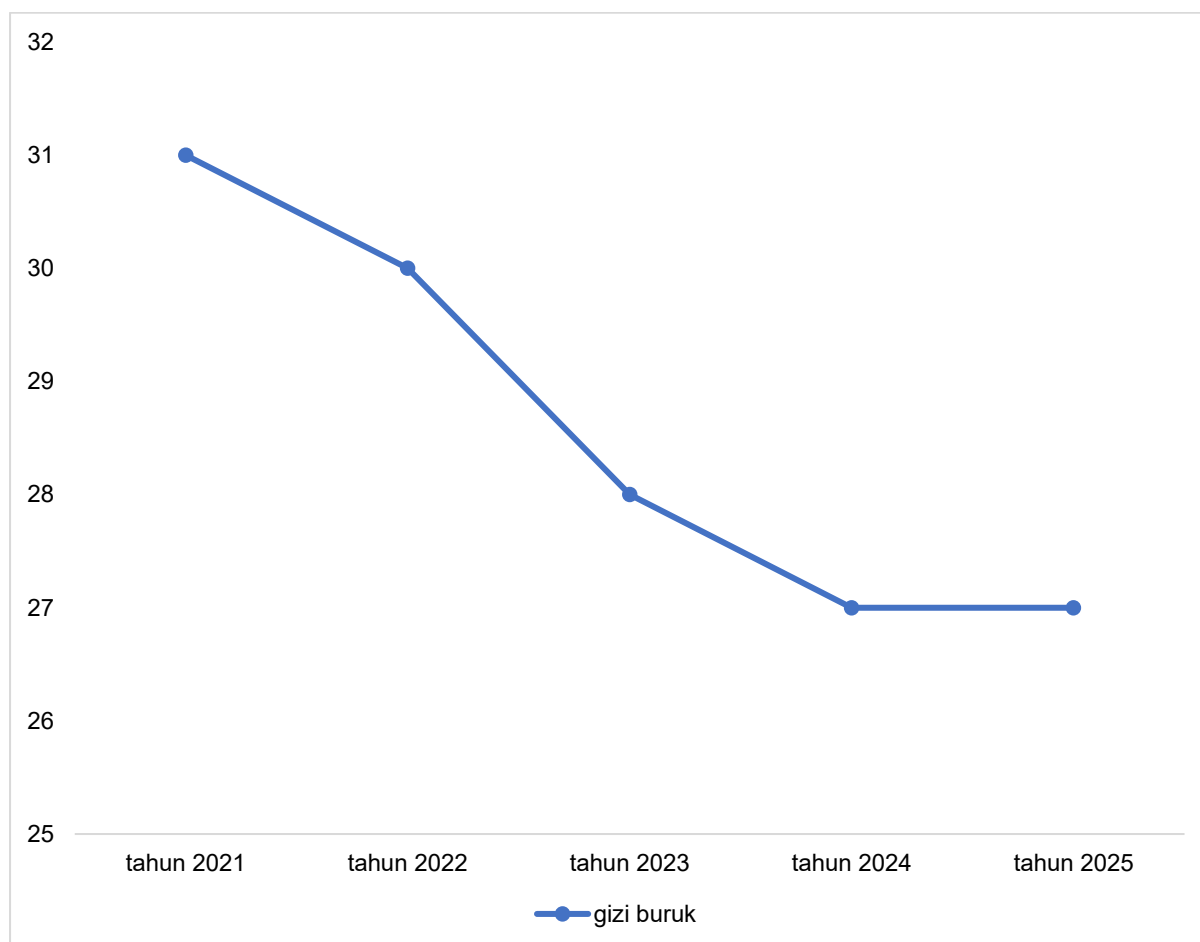
Gambar 1.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

1.9. Data Dinas Kesehatan P2KB Tahun 2025

A. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Pemantauan status gizi balita merupakan indikator vital dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan daerah, khususnya dalam kerangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Data yang disajikan berikut ini memotret prevalensi kasus gizi buruk dengan gejala klinis di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun (2021-2025). Penentuan status gizi buruk ini didasarkan pada standar antropometri yang ketat, yakni indikator Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), serta adanya tanda klinis spesifik berupa edema dan/atau Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 11,5 cm disertai gejala klinis. Visualisasi tren perkembangan kasus tersebut dapat dicermati pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.19 Grafik Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan data runtun waktu (*time series*) di atas, dinamika penanganan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Fase Penurunan Bertahap (2021-2024): Upaya intervensi kesehatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dampak positif pada periode awal hingga pertengahan.
 - a. Pada tahun 2021, tercatat angka dasar (*baseline*) sebanyak 31 kasus balita gizi buruk dengan gejala klinis.
 - b. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan marginal sebesar 1 digit angka menjadi 30 kasus.
 - c. Akselerasi penurunan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana kasus berhasil ditekan hingga angka 28 kasus (penurunan 2 poin dari tahun sebelumnya).
 - d. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian penurunan menjadi 27 kasus.

Secara kumulatif, dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, telah terjadi reduksi beban kasus sebesar 4 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa program perbaikan gizi dan penanganan klinis yang berjalan memiliki efektivitas dalam mereduksi prevalensi kasus secara bertahap.

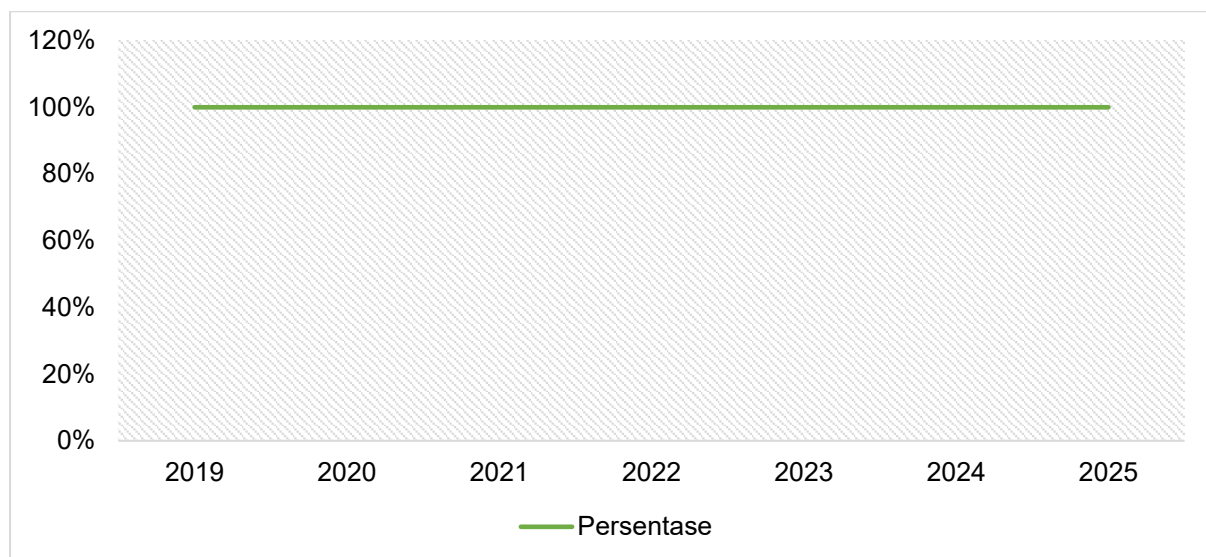
2. Fase Stagnasi (2024-2025): Analisis data pada periode akhir menunjukkan fenomena *leveling off* atau pendataran kurva. Pada tahun 2025, jumlah balita gizi buruk tercatat tetap pada angka 27 kasus, sama persis dengan capaian tahun 2024. Kondisi statis ini mengisyaratkan adanya tantangan resisten yang dihadapi dalam upaya eliminasi kasus lebih lanjut. Angka 27 kasus tampaknya menjadi titik jenuh (*plateau*) yang belum berhasil ditembus oleh intervensi program yang ada saat ini.

Meskipun secara garis besar grafik menunjukkan tren penurunan (*downward trend*) dari 31 kasus (2021) menjadi 27 kasus (2025), stagnasi yang terjadi dalam dua tahun terakhir menuntut perhatian khusus. Fenomena ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi penanganan kasus di lapangan, mengingat

penurunan kasus tidak lagi bergerak linier di akhir periode perencanaan. Stabilitas angka di 27 kasus pada tahun 2025 menjadi sinyal perlunya inovasi atau intensifikasi program GERMAS yang lebih spesifik untuk menuntaskan sisa kasus yang persisten tersebut.

B. Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025 di Kabupaten Pasuruan

Keberhasilan pembangunan kesehatan di tingkat tapak sangat bergantung pada kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat desa, yang dalam indikator kinerja daerah diukur melalui persentase Desa Siaga Aktif. Berdasarkan data pemantauan jangka panjang yang tervisualisasi dalam grafik, kinerja pengembangan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2025 menunjukkan fenomena stabilitas capaian yang sangat positif. Sepanjang kurun waktu tujuh tahun tersebut, grafik menunjukkan garis lurus horizontal pada level puncak, yang mengindikasikan bahwa persentase Desa Siaga Aktif bertahan secara konsisten pada angka mutlak 100% setiap tahunnya. Angka persentase sempurna ini merepresentasikan cakupan semesta (*universal coverage*), di mana secara riil terdapat 365 desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang telah berada di bawah pembinaan intensif Puskesmas dan Dinas Kesehatan, dan seluruhnya berhasil memenuhi kriteria kualifikasi sebagai Desa Siaga Aktif tanpa terkecuali.



Gambar 1.20 Grafik Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

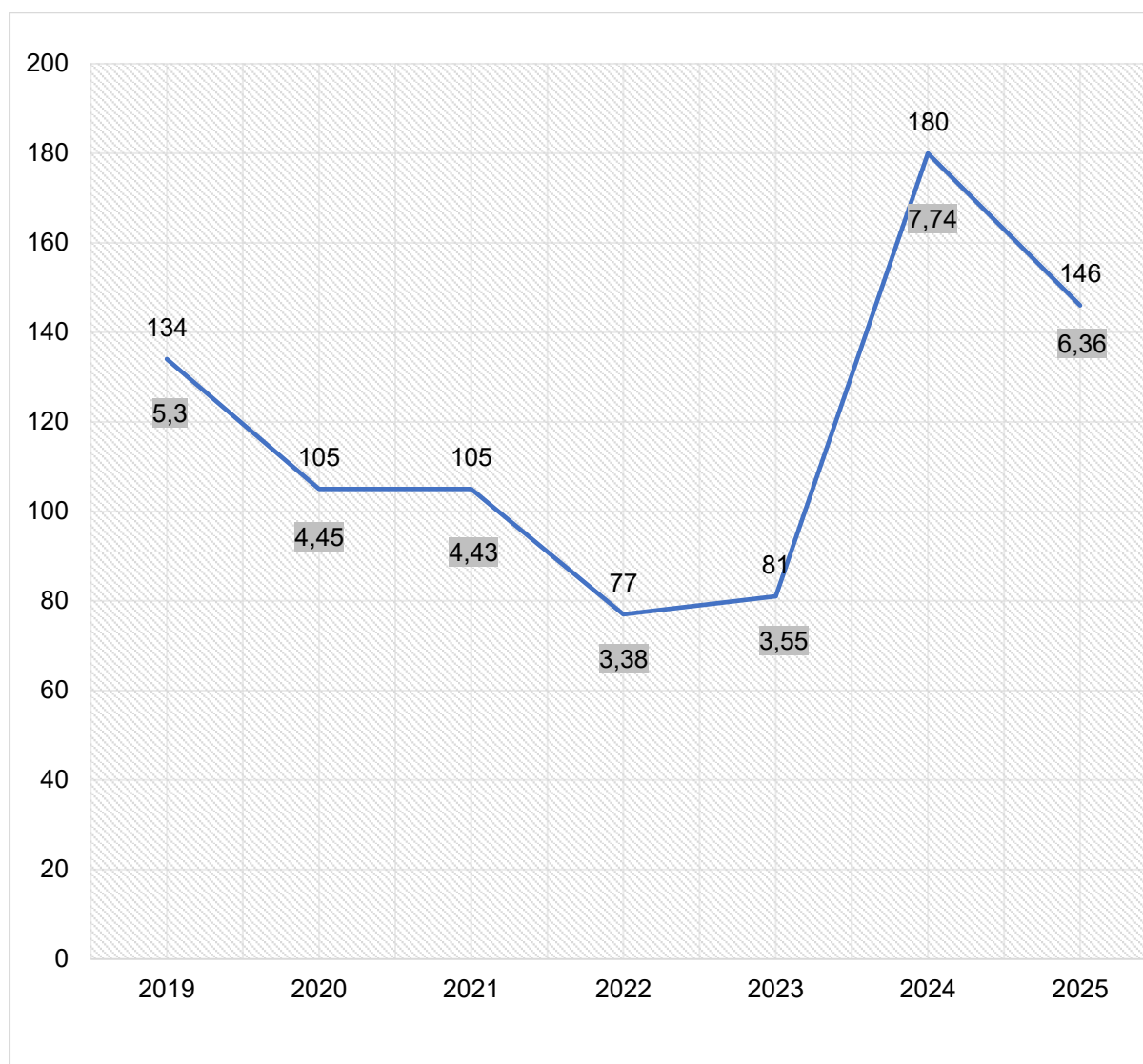
Konsistensi capaian kinerja 100% yang terpelihara selama tujuh tahun berturut-turut ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil derivasi langsung dari implementasi kebijakan strategis melalui program "Desa Siaga Gemerlap Bersama" atau Gerakan Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat. Program ini telah dilembagakan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun, yang dirancang secara spesifik dengan tujuan utama untuk meningkatkan cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkatan rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Rutinitas pelaksanaan program ini menjadi kunci utama dalam menjaga ritme kewaspadaan dan partisipasi masyarakat desa, sehingga status keaktifan desa tidak mengalami degradasi meskipun dihadapkan pada dinamika perubahan tahunan.

Lebih jauh lagi, efektivitas program Desa Siaga Gemerlap Bersama dalam mempertahankan status 100% desa siaga aktif didorong oleh dua mekanisme operasional utama di lapangan, yaitu kegiatan *Survey Mawas Diri* (SMD) dan *Musyawarah Masyarakat Desa* (MMD). Kegiatan SMD memungkinkan masyarakat melakukan pengumpulan data dasar kesehatan secara mandiri untuk memetakan masalah di lingkungannya, yang kemudian ditindaklanjuti melalui forum MMD sebagai wadah deliberatif untuk menyepakati solusi bersama. Berdasarkan evaluasi di lapangan, rangkaian kegiatan SMD dan MMD tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan berkolerasi positif terhadap tingkat perkembangan desa/kelurahan siaga aktif di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap pelaksanaan siklus pemecahan masalah melalui SMD dan MMD inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi 365 desa di Kabupaten Pasuruan untuk terus mempertahankan predikat sebagai Desa Siaga Aktif secara berkelanjutan hingga tahun 2025.

C. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2025

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator sensitif yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan obstetri, serta kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data deret waktu (*time series*) yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2025, profil kematian bayi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola fluktuasi yang sangat dinamis dengan variabilitas yang signifikan antar tahun. Jika

ditinjau dari periode awal pengamatan, Kabupaten Pasuruan sebenarnya sempat menunjukkan tren kinerja positif berupa penurunan kasus kematian bayi secara bertahap. Pada tahun 2019, tercatat jumlah kematian bayi sebesar 134 kasus (dengan angka laju/rate 5,3), yang kemudian berhasil ditekan menjadi 105 kasus pada tahun 2020 dan bertahan pada angka absolut yang sama di tahun 2021, namun dengan sedikit penurunan laju angka menjadi 4,43. Tren penurunan ini mencapai titik kinerja terbaiknya (*lowest point*) pada tahun 2022, di mana jumlah kematian bayi turun drastis menjadi 77 kasus dengan angka laju 3,38. Periode 2020 hingga 2022 ini merepresentasikan fase keberhasilan pengendalian faktor risiko kematian bayi yang cukup efektif.



Gambar 1.21 Grafik Tren Kematian Bayi 2019-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Namun demikian, dinamika yang mengkhawatirkan mulai terdeteksi pasca tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan kasus menjadi 81 kematian, yang ternyata menjadi sinyal awal dari lonjakan kasus yang sangat ekstrem pada tahun berikutnya. Tahun 2024 menjadi tahun dengan catatan kinerja yang memerlukan evaluasi menyeluruh, di mana angka kematian bayi melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan titik terendahnya, mencapai angka absolut 180 kasus dengan laju kematian sebesar 7,74. Meskipun pada tahun 2025 telah terjadi upaya pemulihan yang berhasil menurunkan kembali angka tersebut menjadi 146 kasus (laju 6,36), posisi angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode awal tahun 2019. Ketidakstabilan grafik ini mengindikasikan adanya gangguan sistemik atau faktor eksternal yang mempengaruhi ketahanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pasuruan pada rentang waktu 2023-2024.

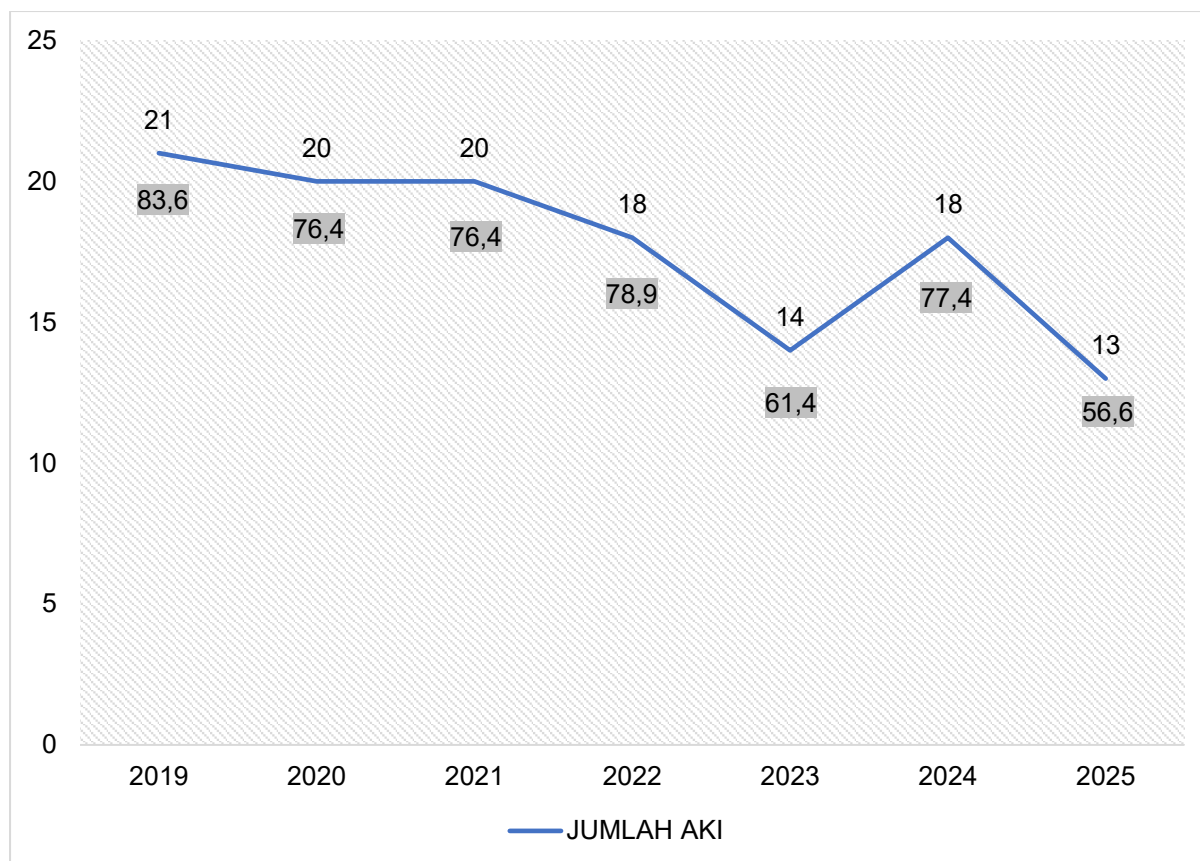
Untuk memahami akar permasalahan dari tingginya angka kematian tersebut, perlu dilakukan bedah data terhadap determinan penyebab kematian, khususnya pada fase neonatal yang seringkali menjadi penyumbang terbesar. Berdasarkan Analisis Kematian Bayi (MPDN Tahun 2025), struktur penyebab kematian didominasi oleh gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular. Sebanyak 42,46% dari total kematian neonatal disebabkan oleh *Respiratory and Cardiovascular Disorders*, dengan rincian kasus spesifik tertinggi adalah *Respiratory distress of newborn* sebanyak 42 kasus, diikuti oleh *Neonatal aspiration syndromes* (4 kasus), kondisi pernapasan lainnya (11 kasus), dan gangguan kardiovaskular (2 kasus). Tingginya angka gangguan pernapasan ini mengisyaratkan urgensi peningkatan kualitas penanganan bayi baru lahir (neonatus), terutama dalam manajemen asfiksia dan perawatan intensif.

Selain faktor respirasi, kontributor kematian terbesar kedua adalah faktor infeksi (*Infection*) yang menyumbang angka sebesar 22,60% dari total kematian neonatal. Hal ini disusul oleh faktor Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas (*Low birth weight and prematurity*) sebesar 17,12%, serta faktor lain-lain seperti malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom yang memiliki proporsi sebesar 17,80%. Komposisi penyebab kematian ini menegaskan bahwa intervensi kesehatan tidak bisa hanya berfokus pada saat persalinan, melainkan harus diperkuat pada fase antenatal (pemeriksaan kehamilan) untuk mencegah BBLR dan

prematuritas, serta peningkatan sterilitas dan pencegahan infeksi pada fase pasca-salin. Tingginya kasus *Respiratory distress* dan BBLR menjadi catatan kritis bagi Dinas Kesehatan untuk memperkuat kompetensi tenaga medis dan kelengkapan fasilitas NICU/Perinatologi di seluruh jaringan pelayanan kesehatan Kabupaten Pasuruan guna menekan angka kematian kembali ke tren penurunan seperti tahun 2022.

D. Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2025

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan ibu, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan data pemantauan longitudinal yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya dinamika penurunan kasus yang cukup fluktuatif namun berujung pada capaian kinerja yang positif di akhir periode perencanaan. Pada tahun 2019, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 21 kasus dengan rasio kematian sebesar 83,6. Angka ini kemudian mengalami penurunan perlahan pada tahun 2020 dan 2021, di mana jumlah kasus bertahan stabil pada angka 20 kematian dengan rasio yang juga stagnan di angka 76,4. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, upaya intervensi kesehatan mampu menahan laju kematian namun belum cukup masif untuk menurunkannya secara drastis.



Gambar 1.22 Grafik Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Perkembangan selanjutnya menunjukkan pola yang menarik pada tahun 2022, di mana secara absolut jumlah kematian turun menjadi 18 kasus, namun rasio kematian justru mengalami sedikit kenaikan menjadi 78,9, yang kemungkinan dipengaruhi oleh variabel jumlah kelahiran hidup sebagai penyebut. Tren perbaikan yang signifikan baru terlihat jelas pada tahun 2023, di mana kasus kematian berhasil ditekan hingga angka 14 kasus dengan rasio 61,4. Sayangnya, capaian gemilang ini sempat terganggu oleh lonjakan kasus (*rebound*) pada tahun 2024, di mana angka kematian kembali naik menjadi 18 kasus (rasio 77,4), menyamai angka kasus tahun 2022. Namun demikian, evaluasi dan respons cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terbukti efektif, karena pada tahun 2025, Angka Kematian Ibu berhasil diturunkan secara tajam mencapai titik terendah sepanjang sejarah pengamatan, yakni hanya 13 kasus dengan rasio 56,6. Penurunan drastis di tahun 2025 ini menjadi bukti keberhasilan pemulihan kinerja pelayanan kesehatan ibu pasca-fluktuasi tahun sebelumnya.

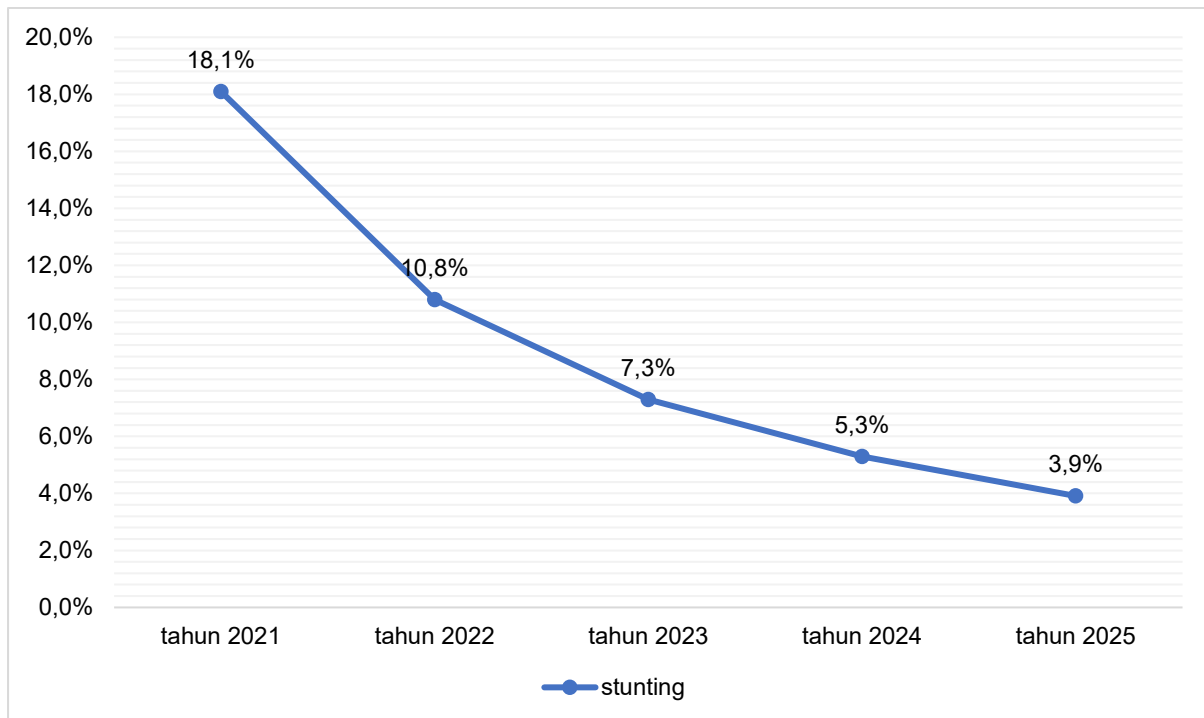
Untuk mempertahankan tren positif ini dan mencegah terulangnya lonjakan kasus, pemahaman mendalam mengenai etiologi atau penyebab kematian menjadi sangat krusial. Berdasarkan data *Laporan MPDN Tahun 2025*, struktur penyebab kematian ibu di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh faktor risiko medis yang spesifik. Penyebab utama kematian ibu terbesar, yang menyumbang hampir separuh dari total kasus atau sebesar 46,15%, adalah Hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Secara rinci, kasus hipertensi ini bermanifestasi dalam bentuk *Eklamsi* (3 kasus), hipertensi gestasional dengan proteinuria signifikan (2 kasus), dan hipertensi gestasional tanpa proteinuria signifikan (1 kasus). Dominasi penyebab ini menegaskan bahwa pre-eklamsia dan eklamsia masih menjadi "pembunuh utama" yang memerlukan deteksi dini lebih ketat melalui pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) yang berkualitas.

Selain faktor hipertensi, kontributor kematian terbesar kedua adalah Komplikasi Non-Obstetrik yang mencapai proporsi 38,46%. Kategori ini mencakup penyakit penyerta yang diderita ibu namun memperberat kondisi kehamilan, seperti penyakit jantung atau diabetes, di mana tercatat 5 kasus spesifik sebagai penyakit maternal lain yang memperumit kehamilan dan persalinan. Sementara itu, penyebab obstetri klasik lainnya memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, yakni Perdarahan Intrapartum sebesar 7,69% dan Komplikasi Obstetrik Lain yang juga sebesar 7,69%. Rendahnya angka kematian akibat perdarahan menunjukkan bahwa manajemen kegawatdaruratan persalinan di fasilitas kesehatan sudah cukup baik, sehingga fokus intervensi ke depan harus bergeser pada penguatan skrining penyakit tidak menular dan manajemen hipertensi sejak masa kehamilan dini.

E. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Penanganan *stunting* (gagal tumbuh) pada balita menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan nasional dan daerah, mengingat dampaknya yang jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Pasuruan, efektivitas intervensi penanggulangan *stunting* dapat diukur melalui indikator prevalensi balita stunting yang dipantau secara ketat setiap tahunnya. Berdasarkan data pengukuran antropometri yang dilakukan melalui mekanisme Bulan Timbang Agustus, tren prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan kinerja penurunan yang sangat signifikan dan konsisten. Penentuan

status stunting dalam data ini didasarkan pada standar indikator Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), di mana prevalensi dihitung dari proporsi jumlah balita dengan status "pendek" dan "sangat pendek" terhadap total populasi balita yang diukur.



Gambar 1.23 Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

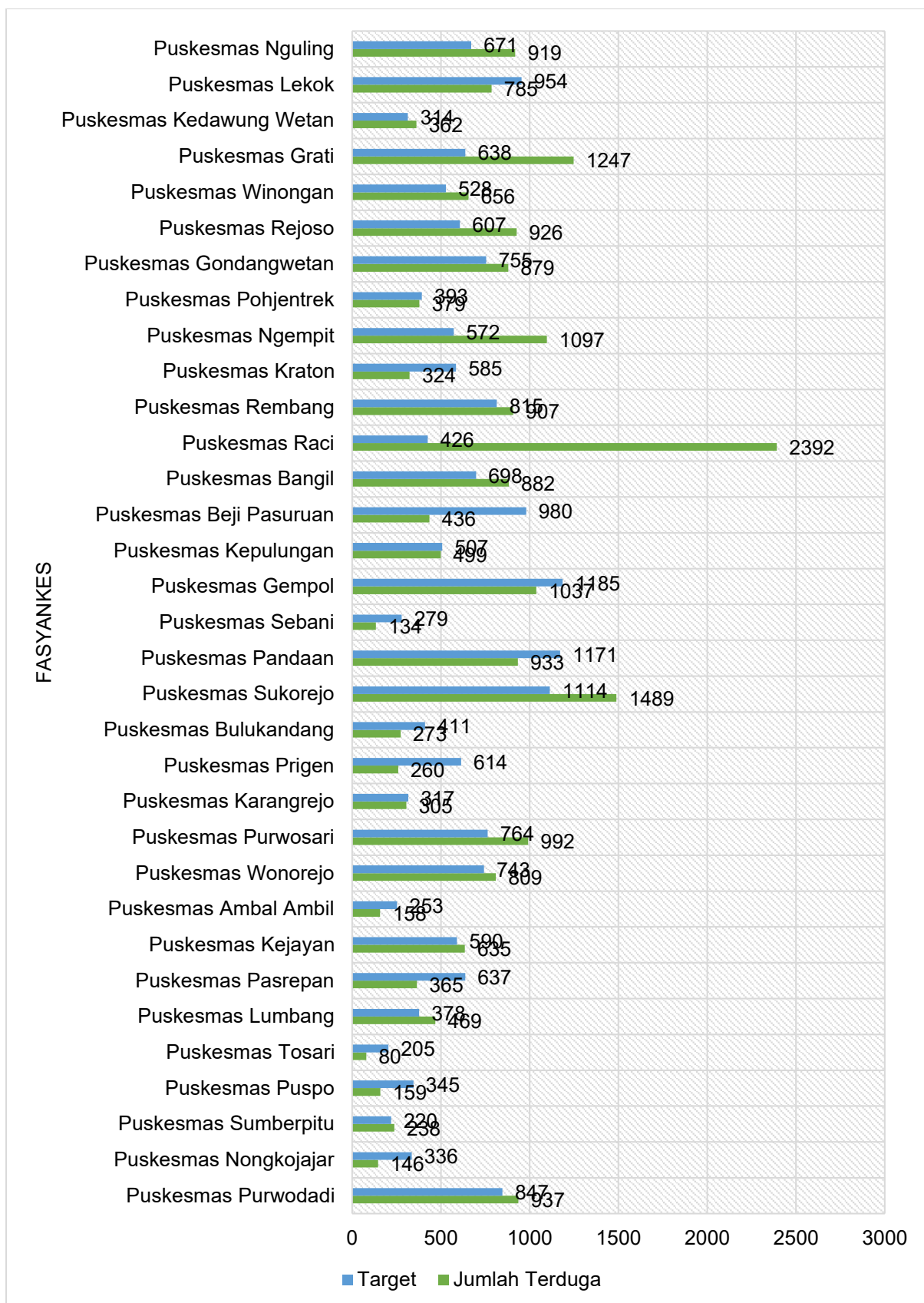
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap data deret waktu (*time series*) memperlihatkan akselerasi penurunan angka stunting yang berjalan secara progresif. Pada tahun awal pengamatan yakni 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan tercatat berada pada angka 18,1%. Angka ini kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 10,8%, yang berarti terjadi reduksi prevalensi sebesar 7,3 poin persen hanya dalam kurun waktu satu tahun. Penurunan tajam di awal periode ini mengindikasikan keberhasilan implementasi strategi konvergensi stunting yang melibatkan intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (non-kesehatan) secara masif di seluruh wilayah desa dan kecamatan. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana angka prevalensi kembali turun menjadi 7,3%, menembus angka psikologis satu digit.

Konsistensi perbaikan status gizi balita semakin terlihat pada periode akhir perencanaan. Memasuki tahun 2024, prevalensi stunting berhasil ditekan lebih lanjut menjadi 5,3%, dan puncaknya pada tahun 2025, angka prevalensi mencapai titik terendah sebesar 3,9%. Jika dikalkulasi secara kumulatif dari tahun 2021 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 14,2 poin persen. Capaian angka 3,9% di tahun 2025 ini merupakan prestasi yang luar biasa, mengingat angka tersebut jauh melampaui target nasional yang umumnya menetapkan batas toleransi prevalensi stunting di angka 14%. Keberhasilan menurunkan angka stunting secara bertahap dari tahun ke tahun tanpa adanya fluktuasi kenaikan menegaskan bahwa sistem surveilans gizi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi pola asuh yang dijalankan melalui Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya telah berjalan dengan sangat efektif dan tepat sasaran. Data yang bersumber dari pengukuran riil di Bulan Timbang setiap bulan Agustus ini menjadi bukti valid bahwa ancaman *lost generation* akibat stunting di Kabupaten Pasuruan telah berhasil diminimalisir secara sistematis.

F. Kasus TBC di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Eliminasi Tuberkulosis (TBC) menuntut strategi jemput bola yang agresif, di mana keberhasilan program tidak hanya diukur dari kesembuhan pasien, melainkan dari seberapa masif upaya tenaga kesehatan dalam menemukan terduga (*suspect*) di tengah masyarakat melalui strategi *Active Case Finding*. Evaluasi kinerja penanggulangan TBC di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025, khususnya pada indikator pelayanan kesehatan bagi orang terduga TBC, menunjukkan performa agregat yang sangat memuaskan dan melampaui ekspektasi perencanaan daerah. Berdasarkan rekapitulasi data kinerja tahunan, Kabupaten Pasuruan berhasil mencatatkan surplus capaian dengan persentase realisasi sebesar 112%. Angka persentase ini diterjemahkan dari data absolut yang menunjukkan bahwa jajaran kesehatan berhasil menjangkau dan melayani sebanyak 22.109 orang terduga TBC, jumlah yang jauh melampaui target sasaran yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 19.850 orang. Capaian "hijau" di level kabupaten ini mengindikasikan bahwa secara umum, sensitivitas sistem surveilans kesehatan daerah telah berjalan optimal dalam mendeteksi potensi penularan di masyarakat.



Gambar 1.24 Grafik Penemuan Terduga TBC per Puskesmas 2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Namun demikian, apabila data agregat tersebut dibedah lebih dalam menjadi analisis granular per fasilitas pelayanan kesehatan, terlihat adanya fenomena disparitas atau ketimpangan kinerja yang cukup tajam antar-unit kerja. Dari total 33 Puskesmas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, hanya terdapat 17 Puskesmas atau setara dengan 52% dari total fasilitas yang berhasil memenuhi atau melampaui target penemuan terduga (capaian $\geq 100\%$). Sebaliknya, terdapat 16 Puskesmas lainnya yang kinerjanya masih berada di bawah target ($\leq 100\%$), yang menandakan bahwa hampir separuh dari ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah ini masih menghadapi kendala dalam optimalisasi penjangkaran kasus. Kondisi ini menyiratkan bahwa capaian prestasi 112% tingkat kabupaten sesungguhnya "disubsidi" oleh kinerja luar biasa dari beberapa Puskesmas tertentu yang mampu menjangkarkan kasus jauh di atas beban target mereka, sehingga menutupi kekurangan angka dari Puskesmas yang *underperform*.

Analisis spesifik terhadap data per Puskesmas memperlihatkan beberapa anomali positif yang menjadi pilar utama keberhasilan daerah. Puskesmas Raci mencatatkan kinerja yang paling fenomenal, di mana dengan target yang relatif kecil sebesar 426 sasaran, mampu melakukan penemuan hingga 2.392 terduga, sebuah lonjakan kinerja yang berlipat ganda dari standar. Kinerja impresif serupa juga ditunjukkan oleh Puskesmas Grati yang merealisasikan 1.247 terduga dari target 638, serta Puskesmas Ngempit yang menjangkarkan 1.097 terduga dari target 572. Di sisi lain, beberapa Puskesmas dengan target sasaran yang cukup besar justru mengalami kesulitan signifikan dalam pemenuhan target. Sebagai contoh, Puskesmas Beji Pasuruan memiliki beban target tinggi sebesar 980 sasaran, namun hanya mampu merealisasikan penemuan sebanyak 436 terduga. Demikian pula dengan Puskesmas Prigen yang hanya mencapai 260 terduga dari target 614, serta Puskesmas Bulukandang yang mencatatkan 273 terduga dari target 411.

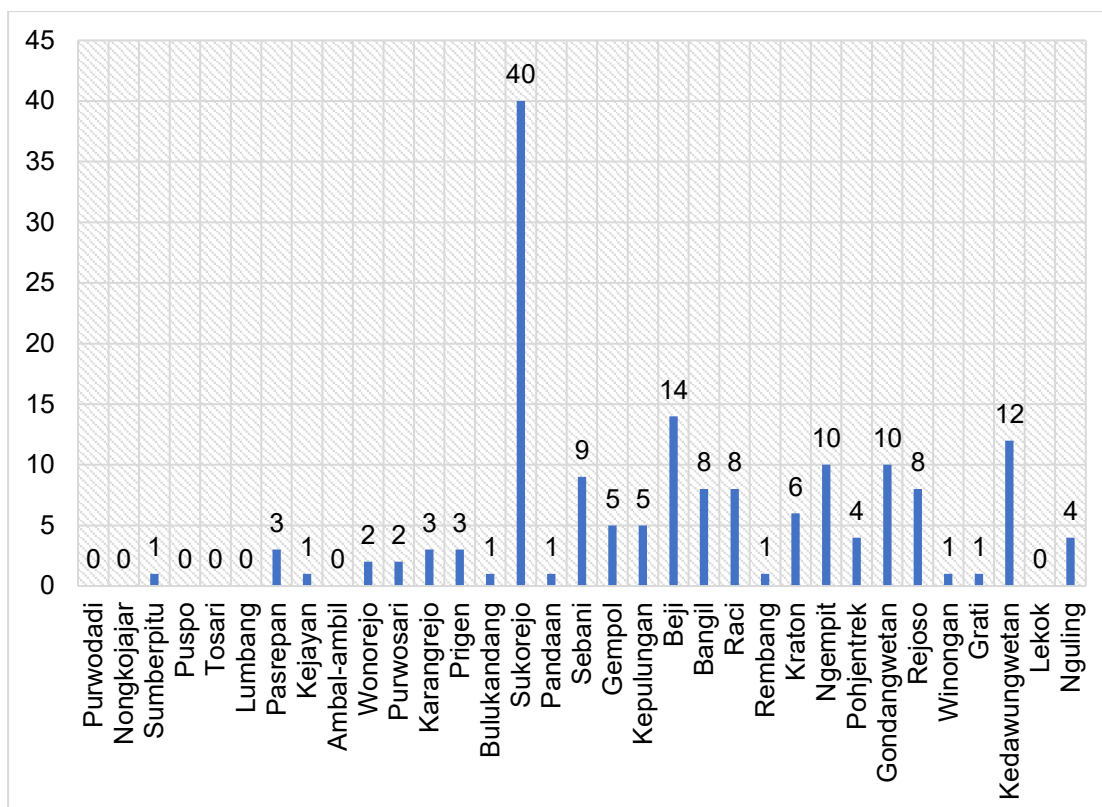
Ketimpangan distribusi kinerja penemuan kasus ini menjadi catatan evaluasi strategis bagi Dinas Kesehatan untuk periode selanjutnya. Meskipun angka kumulatif kabupaten telah aman, keberadaan 16 Puskesmas yang belum mencapai target mengindikasikan adanya kantong-kantong wilayah yang mungkin belum tersentuh skrining secara maksimal, yang berpotensi menjadi reservoir penularan TBC yang tersembunyi (*silent transmission*). Oleh karena itu, fokus intervensi ke depan tidak lagi

sekadar mengejar angka total kabupaten, melainkan melakukan pendampingan intensif, revitalisasi kader, serta penguatan manajemen program secara spesifik pada 16 Puskesmas yang masih berstatus merah tersebut. Pemerataan intensitas skrining di seluruh kecamatan menjadi kunci mutlak agar standar pelayanan minimal TBC dapat dinikmati secara setara oleh seluruh penduduk Kabupaten Pasuruan, tanpa bergantung pada lokasi domisili atau wilayah kerja Puskesmas tertentu.

G. Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

1. Analisis Sebaran Kasus DBD Tahun 2021

Sebagai titik awal pengamatan dalam periode lima tahunan, peta sebaran kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 menunjukkan karakteristik epidemiologi yang sangat spesifik, di mana transmisi penyakit belum menyebar secara merata melainkan terkonsentrasi pada titik-titik endemik tertentu. Berdasarkan data rekapitulasi laporan bulanan dari seluruh fasilitas kesehatan, terlihat adanya disparitas atau ketimpangan beban kasus yang sangat tajam antar-wilayah kerja Puskesmas. Secara visual, ketimpangan ini terlihat dari grafik batang yang didominasi oleh satu wilayah tertentu yang menjulang tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang cenderung landai, mengindikasikan adanya kluster penularan aktif yang terlokalisir.



Gambar 1.25 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis mendalam terhadap grafik di atas menempatkan Puskesmas Sukorejo sebagai episentrum utama penyebaran penyakit pada tahun 2021. Wilayah ini mencatatkan angka kejadian tertinggi dengan total 40 kasus, sebuah angka yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain yang mayoritas hanya mencatatkan angka kejadian di bawah 10 kasus. Dominasi kasus di Sukorejo ini menjadi sinyal awal bahwa wilayah tersebut memiliki faktor risiko lingkungan yang persisten, baik dari sisi kepadatan hunian maupun keberadaan tempat perindukan nyamuk *Aedes aegypti* yang belum tertangani secara tuntas. Selain Sukorejo, beberapa wilayah penyangga di dataran rendah juga mulai menunjukkan kerawanan dengan status waspada, antara lain Puskesmas Beji dengan 14 kasus, Puskesmas Lekok dengan 12 kasus, serta Puskesmas Ngempit dan Puskesmas Gondangwetan yang masing-masing mencatatkan 10 kasus. Kelompok wilayah ini membentuk pola sabuk kerawanan menengah yang memerlukan intensifikasi pemantauan jentik berkala.

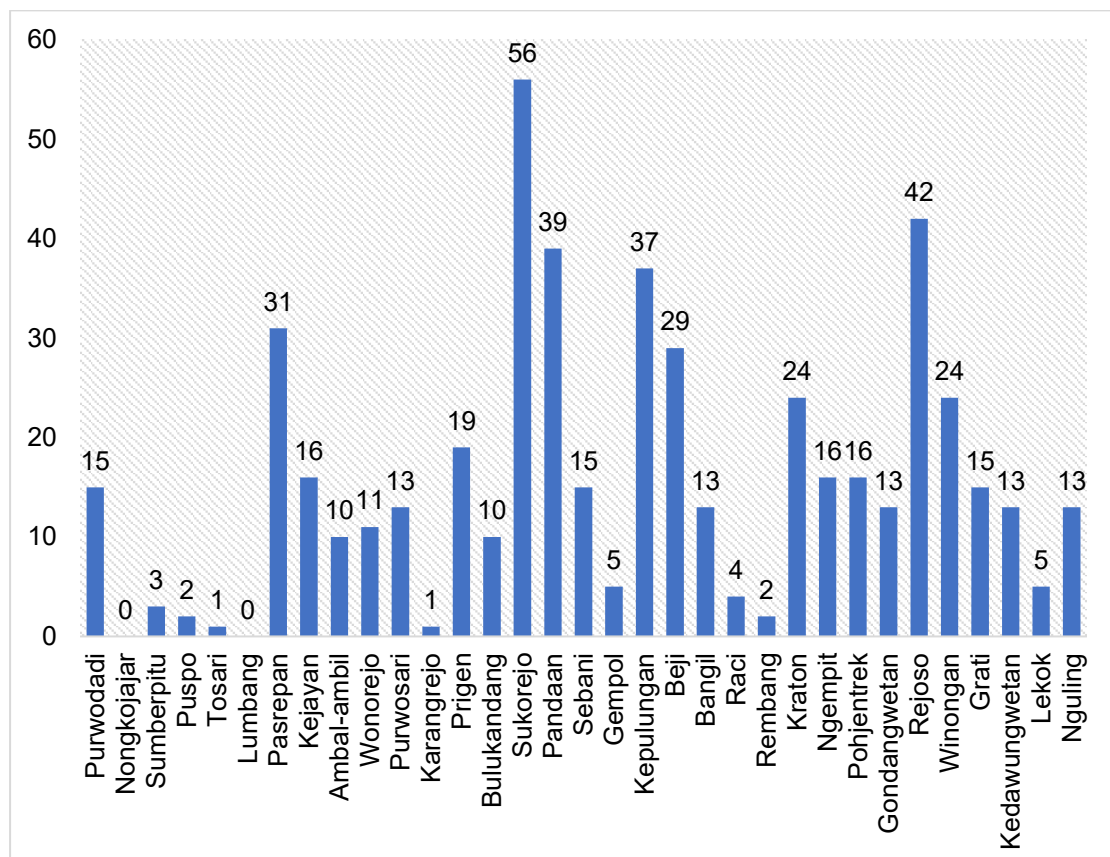
Di sisi lain, faktor geografis dan topografi wilayah terbukti memberikan pengaruh protektif yang signifikan terhadap penyebaran vektor. Hal ini terlihat jelas dari data nol kasus (*zero cases*) yang secara konsisten terjadi di wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Kecamatan seperti Purwodadi, Nongkojajar, Puspo, Tosari, dan Lumbang tidak mencatatkan adanya kasus positif DBD sepanjang tahun 2021. Rendahnya suhu lingkungan di wilayah ketinggian ini kemungkinan besar menghambat siklus hidup dan reproduksi nyamuk vektor, sehingga transmisi lokal tidak terjadi secara efektif. Data ini mengonfirmasi bahwa intervensi pengendalian DBD di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 memang lebih diprioritaskan pada wilayah dataran rendah yang padat penduduk.

Meskipun secara kuantitas jumlah kasus di sebagian besar wilayah tampak terkendali, indikator fatalitas tetap menjadi catatan kritis yang tidak boleh diabaikan. Pada tahun 2021, tercatat terjadi 4 kasus kematian akibat DBD di Kabupaten Pasuruan. Analisis mortalitas ini memberikan wawasan penting mengenai kualitas deteksi dini dan penanganan klinis. Kematian tercatat terjadi di wilayah kerja Puskesmas Prigen, Puskesmas Sebani, dan Puskesmas Gondangwetan. Khusus untuk wilayah Prigen, adanya kasus kematian perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlah total kasus di wilayah tersebut sangat rendah (hanya 3 kasus), namun satu di antaranya berujung fatal. Hal ini mengindikasikan tingginya *Case Fatality Rate* (CFR) di tingkat lokal yang mungkin disebabkan oleh keterlambatan pasien dalam mengakses layanan kesehatan atau keterlambatan diagnosis dini (*delayed diagnosis*), sehingga pasien datang dalam kondisi sindrom syok dengue (SSD) yang sulit tertangani.

2. Analisis Sebaran Kasus DBD Tahun 2022

Memasuki tahun kedua periode pengamatan, dinamika kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 memperlihatkan tren eskalasi yang cukup mengkhawatirkan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2021 kasus cenderung terkonsentrasi secara lokal, data tahun 2022 mengindikasikan terjadinya proliferasi atau perluasan wilayah sebaran vektor yang signifikan, disertai dengan peningkatan intensitas serangan di daerah endemis lama. Grafik batang menunjukkan

adanya kenaikan elevasi kasus di berbagai Puskesmas, yang menandakan bahwa faktor lingkungan dan curah hujan pada tahun 2022 memberikan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*. Kenaikan angka kesakitan ini menjadi sinyal bahwa upaya pengendalian vektor menghadapi tantangan yang lebih berat seiring dengan perubahan pola musim dan mobilitas penduduk yang mulai pulih pasca-pandemi.



Gambar 1.26 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Dalam peta sebaran kasus tahun 2022, Puskesmas Sukorejo kembali mengukuhkan posisinya sebagai episentrum utama dengan mencatatkan jumlah kasus tertinggi sebanyak 56 kasus. Kenaikan drastis dari 40 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 56 kasus ini menegaskan bahwa Sukorejo merupakan "kantong endemis persisten" yang memiliki kerentanan ekologis tinggi, di mana intervensi rutin tampaknya belum cukup untuk memutus rantai hidup vektor secara permanen. Namun, fenomena baru yang paling mencolok pada tahun ini adalah munculnya Puskesmas Rejoso sebagai *hotspot* baru dengan lonjakan kasus yang sangat tajam mencapai 42 kasus. Kemunculan

Rejoso sebagai penyumbang kasus terbesar kedua mengubah konfigurasi peta kerawanan, mengindikasikan adanya pergeseran atau perluasan transmisi ke wilayah pesisir atau dataran rendah lainnya yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi secara masif. Selain itu, klaster wilayah perkotaan dan semi-perkotaan seperti Puskesmas Pandaan (28 kasus), Puskesmas Prigen (25 kasus), dan Puskesmas Gempol (21 kasus) juga menunjukkan peningkatan aktivitas penularan yang signifikan, mempertegas pola penyebaran penyakit yang mengikuti densitas populasi penduduk.

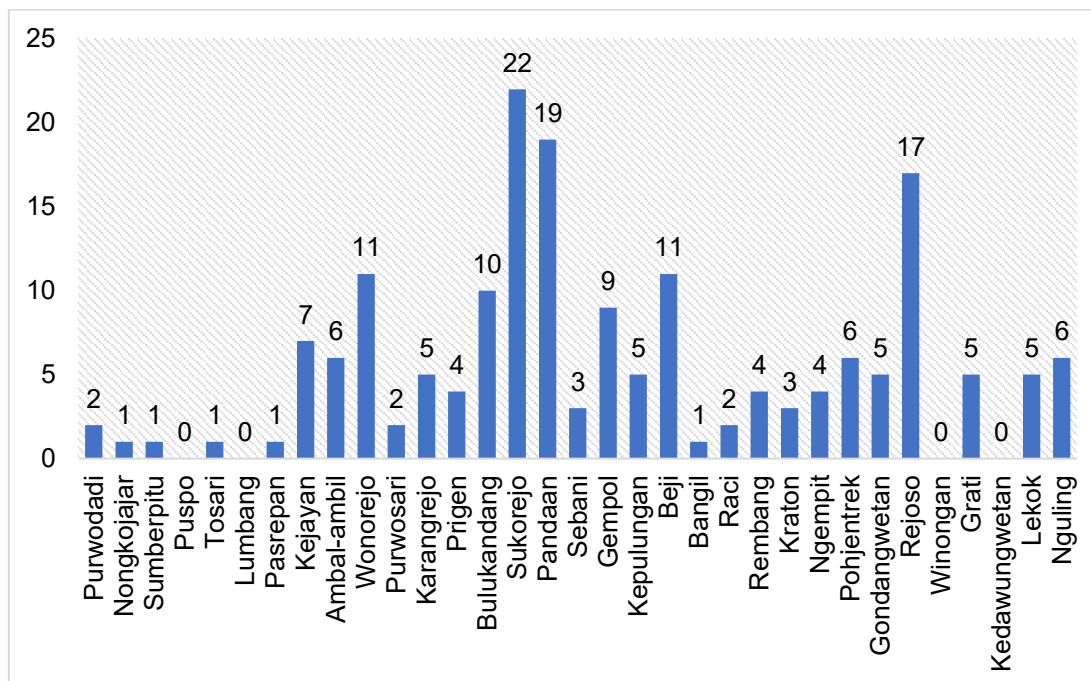
Selain peningkatan morbiditas (angka kesakitan), indikator mortalitas (kematian) pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang berbanding lurus dengan jumlah kasus. Tercatat total kematian akibat DBD meningkat menjadi 6 orang, naik dari 4 orang pada tahun sebelumnya. Analisis sebaran mortalitas menunjukkan pola yang menyebar (*scattered*), di mana kasus kematian dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Grati, Kebon Candi, Gayam, Pohjentrek, Purwosari, dan Sukorejo. Fakta bahwa kematian terjadi di enam wilayah berbeda bukan hanya menumpuk di wilayah dengan kasus tertinggi memberikan pesan penting mengenai disparitas kualitas deteksi dini dan penanganan kegawatdaruratan di tingkat layanan primer. Keberadaan kasus kematian di wilayah dengan jumlah kasus moderat seperti Pohjentrek atau Gayam mengisyaratkan adanya fenomena keterlambatan rujukan atau *under-diagnosis* pada fase awal infeksi, yang menyebabkan pasien tidak tertolong saat memasuki fase kritis.

Dari sisi geografis, tahun 2022 juga mencatat penyusutan "zona aman". Wilayah dataran tinggi seperti Nongkojajar yang pada tahun sebelumnya mencatatkan nol kasus, kini mulai melaporkan adanya 2 kasus positif. Hal ini menjadi peringatan dini bahwa perubahan iklim mikro atau peningkatan mobilitas penduduk telah memungkinkan vektor nyamuk untuk beradaptasi dan menularkan penyakit di wilayah ketinggian yang sebelumnya dianggap steril dari ancaman DBD. Meskipun demikian, wilayah seperti Tosari, Puspo, dan Lumbang masih mampu mempertahankan status nol kasus, yang tetap menjadi benteng terakhir zona bebas DBD di Kabupaten Pasuruan. Secara keseluruhan, tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai tahun peringatan (*warning year*) di mana penyakit mulai menyebar lebih luas keluar dari klaster

tradisionalnya, menuntut kewaspadaan yang lebih merata di seluruh kecamatan.

3. Analisis Sebaran Kasus DBD Tahun 2023

Setelah mengalami fase ekspansi wilayah pada tahun sebelumnya, perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 menunjukkan pola de-eskalasi intensitas yang moderat, namun diwarnai dengan pergeseran peta kerawanan yang sangat strategis. Secara agregat, grafik tahun 2023 memperlihatkan penurunan ketinggian batang di beberapa wilayah yang sebelumnya berstatus merah, mengindikasikan adanya keberhasilan parsial dalam pengendalian vektor atau terbentuknya imunitas alami populasi di kantong-kantong lama. Meskipun demikian, penurunan kuantitas kasus ini tidak serta merta menurunkan kewaspadaan, karena data epidemiologi justru menyingkap fenomena baru berupa urbanisasi penularan, di mana konsentrasi kasus berpindah secara masif menuju wilayah aglomerasi perkotaan yang memiliki densitas penduduk dan mobilitas tinggi.



Gambar 1.27 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Perubahan paling mencolok dalam lanskap DBD tahun 2023 adalah tumbangnya dominasi Puskesmas Sukorejo sebagai pemuncak kasus tertinggi, posisi yang selama dua tahun berturut-turut dipegangnya. Episentrum

penyebaran penyakit kini bergeser ke Puskesmas Pandaan, yang mencatatkan diri sebagai penyumbang kasus terbanyak dengan 43 kasus. Kenaikan kasus di Pandaan ini diikuti secara ketat oleh Puskesmas Bangil yang menempati posisi kedua dengan 39 kasus. Fenomena naiknya Pandaan dan Bangil dua wilayah yang notabene merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan menandakan bahwa transmisi virus Dengue telah beradaptasi dengan ekosistem perkotaan yang padat. Pola hidup masyarakat urban, keberadaan bangunan bertingkat, serta drainase perkotaan yang kompleks kemungkinan menjadi faktor pendorong utama tingginya angka insiden di kedua wilayah tersebut. Sementara itu, Puskesmas Sukorejo meskipun mengalami penurunan beban kasus yang signifikan dari 56 kasus (2022) menjadi 31 kasus (2023), tetap bertahan di posisi ketiga tertinggi, menunjukkan bahwa reservoir virus di wilayah tersebut masih aktif meskipun tekanannya mulai mereda.

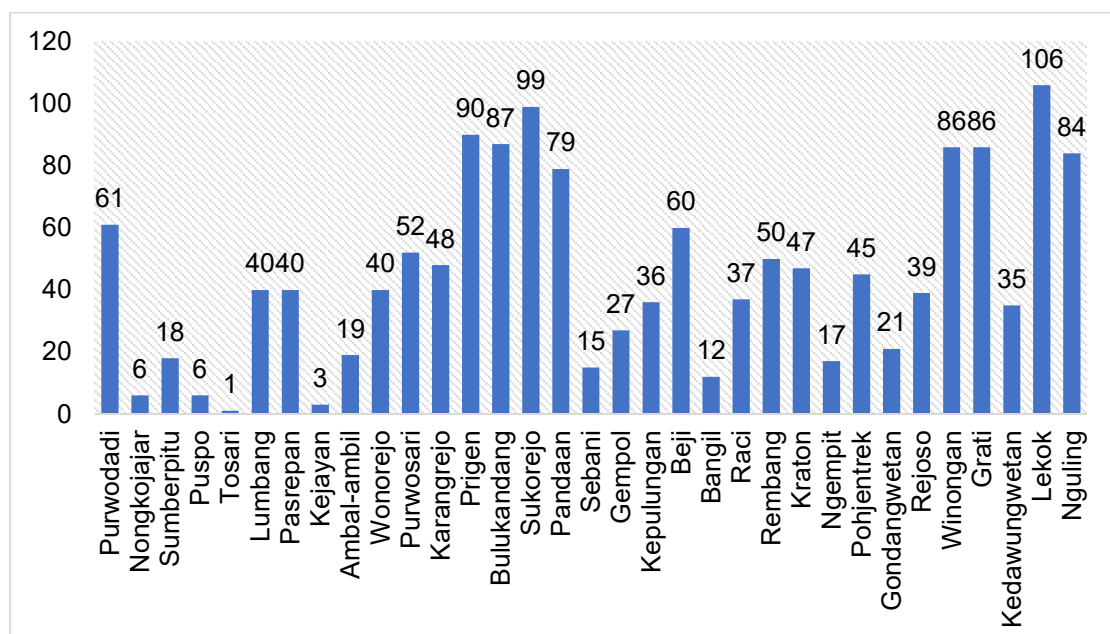
Dari aspek fatalitas, tahun 2023 mencatatkan penurunan angka kematian menjadi 4 orang, kembali ke level yang sama dengan tahun 2021 setelah sempat naik di tahun 2022. Sebaran kasus kematian ini memberikan gambaran tentang tingkat keparahan infeksi di berbagai wilayah. Kematian dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas Winongan, Puskesmas Grati, Puskesmas Pandaan, dan Puskesmas Sukorejo. Keberadaan kasus kematian di Pandaan dan Sukorejo berkorelasi lurus dengan tingginya insiden kasus di sana, yang menandakan besarnya peluang paparan virus terhadap populasi rentan. Namun, perhatian khusus perlu diarahkan pada wilayah Winongan, yang meskipun jumlah total kasusnya tidak setinggi daerah urban, namun mencatatkan adanya fatalitas. Hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam kecepatan diagnosis atau rujukan di wilayah tersebut, di mana kasus yang terdeteksi mungkin sudah berada dalam stadium lanjut (*Dengue Shock Syndrome*).

Secara geografis, polarisasi antara wilayah dataran rendah dan dataran tinggi semakin tegas pada tahun 2023. Wilayah pegunungan seperti Tosari, Puspo, dan Lumbang konsisten mempertahankan status *zero cases* atau nol kasus, yang menegaskan kembali peran faktor klimatologis (suhu rendah) sebagai penghambat alami perkembangbiakan vektor. Stabilitas nol kasus di wilayah ini menjadi kontras yang tajam dibandingkan gejala kasus di wilayah

perkotaan Pandaan dan Bangil. Secara keseluruhan, tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai "fase transisi yang menipu", di mana penurunan total kasus secara kabupaten seolah memberikan rasa aman semu, padahal sesungguhnya sedang terjadi konsolidasi virus di pusat-pusat keramaian yang kelak akan menjadi pemicu ledakan kasus yang jauh lebih besar pada tahun berikutnya.

4. Analisis Sebaran Kasus DBD Tahun 2024

Jika tahun 2023 dianggap sebagai fase transisi yang relatif tenang, tahun 2024 mencatatkan dirinya sebagai periode krisis dengan terjadinya lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sangat ekstrem dan bersifat eksplosif di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Grafik data tahun 2024 memperlihatkan perubahan drastis pada lanskap epidemiologi daerah, di mana batang-batang grafik yang sebelumnya landai kini melonjak tinggi secara serentak di hampir semua fasilitas kesehatan. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya kegagalan mekanisme pertahanan lingkungan alami atau adanya anomali iklim yang sangat kondusif bagi ledakan populasi vektor nyamuk secara masif. Intensitas serangan penyakit pada tahun ini tidak lagi bersifat lokal atau klaster, melainkan telah berkembang menjadi transmisi komunitas yang meluas (*widespread community transmission*), menempatkan sistem kesehatan daerah di bawah tekanan beban pelayanan yang sangat berat.



Gambar 1.28 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

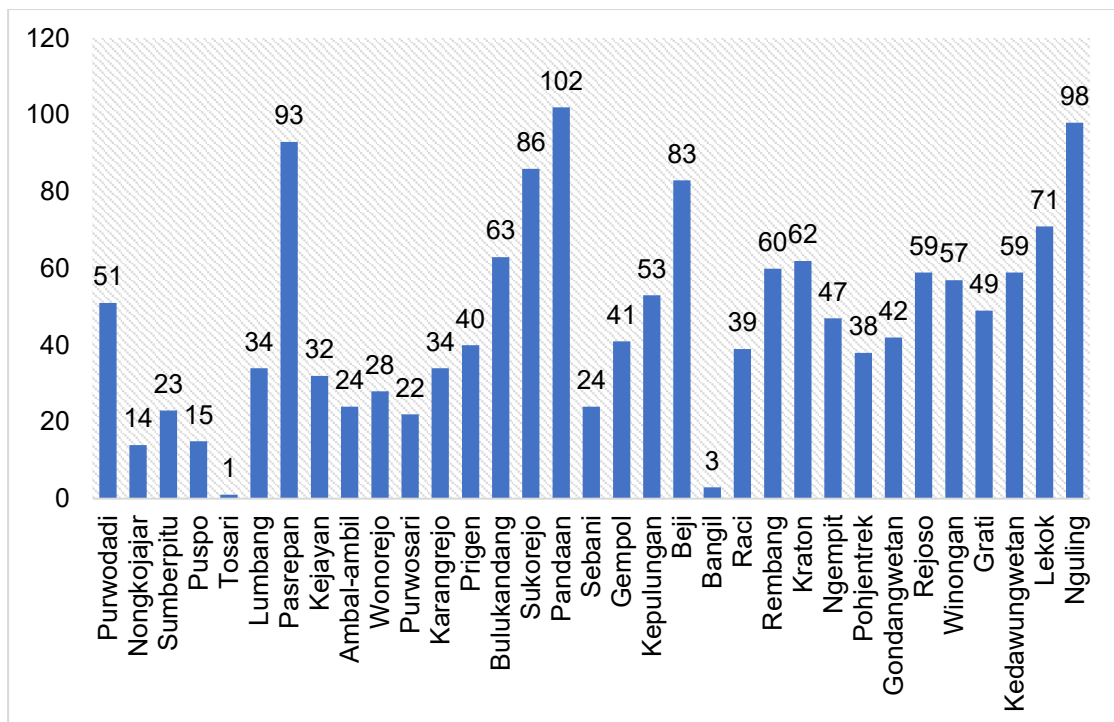
Perubahan peta kekuatan sebaran penyakit terlihat sangat mencolok dengan munculnya Puskesmas Lekok sebagai episentrum baru yang paling ganas. Wilayah pesisir ini mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan total temuan mencapai 106 kasus, sebuah angka yang melonjak berkali-kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dominasi Lekok ini disusul ketat oleh "pemain lama", Puskesmas Sukorejo, yang kembali meledak dengan 99 kasus setelah sempat turun di tahun 2023. Namun, kejutan terbesar justru datang dari Puskesmas Prigen. Wilayah yang biasanya mencatatkan angka moderat ini tiba-tiba mengalami eskalasi luar biasa menjadi penyumbang kasus terbanyak ketiga dengan 90 kasus. Tingginya kasus di Prigen, yang notabene merupakan wilayah dataran yang lebih tinggi dan kawasan wisata, menandakan bahwa mobilitas manusia yang tinggi (wisatawan) dan perubahan iklim mikro telah berhasil meruntuhkan barier geografis yang selama ini melindungi wilayah tersebut. Selain ketiga wilayah tersebut, zona merah juga meluas ke Puskesmas Beji (68 kasus), Puskesmas Pandaan (62 kasus), dan Puskesmas Purwosari (56 kasus), membentuk koridor penularan yang membentang dari wilayah pesisir hingga pegunungan.

Dampak paling fatal dari ledakan kasus tahun 2024 ini tecermin dari angka mortalitas yang mencapai titik tertinggi sepanjang periode pengamatan. Tercatat sebanyak 8 kasus kematian terjadi akibat keganasan infeksi virus Dengue pada tahun ini. Yang lebih memprihatinkan, sebaran kematian ini sangat merata dan tidak terpusat di satu lokasi saja. Delapan nyawa yang hilang tersebut tersebar di delapan wilayah kerja Puskesmas yang berbeda, yaitu Gempol, Beji, Bangil, Pandaan, Prigen, Sukorejo, Purwosari, dan Wonorejo. Pola kematian yang menyebar luas ini satu kematian di setiap titik panas mengonfirmasi bahwa virulensi atau keganasan virus yang beredar sangat tinggi, dan risiko kematian mengintai di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Hal ini juga menjadi indikator keras bagi manajemen klinis di tingkat pertama dan rujukan, bahwa kecepatan perburukan kondisi pasien (*deterioration*) pada tahun 2024 terjadi sangat cepat sehingga mempersempit jendela waktu penyelamatan.

Secara keseluruhan, tahun 2024 adalah tahun dengan rapor merah bagi pengendalian DBD di Kabupaten Pasuruan. Hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman, kecuali kantong-kantong kecil di dataran tinggi ekstrem seperti Tosari yang masih menunjukkan resistensi. Lonjakan kasus yang menembus angka ratusan di satu puskesmas (Lekok) dan tingginya angka kematian menjadi bukti tak terbantahkan bahwa strategi pengendalian rutin (PSN dan Fogging reguler) tidak lagi memadai untuk menghadapi gelombang serangan sebesar ini. Kondisi *outbreak* tahun 2024 ini menjadi fondasi beban penyakit yang terbawa hingga tahun berikutnya, menciptakan reservoir virus yang sangat besar di masyarakat yang sulit untuk dipadamkan dalam waktu singkat.

5. Analisis Sebaran Kasus DBD Tahun 2025

Menutup periode evaluasi lima tahunan, kondisi epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa gelombang serangan virus belum sepenuhnya mereda pasca-ledakan besar tahun sebelumnya. Data tahun 2025 menggambarkan situasi "siaga berkelanjutan" (*sustained high alert*), di mana meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa titik panas lama, secara agregat beban kasus di tingkat kabupaten masih bertahan pada level yang sangat tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa reservoir virus di lingkungan masyarakat telah terbentuk secara masif, sehingga transmisi penyakit terus bergulir sepanjang tahun tanpa memandang musim secara ketat. Hal yang paling mencolok pada tahun ini adalah dinamika pergeseran episentrum yang sangat dinamis, di mana wilayah perkotaan padat dan wilayah pesisir timur kini bergantian mengambil alih posisi sebagai penyumbang kasus terbesar.



Gambar 1.29 Grafik Penemuan dan Penanganan Kasus DBD Tahun 2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Dalam peta sebaran kasus tahun 2025, Puskesmas Pandaan muncul sebagai pemuncak klasemen dengan rekor temuan tertinggi sebanyak 102 kasus. Kembalinya Pandaan sebagai episentrum utama menggeser dominasi Lekok dan Sukorejo menegaskan bahwa wilayah urban dengan mobilitas penduduk tinggi dan kompleksitas tata ruang kota tetap menjadi habitat paling ideal bagi penyebaran virus Dengue yang eksplosif. Posisi kedua ditempati oleh Puskesmas Nguling yang mencatatkan lonjakan mengejutkan dengan 98 kasus. Naiknya Nguling secara drastis ini menandakan pergeseran vektor ke arah timur kabupaten, memperluas zona merah pesisir yang sebelumnya didominasi oleh Lekok. Sementara itu, Puskesmas Sukorejo meskipun turun ke posisi ketiga, tetap mencatatkan angka yang sangat tinggi yakni 85 kasus. Konsistensi Sukorejo yang selalu berada di jajaran tiga besar selama lima tahun berturut-turut (2021-2025) tanpa henti membuktikan bahwa wilayah ini merupakan "zona endemik abadi" yang memerlukan pendekatan pengendalian vektor yang radikal dan berbeda dari wilayah lain.

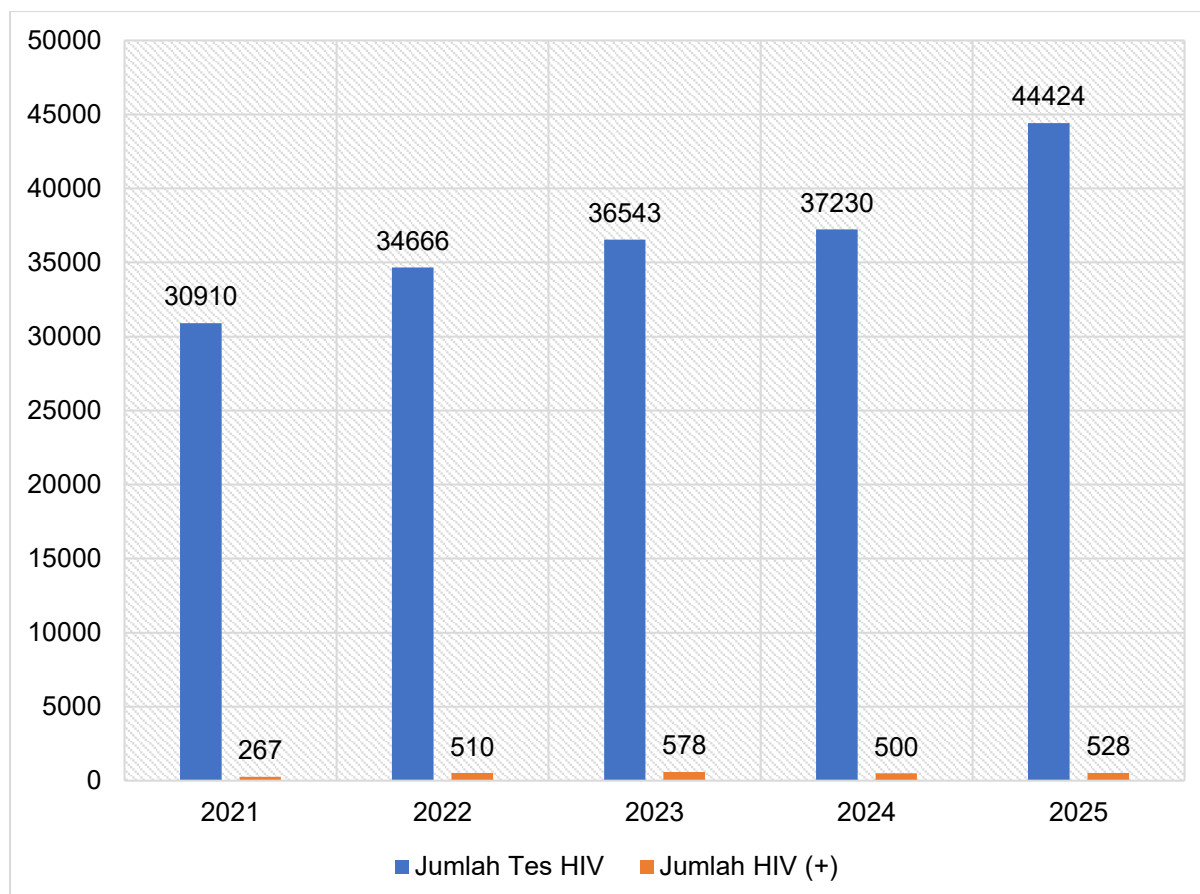
Namun, temuan paling mengkhawatirkan dan menjadi alarm keras pada tahun 2025 bukanlah pada jumlah kasus semata, melainkan pada peta sebaran kematian (*mortality map*). Tercatat 7 kasus kematian pada tahun ini, angka

yang masih sangat tinggi dan nyaris menyamai rekor tahun 2024. Yang mengejutkan, lokasi kejadian kematian kini merambah ke wilayah-wilayah yang secara historis dianggap aman. Data mencatat kematian terjadi di wilayah kerja Puskesmas Lumbang dan Puskesmas Puspo. Kedua wilayah ini adalah daerah dataran tinggi/pegunungan yang pada tahun 2021-2023 konsisten mencatatkan nol kasus. Adanya kematian di Lumbang dan Puspo adalah indikator epidemiologi yang sangat buruk; ini menandakan bahwa vektor nyamuk *Aedes aegypti* telah sepenuhnya beradaptasi dengan suhu dingin ketinggian, atau telah terjadi perubahan iklim mikro yang signifikan. Jebolnya "benteng alam" dataran tinggi ini berarti tidak ada lagi wilayah yang benar-benar steril dari ancaman kematian akibat DBD di Kabupaten Pasuruan.

Selain kedua wilayah pegunungan tersebut, kematian juga tersebar di Lekok, Gempol, Kraton, dan Ambal-Ambil. Keberadaan kematian di wilayah Ambal-Ambil dan Kraton menambah daftar panjang kecamatan yang gagal menyelamatkan pasien pada fase kritis. Secara keseluruhan, profil data tahun 2025 menutup periode RPJMD dengan pesan yang jelas: DBD di Kabupaten Pasuruan telah berevolusi menjadi ancaman yang lebih ganas, lebih luas jangkauannya (dari pesisir hingga puncak gunung), dan lebih mematikan. Stabilitas angka kematian yang tinggi (7-8 orang per tahun di akhir periode) menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan gawat darurat dan deteksi dini di seluruh jajaran fasilitas kesehatan primer.

H. Cakupan Penderita HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Upaya pengendalian *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di Kabupaten Pasuruan menunjukkan progresifitas yang sangat positif, terutama dalam aspek deteksi dini dan penjangkaran kasus. HIV/AIDS sebagai penyakit menular yang memiliki fenomena "gunung es" (*iceberg phenomenon*) menuntut keaktifan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan tes agar penderita yang belum terdiagnosis dapat segera ditemukan dan ditangani. Data periode 2021-2025 memperlihatkan korelasi yang kuat antara masifnya upaya skrining (*testing*) dengan jumlah temuan kasus positif di masyarakat.



Gambar 1.30 Grafik Tren Penemuan Kasus HIV Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Secara umum, kinerja Dinas Kesehatan dalam melakukan Tes HIV (batang biru) menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan linear setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah warga yang dites tercatat sebanyak 30.910 jiwa dengan temuan kasus positif sebanyak 267 jiwa. Peningkatan signifikan mulai terlihat pada tahun 2022 dan 2023, di mana cakupan tes diperluas masing-masing menjadi 34.666 dan 36.543 jiwa. Perluasan jangkauan ini berdampak langsung pada lonjakan temuan kasus positif yang meningkat tajam hampir dua kali lipat pada tahun 2022 (510 kasus) dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 578 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak populasi kunci dan berisiko yang berhasil dijangkau oleh layanan kesehatan.

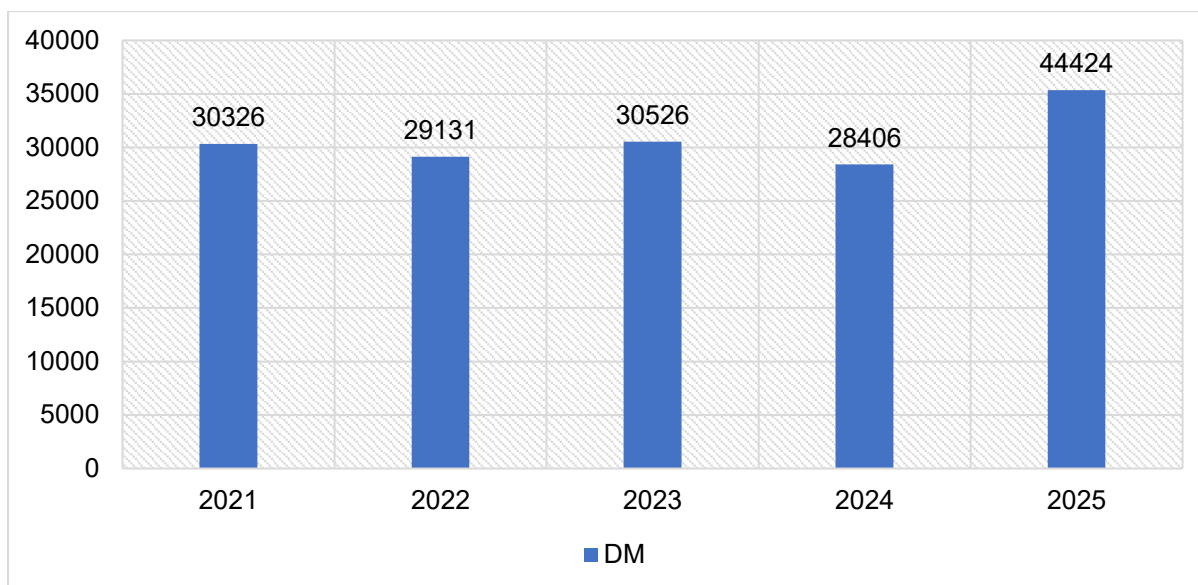
Pada periode akhir perencanaan, yakni tahun 2024 dan 2025, intensitas skrining semakin digencarkan hingga menyentuh angka tertinggi. Tahun 2025 mencatatkan rekor *screening* tertinggi dengan total 44.424 tes dilakukan, meningkat

drastis dibandingkan awal periode pengamatan. Meskipun jumlah tes meningkat tajam, angka penemuan kasus positif (batang merah) cenderung stabil di kisaran 500-an kasus (500 kasus pada 2024 dan 528 kasus pada 2025). Stabilitas angka positif di tengah kenaikan volume tes yang masif ini dapat diinterpretasikan secara hati-hati sebagai sinyal awal keberhasilan pengendalian laju penularan, meskipun angka temuan absolut masih tergolong tinggi.

Kesimpulannya, grafik ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengejar target *Three Zeroes* (terutama *Zero New Infection*) melalui strategi *Fast Track* 95-95-95. Tingginya angka tes pada tahun 2025 yang mencapai lebih dari 44 ribu tes bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti konkret implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berjalan optimal. Dengan ditemukannya 528 kasus positif di tahun 2025, langkah selanjutnya yang krusial adalah memastikan 100% dari mereka mendapatkan akses pengobatan ARV (Antiretroviral) sesegera mungkin guna menekan jumlah virus dan memutus mata rantai penularan di masa depan.

I. Penderita DM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan konsisten. Tren jumlah penderita DM di Kabupaten Pasuruan selama periode 2021-2025 memperlihatkan dinamika yang fluktuatif, dengan pola peningkatan yang sangat signifikan pada akhir periode perencanaan. Data ini mencerminkan kinerja deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) yang semakin intensif, sekaligus menggambarkan beban kesehatan masyarakat yang sesungguhnya di lapangan.



Gambar 1.31 Grafik Tren Penderita DM Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada fase awal pengamatan, jumlah penderita DM cenderung stabil di kisaran angka 29 hingga 30 ribu jiwa. Tahun 2021 dibuka dengan jumlah penderita terdata sebanyak 30.326 jiwa. Angka ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 29.131 jiwa, sebelum kemudian mengalami *rebound* (kenaikan kembali) pada tahun 2023 menjadi 30.526 jiwa. Menariknya, pada tahun 2024, jumlah penderita sempat menyentuh titik terendah dalam lima tahun terakhir, yakni turun menjadi 28.406 jiwa. Fluktuasi pada periode 2021-2024 ini kemungkinan dipengaruhi oleh variabilitas kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan (Faskes) dan kepatuhan kontrol rutin peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis).

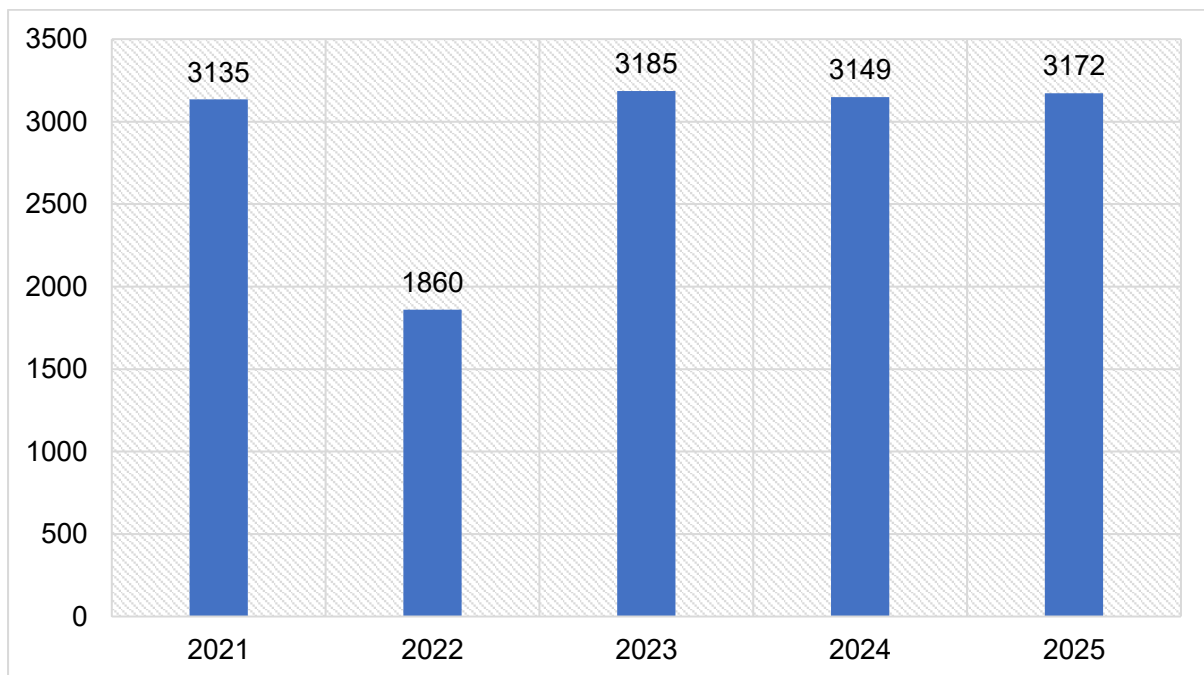
Namun, perubahan drastis terjadi pada tahun 2025. Data menunjukkan terjadinya lonjakan kasus yang sangat tajam, di mana jumlah penderita meroket hingga mencapai puncak tertinggi (*peak*) sebanyak 35.362 jiwa. Jika dibandingkan dengan posisi tahun 2024, terjadi penambahan penderita baru yang teridentifikasi secara signifikan, dengan persentase kenaikan mencapai +24,5% dalam kurun waktu satu tahun.

Lonjakan kinerja penemuan kasus di tahun 2025 ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan dari intensifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya dalam upaya skrining PTM secara masif kepada populasi

berisiko (usia produktif dan lansia). Kenaikan angka ini bukan semata-mata menunjukkan memburuknya status kesehatan masyarakat, melainkan indikasi positif bahwa "fenomena gunung es" DM mulai terkuak; banyak kasus yang sebelumnya tidak terdiagnosis kini berhasil ditemukan dan masuk dalam sistem pengobatan. Dengan total penderita yang kini menembus angka 35 ribu jiwa, fokus intervensi Dinas Kesehatan ke depan harus diperkuat pada pencegahan komplikasi lanjutan (gagal ginjal, stroke, jantung) melalui pemantauan gula darah rutin dan modifikasi gaya hidup sehat.

J. Penderita ODGJ di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari indikator kesehatan daerah yang diukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. Tren data selama kurun waktu lima tahun (2021-2025) memperlihatkan dinamika pelayanan yang menarik, di mana setelah mengalami fluktuasi tajam di awal periode, cakupan pelayanan berhasil mencapai titik kestabilan (*steady state*) pada tiga tahun terakhir. Stabilitas angka ini mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan telah berhasil memetakan populasi "kantong" ODGJ berat yang membutuhkan pengobatan rutin seumur hidup.



Gambar 1.32 Grafik Tren Penderita ODGJ Berat Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada awal periode pengamatan tahun 2021, tercatat sebanyak 3.135 penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan. Namun, terjadi anomali data yang cukup signifikan pada tahun 2022, di mana angka tercatat mengalami penurunan drastis hingga ke titik terendah yakni 1.860 penderita. Penurunan tajam ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor teknis di lapangan, seperti pembersihan data (*data cleansing*), kendala pelacakan pasien pasca-pandemi, atau perubahan mekanisme pelaporan, mengingat karakteristik gangguan jiwa berat bersifat kronis dan jarang mengalami penurunan prevalensi secara tiba-tiba dalam jumlah besar.

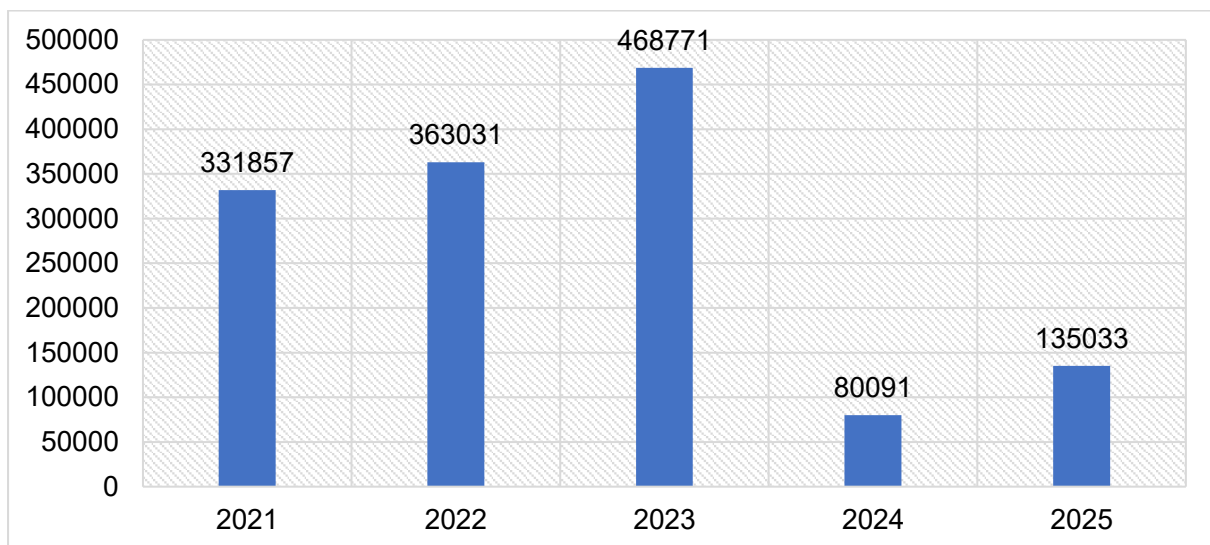
Koreksi positif terlihat pada tahun 2023, di mana sistem pendataan dan pelayanan kembali berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan lonjakan kembali (*rebound*) jumlah penderita yang terlayani sebesar 71% menjadi 3.185 penderita, yang sekaligus menjadi angka puncak capaian (*peak*) dalam lima tahun terakhir. Lonjakan ini mengonfirmasi bahwa angka riil beban kasus ODGJ berat di Kabupaten Pasuruan memang berada di kisaran angka 3.100-an jiwa.

Memasuki fase akhir periode (2023-2025), tren menunjukkan pola stagnasi yang stabil. Pada tahun 2024, angka tercatat sebesar 3.149 penderita, dan pada tahun 2025 naik tipis menjadi 3.172 penderita. Stabilitas angka di kisaran 3.100-an selama tiga tahun berturut-turut ini memiliki makna positif dari sisi manajemen kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan jiwa masyarakat (Community Mental Health Nursing) telah berhasil melakukan retensi pasien agar tetap terpantau dan berobat jalan, serta tidak ada lonjakan kasus baru yang ekstrem. Dengan rata-rata beban layanan rutin sekitar 2.920 hingga 3.100 pasien per tahun, fokus ke depan adalah memastikan ketersediaan obat psikofarmaka dan pencegahan pasung pada penderita yang sudah terdata tersebut.

K. Penderita Hipertensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering dijuluki sebagai *The Silent Killer* karena sering kali tidak menunjukkan gejala namun menjadi pintu gerbang berbagai penyakit mematikan seperti stroke dan jantung. Analisis data pelayanan hipertensi di Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan volume pelayanan yang sangat masif dengan total akumulasi mencapai 1.378.783 jiwa.

Namun, grafik tahunan memperlihatkan adanya dua fase tren yang berbeda secara fundamental akibat perubahan kebijakan penetapan target sasaran.



Gambar 1.33 Grafik Tren Penderita Hipertensi Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

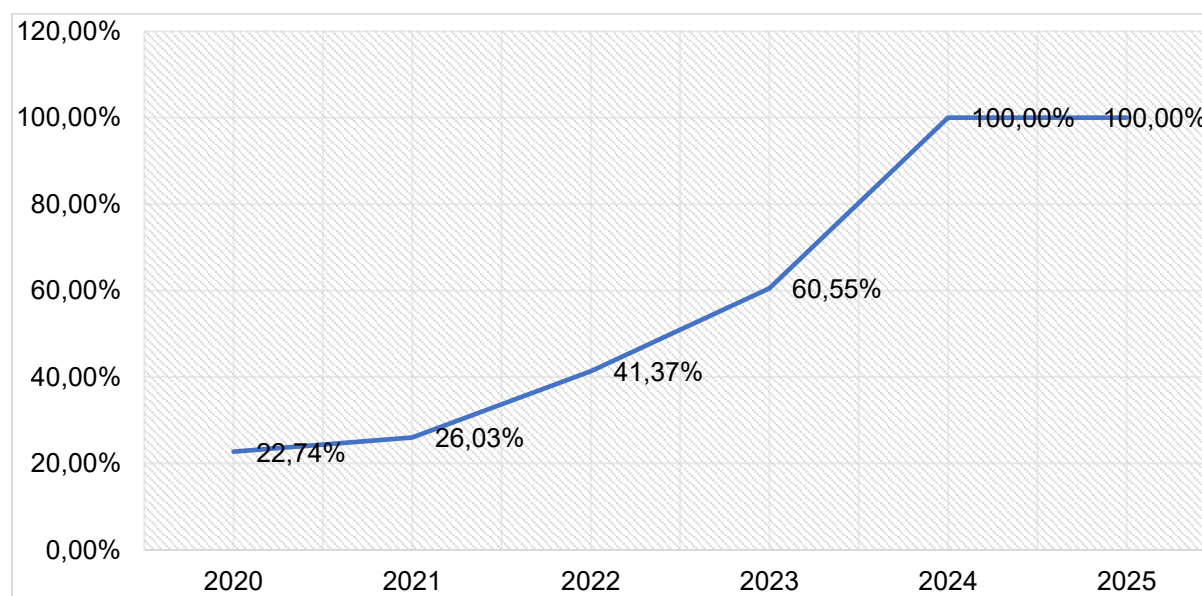
Fase Ekstensifikasi (2021-2023): Pada periode tiga tahun pertama, tren pelayanan menunjukkan grafik menanjak yang konsisten dengan angka capaian yang sangat besar. Tahun 2021 mencatat pelayanan bagi 331.857 jiwa, yang terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan rekor tertinggi 468.771 jiwa. Tingginya angka pada fase ini dikarenakan basis penetapan target sasaran masih menggunakan estimasi prevalensi deteksi dini secara umum. Artinya, jangkauan skrining dilakukan seluas-luasnya ke masyarakat untuk menjaring potensi kasus sebanyak mungkin.

Fase Rekalibrasi dan Validasi Data (2024-2025): Memasuki tahun 2024, terjadi penurunan angka statistik yang sangat tajam menjadi 80.091 jiwa. Penurunan ini bukan mengindikasikan penurunan kinerja tenaga kesehatan, melainkan dampak dari perubahan standar validasi data. Mulai tahun 2024, Dinas Kesehatan melakukan penyesuaian target sasaran yang lebih riil dan spesifik berdasarkan data Prevalensi SKI (Survei Kesehatan Indonesia) Tahun 2023. Transisi ini merupakan langkah strategis untuk memurnikan data dari sekadar "estimasi sasaran" menjadi "data penderita riil" yang terkonfirmasi secara medis, sehingga intervensi pengobatan menjadi lebih tepat sasaran.

Setelah rekalisasi tersebut, kinerja pelayanan kembali menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Tercatat terjadi kenaikan signifikan jumlah penderita yang terlayani menjadi 135.033 jiwa, naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2024. Peningkatan capaian pelayanan pada tahun 2025 ini didorong oleh keberhasilan inovasi program "Cek Kesehatan Gratis" yang digencarkan oleh Pemerintah Daerah. Program jemput bola ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memeriksakan tekanan darahnya secara sukarela, sehingga kasus-kasus baru dapat ditemukan lebih dini dan langsung mendapatkan penanganan medis sesuai standar.

L. Capaian ODF Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025

Salah satu indikator keberhasilan intervensi kesehatan lingkungan yang paling fundamental adalah status *Open Defecation Free* (ODF) atau Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Data capaian ODF Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir (2021-2025) menggambarkan sebuah transformasi radikal dan percepatan kinerja yang luar biasa (*exponential improvement*). Pemerintah daerah berhasil mengubah status sanitasi wilayah dari yang sebelumnya masih rendah menjadi tuntas paripurna 100% hanya dalam kurun waktu empat tahun.



Gambar 1.34 Grafik Persentase Capaian ODF Kabupaten Pasuruan 2021-2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Fase Akselerasi dan Percepatan (2021-2023): Pada awal periode pengamatan tahun 2021, capaian ODF masih berada di angka 26,03%. Angka ini menunjukkan

bahwa pada saat itu, mayoritas wilayah desa/kelurahan masih memiliki masalah sanitasi dan perilaku BABS yang tinggi. Menyadari urgensi ini, dilakukan intervensi masif melalui pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan pembangunan infrastruktur jamban sehat. Hasilnya mulai terlihat signifikan pada tahun 2022, di mana capaian melonjak menjadi 41,37%. Tren positif ini terus dipacu hingga tahun 2023, di mana cakupan desa ODF kembali mengalami kenaikan drastis mencapai 60,55%. Periode tiga tahun ini menjadi fondasi penting perubahan perilaku masyarakat.

Fase Penuntasan Paripurna dan Keberlanjutan (2024-2025): Puncak keberhasilan program sanitasi terjadi pada tahun 2024, di mana Kabupaten Pasuruan berhasil mencatatkan rekor capaian 100% ODF. Lompatan dari 60% (2023) langsung menuju 100% (2024) mengindikasikan adanya komitmen politik dan anggaran yang kuat ("Gempur Sanitasi") untuk menyelesaikan sisa masalah sanitasi secara serentak di seluruh wilayah.

Yang lebih membanggakan, status paripurna ini berhasil dipertahankan pada tahun 2025 dengan capaian yang tetap konsisten 100%. Mempertahankan status 100% ODF seringkali lebih sulit daripada mencapainya, karena menuntut konsistensi perubahan perilaku masyarakat agar tidak kembali ke kebiasaan lama. Keberhasilan mempertahankan angka 100% di tahun 2025 menjadi bukti bahwa budaya hidup bersih dan sehat (PHBS) telah mengakar kuat di masyarakat Kabupaten Pasuruan, sekaligus menjadi modal utama dalam mendukung penurunan prevalensi stunting dan penyakit berbasis lingkungan seperti diare.

KEBIJAKAN GERMAS DAERAH

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan kesehatan ke dalam setiap lini pembangunan. Sebagai manifestasi nyata dari komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan ini dirancang bukan hanya sebagai program sektoral Dinas Kesehatan semata, melainkan sebagai gerakan masif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lintas Perangkat Daerah.

Bupati Pasuruan secara tegas telah menghimbau dan menginstruksikan agar seluruh lapisan masyarakat mengambil peran aktif dalam membudayakan pola hidup sehat. Himbauan ini diterjemahkan ke dalam Enam Pilar Fokus Gerakan yang menjadi arah kebijakan implementasi GERMAS di Kabupaten Pasuruan, yaitu:

1. Peningkatan Aktivitas Fisik: Mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari demi menjaga kebugaran dan mencegah penyakit degeneratif.
2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat: Membudayakan praktik hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari di rumah tangga.
3. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi: Menjamin ketersediaan akses terhadap pangan yang bergizi seimbang, khususnya konsumsi buah dan sayur, sebagai upaya preventif stunting dan gizi buruk.
4. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit: Menggeser paradigma dari kuratif (pengobatan) menjadi preventif (pencegahan) melalui skrining kesehatan rutin.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan: Menciptakan sanitasi lingkungan yang layak, termasuk penuntasan ODF (*Open Defecation Free*).
6. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat: Secara aktif menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di lingkungan masyarakat, institusi pendidikan, maupun tempat kerja.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan pendekatan kolaboratif (*multi-sectoral approach*). Pelaksanaan GERMAS diwajibkan bagi seluruh sektor, mulai dari lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah, Organisasi Masyarakat/Sosial, Dunia Usaha, hingga lingkungan Pendidikan. Sinergi ini bertujuan untuk mengkampanyekan dan mendorong terciptanya ekosistem masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sehat dan mandiri.

Sebagai landasan yuridis yang kuat (*legal standing*), kebijakan GERMAS di Kabupaten Pasuruan telah dipayungi oleh serangkaian regulasi yang ditetapkan oleh Bupati Pasuruan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Regulasi tersebut meliputi:

1. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor: 440/4659/424.072/2017 tanggal 16 Juli 2017, yang menjadi tonggak awal instruksi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 050/500/HK/424.014/2020 tertanggal 4 Juni 2020, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 050/278/HK/424.013/2021 tertanggal 4 Januari 2021, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2021.
4. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 050/320/HK/424.013 Tahun 2022, tentang Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.

Keberadaan regulasi yang diperbarui secara konsisten setiap tahunnya menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengawal keberlanjutan program GERMAS agar tetap relevan, terstruktur, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

RINCIAN KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

2.1. Rincian Daftar Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1. Bappelitbangda

Sebagai institusi yang memegang peranan vital dalam orkestrasi perencanaan pembangunan daerah, Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan menunjukkan komitmen ganda dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), baik melalui pelembagaan budaya kerja internal maupun pelaksanaan fungsi koordinasi lintas sektor. Institusi yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 09, Bangil ini, didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 53 pegawai (29 laki-laki dan 24 perempuan).

Dalam perspektif internal, evaluasi mandiri tahun 2025 menunjukkan dinamika positif pada dimensi aktivitas fisik melalui rutinitas senam "Ayo Bergerak" mingguan dan anjuran penggunaan tangga untuk mengurangi perilaku sedenter. Meskipun fasilitas olahraga khusus belum tersedia, upaya preventif kesehatan berjalan solid melalui pemeriksaan kesehatan berkala per semester, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), serta penyediaan konsumsi rapat berbasis buah dan sayur. Kualitas lingkungan kerja juga dikelola dengan standar tinggi melalui penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang ketat dan penerapan prinsip sanitasi 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat), didukung oleh komitmen manajerial melalui formalisasi Tim Pelaksana.

Secara fungsional, berdasarkan data kinerja program tahun 2025, Bappelitbangda mengemban tanggung jawab strategis sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan GERMAS. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan terciptanya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia. Indikator keberhasilan yang ditetapkan meliputi penerbitan Surat Edaran pelaksanaan Instruksi Presiden tentang GERMAS serta peningkatan jumlah daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan GERMAS.

Realisasi kinerja operasional diwujudkan melalui sub-kegiatan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) GERMAS di Kabupaten/Kota. Sepanjang tahun anggaran 2025, Bappelitbangda berhasil melaksanakan target 3 (tiga) kali pertemuan koordinasi.

Dari sisi akuntabilitas fiskal, alokasi anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan ini pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp17.280.000,00. Penyerapan anggaran menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang optimal dengan realisasi sebesar Rp8.640.000,00 pada Semester I dan Rp8.640.000,00 pada Semester II, sehingga total realisasi mencapai 100% dari pagu anggaran. Sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, Bappelitbangda juga telah menuntaskan kewajiban pelaporan pelaksanaan GERMAS kepada Bappeda Provinsi.



Gambar 2.1 Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik



Gambar 2.2 Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit

2. BNN Kabupaten Pasuruan

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan menutup rangkaian analisis instansi vertikal dengan pendekatan programatik yang memadukan kampanye anti-narkoba (P4GN) dan pemberdayaan ekonomi kesehatan.

Dalam matriks kegiatan Tahun 2025, BNN menetapkan Diseminasi informasi P4GN sebagai payung utama kegiatan. Strategi ini diturunkan menjadi berbagai sub-kegiatan edukatif dan preventif. Total Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp171.275.000, dengan tingkat realisasi yang terbagi rata antara Semester I dan II.

Terdapat dua sorotan utama dalam struktur kegiatan BNN:

1. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Spesifik: Pada Semester II, BNN mengalokasikan anggaran sebesar Rp45.990.000 untuk kegiatan "Pemberdayaan melalui Lifeskill dengan Pelatihan Pembuatan Pie Mangga". Kegiatan ini dirancang berlangsung selama 2 hari dengan target 1 kegiatan. Ini adalah contoh konkret bagaimana BNN menerjemahkan "hidup sehat" tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga memiliki keterampilan ekonomi produktif.
2. Partisipasi Publik (Swadaya): Untuk kegiatan "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kepada Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan Pendidikan" dengan target 6 kegiatan, kolom anggarannya tertulis "Swadaya Masyarakat". Hal ini menunjukkan keberhasilan BNN dalam membangun kesadaran publik sehingga masyarakat bersedia membiayai sendiri kegiatan penyuluhan kesehatan/anti-narkoba tanpa membebani APBD/APBN.

Selain itu, BNN juga mengalokasikan dana untuk Pelaksanaan Tes Urine di Lingkungan Pendidikan sebesar Rp4.550.000 pada Semester II, serta pembentukan Relawan dan Penggiat Anti Narkoba dengan total nilai puluhan juta rupiah yang terealisasi penuh.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, BNN yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 58, Pasuruan, didukung oleh 26 pegawai (17 laki-laki dan 9 perempuan). Instansi ini mencatatkan capaian implementasi yang tergolong sangat baik pada sebagian besar klaster indikator.

Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik, BNN menampilkan kinerja paripurna. Budaya gerak tubuh telah terlembaga melalui senam rutin "Ayo Bergerak" mingguan dan peregangan otot disiplin pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB. Kebijakan penggunaan tangga juga diterapkan secara konsisten.

Dalam aspek kesehatan medis, institusi ini mematuhi standar pemeriksaan berkala enam bulan sekali dan skrining PTM. Dukungan gizi terlihat dari penyediaan buah/sayur saat rapat dan kantin sehat. Namun, terdapat kesenjangan fasilitas responsif gender, di mana Ruang Laktasi belum tersedia.

Kualitas lingkungan kerja dikelola dengan standar tinggi, terutama penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dilaksanakan sangat ketat selaras dengan misi

institusi "bebas zat adiktif". Namun, secara manajerial, terdapat satu celah administratif: SK Tim Pelaksana GERMAS belum tersedia secara formal, meskipun kegiatan operasional berjalan lancar di bawah komitmen pimpinan yang kuat.



Gambar 2.3 Kluster Peningkatan Aktivitas Fisik



Gambar 2.4 Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

3. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Pasuruan, yang beroperasi di Komplek Ruko Latek No. 2E, Bangil, menutup rangkaian evaluasi ini sebagai entitas dengan skala intervensi kesehatan terbesar di Kabupaten Pasuruan.

Berbeda dengan OPD teknis yang berperan sebagai pelaksana kegiatan, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyangga finansial dan operator sistem jaminan kesehatan. Dalam dokumen matriks Tahun 2025, hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang sangat signifikan. Untuk Kegiatan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) saja, dialokasikan anggaran sebesar Rp5.005.800.800.

Realisasi anggaran berjalan sangat produktif dan berimbang, dengan penyerapan Semester I sebesar Rp2.169.874.500 dan Semester II sebesar Rp2.380.853.500. Dana sebesar ini digunakan untuk membiayai Sub Kegiatan Skrining Riwayat Kesehatan dan kegiatan Prolanis.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan pun bersifat masif. Jika instansi lain menargetkan puluhan atau ratusan orang, BPJS Kesehatan menetapkan target Skrining Riwayat Kesehatan pada Semester II mencapai angka 219.866 peserta. Angka ini menegaskan posisi sentral BPJS dalam deteksi dini penyakit katastropik bagi masyarakat luas.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, BPJS Kesehatan menunjukkan standar kepatuhan paripurna. Dengan struktur sumber daya manusia yang ringkas terdiri dari 13 personel (11 laki-laki dan 2 perempuan), instansi ini berhasil menerjemahkan peran strategisnya ke dalam praktik budaya kerja internal yang sehat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri tahun 2025, BPJS Kesehatan mencatatkan capaian kinerja yang ekselen pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik. Seluruh indikator kunci terpenuhi dengan baik, mulai dari pelaksanaan senam rutin ("Ayo Bergerak"), penyediaan fasilitas olahraga, hingga kedisiplinan peregangan otot pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB.

Komitmen terhadap kesehatan preventif juga terlihat sangat kuat. Institusi ini tidak hanya memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala dan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut medis. Dukungan nutrisi terjamin melalui penyediaan buah/sayur dan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) rutin. Keberadaan Kantin Sehat dan Ruang Laktasi yang representatif meski jumlah pegawai perempuan sedikit menegaskan prinsip inklusivitas yang kuat.

Secara manajerial, seluruh instrumen administrasi telah terpenuhi secara lengkap, meliputi komitmen pimpinan, SK Tim Pelaksana, perencanaan terintegrasi, hingga pelaporan rutin. Capaian ini menempatkan BPJS Kesehatan sebagai *Role Model* instansi vertikal dengan penerapan GERMAS paling komprehensif (Skor Paripurna).



Gambar 2.5 Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi



Gambar 2.6 Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik

4. BUMN

Evaluasi terhadap perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang sangat gemilang. Entitas ini berhasil meraih skor sempurna, yakni 35 (Kategori Sangat Baik), tanpa satu pun indikator yang bernilai negatif. Capaian ini menjadikan sektor BUMN sebagai satu-satunya entitas dalam evaluasi tahun ini yang mencapai tingkat kepatuhan paripurna (100%), melampaui capaian Perangkat Daerah teknis maupun sekretariat daerah.

Kekuatan utama BUMN terletak pada integrasi sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) korporasi dengan indikator GERMAS. Pada Klaster A (Aktivitas Fisik) hingga Klaster F (Kesehatan Lingkungan), seluruh parameter terpenuhi dengan baik. Fasilitas olahraga tersedia, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditegakkan dengan ketat, dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan telah menjadi standar operasional prosedur (SOP) perusahaan yang tidak bisa ditawar.

Keunggulan signifikan lainnya terlihat pada Klaster Pengelolaan (Klaster II) dan Klaster Pemantauan (Klaster III). Berbeda dengan instansi pemerintah yang seringkali terkendala dalam aspek administrasi (ketiadaan SK Tim atau dokumen pelaporan), BUMN menunjukkan kedisiplinan manajerial yang tinggi. Komitmen pimpinan, legalitas tim pelaksana, hingga pelaporan hasil kegiatan tersedia secara lengkap dan terstruktur (Nilai 1 pada semua item).

Hasil evaluasi ini membuktikan bahwa budaya kerja sehat dapat diwujudkan secara utuh apabila didukung oleh sistem manajemen yang kuat dan ketersediaan sumber daya yang dikelola dengan presisi. BUMN di Kabupaten Pasuruan layak dijadikan benchmarking atau tolok ukur utama bagi instansi pemerintah dalam hal penerapan budaya kesehatan lingkungan kerja yang komprehensif.

5. Bupati Pasuruan

Posisi Bupati Pasuruan dalam struktur Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bukan sekadar sebagai pelaksana, melainkan sebagai pemegang otoritas kebijakan tertinggi (*Top Policy Maker*) yang menentukan arah pembangunan kesehatan daerah.

Dalam matriks perencanaan strategis Tahun 2025, Bupati Pasuruan memiliki mandat 4 (empat) Kegiatan Utama yang bersifat makro-struktural. Kegiatan ini difokuskan pada penciptaan ekosistem lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat, meliputi:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, yang mencakup penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), jalur sepeda, serta jalur pejalan kaki yang representatif dan aman. Keberhasilan intervensi fisik ini diukur melalui indikator jumlah desa di kabupaten yang masyarakatnya aktif melaksanakan olahraga secara komunal.
2. Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan indikator kinerja berupa terlaksananya kebijakan KTR secara efektif di wilayah Kabupaten Pasuruan.
3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah, yang dievaluasi berdasarkan jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang aktif memanfaatkan pekarangan rumahnya.
4. Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung GERMAS berdasarkan kebijakan daerah (termasuk mengacu pada Standar Pelayanan Minimal/SPM kabupaten), dengan indikator jumlah kegiatan pendukung dan ketersediaan laporan pelaksanaan GERMAS di wilayahnya.

Perlu dilaporkan bahwa dalam dokumen matriks data yang tersedia, kolom Sub Kegiatan, Alokasi Anggaran, serta Realisasi Anggaran (Semester I dan II) untuk pos Bupati Pasuruan tercatat kosong. Hal ini mengindikasikan bahwa peran Bupati lebih ditekankan pada aspek regulasi dan instruksi kebijakan, sementara eksekusi anggaran teknis kemungkinan besar terdistribusi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Beralih ke tinjauan implementasi internal pada Sekretariat/Kantor Bupati Pasuruan yang berpusat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Raya Raci Km. 09. Sebagai etalase utama wajah birokrasi daerah, instansi ini mencatatkan performa impresif berdasarkan evaluasi mandiri dengan skor akumulatif sebesar 34 (Kategori Baik). Capaian ini menempatkan Kantor Bupati sebagai instansi dengan skor tertinggi di antara seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi, menegaskan fungsinya sebagai pusat komando sekaligus teladan (*role model*) bagi instansi di bawahnya.

Secara teknis, Kantor Bupati Pasuruan menunjukkan performa sempurna pada hampir seluruh klaster. Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A), seluruh indikator bernilai positif (100%): pelaksanaan senam rutin "Ayo Bergerak", ketersediaan fasilitas olahraga, peregangan otot (*stretching*) terjadwal, hingga pembudayaan penggunaan tangga, semuanya berjalan optimal.

Keunggulan manajerial juga terlihat sangat menonjol pada Klaster Pengelolaan (Klaster II). Berbeda dengan mayoritas OPD teknis yang kerap lemah dalam aspek legalitas, Kantor Bupati telah memiliki instrumen lengkap: Komitmen Pimpinan, SK Tim Pelaksana, Dokumen Perencanaan Terintegrasi, dan Jadwal Monitoring & Evaluasi seluruhnya tersedia (Nilai 1). Hal ini menunjukkan bahwa di ring satu pemerintahan, GERMAS bukan sekadar imbauan lisan, melainkan kebijakan yang terlembaga secara formal.

Satu-satunya celah yang membuat skor ini tidak mencapai angka maksimal (35) terdapat pada Klaster Pemantauan dan Evaluasi (Klaster III), khususnya pada indikator "Adanya pelaporan hasil kegiatan" yang masih kosong. Meskipun kegiatan pemantauan rutin sudah berjalan (Nilai 1), tampaknya kodifikasi hasil pemantauan tersebut ke dalam dokumen laporan tertulis yang terstandar belum tuntas. Namun

secara keseluruhan, profil Kantor Bupati Pasuruan merefleksikan kesiapan infrastruktur, manajemen, dan kultur yang sangat matang.

6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan memiliki mandat strategis dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan daerah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi mandiri pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tahun 2025, implementasi internal di tubuh instansi ini masih menunjukkan capaian yang moderat dengan total skor 20. Terdapat divergensi yang cukup tajam antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan rutinitas pelaksanaan kegiatan fisik pegawai.

Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik, Dispora tercatat telah memenuhi indikator penyediaan dan pemanfaatan fasilitas olahraga di tempat kerja, sebuah kondisi yang sejalan dengan fungsi instansi sebagai pengelola sarana keolahragaan. Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut belum dikonversi menjadi rutinitas kebugaran pegawai yang terstruktur. Evaluasi mencatat bahwa kegiatan senam bersama ("Ayo Bergerak") tidak dilaksanakan secara rutin mingguan, peregangan otot pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB tidak berjalan, serta belum adanya kebijakan anjuran penggunaan tangga bagi pegawai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebugaran internal.

Dalam aspek edukasi dan promosi kesehatan (Klaster F), Dispora telah memanfaatkan teknologi informasi secara baik untuk penyebaran pesan kesehatan dan melakukan orientasi kepada pekerja sebagai agen perubahan. Kendati demikian, kegiatan penyuluhan langsung terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja belum dilaksanakan, yang menandakan orientasi promosi kesehatan masih berfokus ke luar dibandingkan penguatan internal. Sorotan utama lainnya terletak pada aspek Manajemen dan Tata Kelola (Klaster II dan III). Meskipun Komitmen Pimpinan dinyatakan ada (Nilai: 1), instrumen pendukung administrasi tercatat lemah: belum memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana GERMAS, tidak memiliki dokumen perencanaan terintegrasi, serta tidak melakukan pemantauan rutin. Mekanisme akuntabilitas hanya terlihat pada pelaporan hasil kegiatan tanpa siklus perencanaan yang sistematis.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 yang berdampak pada masyarakat luas, Dispora mengelola sejumlah kegiatan strategis dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, pada Kegiatan Utama Kampanye gemar olahraga, Dispora melaksanakan Sub Kegiatan yang komprehensif yakni "Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional". Kinerja kegiatan ini diukur melalui indikator "Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata" dengan target capaian yang tercatat di kolom Semester II sebanyak 2.823 peserta. Dukungan finansial untuk kegiatan ini sangat signifikan, dengan Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp5.881.768.500,-. Penyerapan anggaran menunjukkan progresivitas yang tinggi, dimana Realisasi Semester I tercatat sebesar Rp1.147.471.800,- dan meningkat tajam pada Realisasi Semester II menjadi Rp3.940.002.211,-.

Kedua, untuk Kegiatan Utama Fasilitas penyelenggaraan olahraga masyarakat, fokus diarahkan pada Sub Kegiatan "Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota". Indikator kinerja yang ditetapkan adalah "Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi" dengan target volume sebanyak 9 kegiatan/fasilitas. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp3.424.356.300,-. Pola realisasi anggarannya adalah Rp149.500.000,- pada Semester I, dan melonjak signifikan pada Semester II dengan angka realisasi mencapai Rp1.983.354.350,-.

Ketiga, pada Kegiatan Utama Fasilitas penyediaan sarana olahraga masyarakat, terdapat Sub Kegiatan "Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan". Indikator keberhasilannya diukur dari "Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi" dengan target sebanyak 4 unit/fasilitas. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp473.815.100,-. Berdasarkan data tabel, kolom Realisasi Semester I dibiarkan kosong (tidak tercatat/Rp0,-), sedangkan Realisasi Semester II tercatat sebesar Rp143.158.400,-.

Keempat, masih dalam kerangka fasilitasi sarana namun dengan spesifikasi berbeda, terdapat indikator "Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus". Kegiatan ini dilaksanakan di bawah payung Sub Kegiatan "Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional". Target kinerja untuk indikator ini adalah 1 kegiatan/fasilitasi. Dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp50.000.000,-, kegiatan ini tidak mencatatkan penyerapan pada awal tahun (Realisasi Semester I: Rp0), namun terserap penuh pada akhir tahun dengan Realisasi Semester II sebesar Rp50.000.000,-.



Gambar 2.7 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik



Gambar 2.8 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik

7. Dinas Kesehatan

Sebagai leading sector dan pengampu utama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan memikul beban ekspektasi strategis untuk menjadi teladan paripurna bagi instansi lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri tahun 2025, Dinkes berhasil menjawab ekspektasi tersebut dengan raihan skor agregat 34 (Kategori Sangat Baik). Capaian ini menempatkan Dinkes di jajaran teratas kepatuhan implementasi GERMAS bersama Kantor Bupati dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Kekuatan utama Dinkes terletak pada aspek tata kelola dan budaya organisasi yang solid. Pada Klaster Pengelolaan (Klaster II) dan Klaster Pemantauan (Klaster III), Dinkes berhasil menyapu bersih seluruh indikator dengan nilai sempurna (100%). Indikator keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan komponen manajerial yang

lengkap, meliputi komitmen pimpinan, penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, dokumen perencanaan yang terintegrasi, hingga mekanisme pelaporan hasil kegiatan yang tertib. Hal ini menegaskan posisi Dinkes sebagai center of excellence yang memiliki sistem manajemen kesehatan kerja yang mapan.

Namun, terdapat satu anomali menarik pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A). Meskipun fasilitas olahraga tersedia dan senam rutin berjalan, Dinkes justru mencatatkan nilai nol pada aktivitas peregangan otot (stretching). Indikator pelaksanaan peregangan pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB, yang seharusnya menjadi standar ergonomi bagi pekerja kantor, justru terlewatkan dalam rutinitas harian. Fenomena ini menjadi kritik otokritik bahwa kesibukan pelayanan teknis kesehatan seringkali membuat aparat kesehatan mengabaikan jeda relaksasi fisik bagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, secara agregat, profil Dinkes tetap merepresentasikan standar role model yang layak direplikasi, dengan catatan perlunya re-aktivasi alarm peregangan otot di lingkungan internal kantor.

Beralih pada kinerja program dan anggaran tahun 2025, Dinas Kesehatan mengelola sejumlah kegiatan strategis dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, pada Kegiatan Utama Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan sub kegiatan Pengelolaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinkes menetapkan target indikator berupa "Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimum 5 tema kampanye" dengan target volume capaian sebanyak 8 Kegiatan. Untuk mendukung kegiatan ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.589.581.800,-. Pola penyerapan anggaran menunjukkan konsentrasi di akhir tahun, di mana Realisasi Semester I tercatat Rp0,- sedangkan Realisasi Semester II melonjak signifikan mencapai Rp1.349.629.695,-.

Kedua, upaya Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dijalankan melalui sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR, dengan target volume sebanyak 4 kegiatan. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp175.375.000,-, realisasi keuangan menunjukkan dinamika yang fluktuatif, yakni sebesar Rp625.000,- pada Semester I dan meningkat menjadi Rp152.795.852,- pada Semester II.

Ketiga, dalam Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), terdapat dua indikator kunci yang dijalankan di bawah sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemberdayaan Masyarakat. Indikator pertama adalah "Persentase posyandu aktif" dengan target capaian 98,40%, dan indikator kedua adalah "Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk kesehatan" dengan target 365 Desa. Untuk kedua indikator ini, pagu anggaran yang disediakan adalah Rp126.912.000,-. Realisasi anggaran pada Semester I tercatat Rp0,-, namun pada Semester II telah terserap sebesar Rp118.410.010,-.

Keempat, kegiatan Sosialisasi gemar beraktivitas fisik yang juga berada di bawah sub kegiatan Pengelolaan Promosi Kesehatan, menargetkan indikator "Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik" sebanyak 3 Kegiatan. Anggaran kegiatan ini terintegrasi dengan pos kampanye GERMAS sebesar Rp1.589.581.800,- dengan realisasi Semester II sebesar Rp1.349.629.695,-.

Kelima, fokus pada Pendidikan mengenai gizi seimbang dilaksanakan melalui dua jalur. Jalur pertama menargetkan "Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui" sebanyak 36 orang, namun tidak tercatat adanya alokasi anggaran maupun realisasi (Rp0,-) pada pos ini. Jalur kedua adalah "Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif" melalui sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, dengan target 5 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk kampanye ASI adalah Rp67.054.000,-, dengan Realisasi Semester I sebesar Rp0,- dan Realisasi Semester II sebesar Rp58.291.668,-.

Keenam, program Deteksi dini penyakit dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Usia Produktif. Indikator "Jumlah Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini" mencatatkan target numerik sebesar 7251. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp125.000.000,-, dengan serapan yang mulai berjalan sejak awal tahun, yakni Rp11.131.800,- pada Semester I dan Rp98.217.118,- pada Semester II. Selain itu, terdapat indikator "Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini" dengan target 2 dokumen/pedoman, namun tidak tercatat alokasi anggaran spesifik pada baris data tersebut.

Ketujuh, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. Dengan indikator "Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM", ditetapkan target sebanyak 3 kegiatan. Program ini memiliki alokasi anggaran terbesar yakni Rp2.621.636.000,-. Namun, data menunjukkan kesenjangan realisasi yang sangat tajam, di mana Realisasi Semester I adalah Rp0,- dan Realisasi Semester II hanya tercatat Rp19.035.000,- dari total pagu miliaran rupiah yang dianggarkan.

8. Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan memegang mandat strategis sebagai garda terdepan dalam penjaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam ekosistem Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Disnaker memiliki peran ganda yang krusial: sebagai regulator yang mendorong penerapan budaya sehat di sektor industri/swasta, sekaligus sebagai entitas birokrasi yang wajib menerapkan standar kesehatan internal.

Ditinjau dari aspek perencanaan programatik eksternal tahun 2025, Disnaker memiliki 5 (lima) Kegiatan Utama yang dirancang untuk mengintervensi sektor ketenagakerjaan. Rincian kegiatan beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja, dengan indikator kinerja berupa jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
2. Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja, yang diukur melalui indikator jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin.
3. Fasilitas penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja, dengan tolok ukur jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui yang layak.
4. Fasilitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja, dengan indikator jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan KTR di area kerja.

5. Sosialisasi kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal pelaksanaan GERMAS di tingkat desa, yang diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam dokumen matriks pelaporan Tahun Anggaran 2025 yang tersedia saat ini, kolom Sub Kegiatan, Alokasi Anggaran, serta Realisasi Anggaran (Semester I dan II) masih tercatat kosong atau belum menyajikan data numerik. Oleh karena itu, analisis efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dilakukan pada tahap pelaporan ini.

Beralih pada evaluasi implementasi internal, Dinas Ketenagakerjaan mencatatkan hasil evaluasi mandiri tahun 2025 dengan Skor Total 25 (Kategori Cukup). Profil kepatuhan Disnaker menunjukkan pola dikotomi yang kontras antara kesiapan manajerial di sektor hulu dengan ketidakhadiran pelaporan di sektor hilir.

Kekuatan fundamental Disnaker terletak pada Klaster Pengelolaan (Klaster II), di mana instansi ini berhasil meraih nilai sempurna (100%). Seluruh instrumen administratif seperti Komitmen Pimpinan, Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, Dokumen Perencanaan, hingga Jadwal Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah tersedia secara lengkap. Hal ini menegaskan bahwa secara administratif, Disnaker memiliki landasan yang sangat kokoh untuk melaksanakan program GERMAS.

Paradoks terjadi pada aspek operasional fisik dan pelaporan. Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A), Disnaker harus mengakui ketiadaan fasilitas olahraga yang memadai (Nilai 0), meskipun secara praktik kegiatan senam dan peregangan (*stretching*) tetap diupayakan terlaksana. Kelemahan paling signifikan ditemukan pada Klaster Pemantauan dan Evaluasi (Klaster III), di mana indikator kegiatan pemantauan rutin dan pelaporan hasil kegiatan tercatat kosong/nihil.

Kondisi ini menciptakan ironi tersendiri: Disnaker memiliki dokumen rencana monitoring yang lengkap (sebagaimana tercatat di Klaster II), namun tidak memiliki bukti *output* pelaporan faktual (di Klaster III). Kesenjangan antara rencana di atas kertas dengan dokumentasi kinerja di lapangan ini menjadi catatan evaluasi utama. Sebagai instansi yang seharusnya menjadi barometer standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan swasta, Disnaker didorong untuk segera

membenahi sistem pelaporan internalnya agar selaras dengan standar kepatuhan yang diharapkan.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan, yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 9, Bangil, memiliki peran vital dalam diseminasi informasi daerah. Dengan dukungan sumber daya manusia sebanyak 68 pegawai yang didominasi oleh perempuan (46 perempuan dan 22 laki-laki), instansi ini memiliki potensi besar untuk menjadi model lingkungan kerja yang sehat dan responsif gender. Namun, berdasarkan evaluasi mandiri tahun 2025, implementasi GERMAS di internal Diskominfo masih berada pada kategori kurang optimal dengan capaian nilai total hanya 13 poin.

Pada aspek fisik dan lingkungan, Diskominfo menunjukkan kepatuhan dasar yang baik dalam hal sanitasi. Ketersediaan akses air minum aman, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengelolaan limbah domestik, serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berjalan sesuai standar. Selain itu, mengingat dominasi pegawai perempuan, instansi ini telah menyediakan ruang menyusui (laktasi), sebuah langkah progresif dalam pemenuhan hak pekerja perempuan. Aktivitas fisik berupa senam bersama juga tercatat dilaksanakan minimal satu kali seminggu, meskipun dukungan infrastruktur fisik seperti fasilitas olahraga maupun rutinitas peregangan di sela jam kerja belum tersedia.

Namun, terdapat kesenjangan yang mencolok pada klaster edukasi dan deteksi dini. Sebagai dinas yang membidangi informasi, Diskominfo tercatat aktif melakukan kampanye kesehatan melalui media massa (eksternal), namun ironisnya, internalisasi pesan kesehatan kepada pegawai sendiri justru minim. Indikator pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran konten kesehatan internal, orientasi agen perubahan, serta penyuluhan PHBS di tempat kerja tercatat belum dilaksanakan. Hal ini diperburuk dengan belum adanya skema skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), pemeriksaan kesehatan mental, maupun penyediaan pangan sehat (buah/sayur) dalam kegiatan kantor.

Kelemahan paling mendasar dalam evaluasi ini terletak pada dimensi manajemen dan tata kelola. Seluruh indikator pada klaster pengelolaan dan

pemantauan bernilai negatif. Diskominfo tercatat belum memiliki komitmen pimpinan tertulis, tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana GERMAS, serta nihil dalam perencanaan, pemantauan, maupun pelaporan kegiatan. Ketiadaan struktur tata kelola ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan GERMAS yang sudah ada seperti senam dan sanitasi berjalan secara parsial tanpa desain program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang berpusat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan - Raci, Bangil, merupakan salah satu Perangkat Daerah dengan struktur organisasi yang besar. Mengampu beban kerja operasional yang tinggi dengan dukungan 313 pegawai (263 laki-laki dan 50 perempuan), DLH memegang peran sentral dalam pelestarian kualitas lingkungan daerah. Namun, berdasarkan evaluasi internal, integrasi budaya hidup sehat di lingkungan kerja DLH masih menghadapi tantangan serius dengan total capaian nilai hanya 16 poin.

Keunggulan implementasi GERMAS di DLH terlihat sangat menonjol pada klaster yang beririsan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni Peningkatan Kualitas Lingkungan. Indikator sanitasi dasar seperti ketersediaan air bersih, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengelolaan sampah/limbah domestik, serta penerapan budaya 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) telah terpenuhi dengan baik. Selain itu, penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga berjalan efektif.

Di sisi lain, terdapat kekosongan total pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik. Meskipun memiliki jumlah pegawai yang besar, DLH tercatat belum melaksanakan senam rutin, tidak menyediakan fasilitas olahraga, dan tidak menerapkan peregangan di sela jam kerja. Kelemahan paling krusial terletak pada aspek Manajemen dan Tata Kelola (Klaster II dan III) yang seluruh indikatornya bernilai nol; tidak ada Komitmen Pimpinan tertulis, tidak ada SK Tim Pelaksana, serta nihil dokumen perencanaan. Absennya struktur tata kelola ini menyebabkan pelaksanaan indikator sanitasi yang sudah baik cenderung berjalan secara sektoral (tupoksi rutin), bukan sebagai bagian dari gerakan budaya kerja sehat yang terintegrasi.

Beralih pada kinerja program eksternal tahun 2025, DLH memfokuskan anggarannya pada upaya pengurangan sampah dan pemberdayaan kemitraan lingkungan dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, terkait Kegiatan Utama "Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil", tabel menunjukkan data yang kosong. Tidak ada sub kegiatan, target semester, maupun alokasi anggaran yang tercatat (tanda strip/-) untuk indikator pengurangan merkuri ini.

Kedua, prioritas utama terlihat pada Kegiatan Utama "Pemanfaatan bank sampah" dengan indikator kinerja "Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari". Sub Kegiatan yang dijalankan adalah "Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah". Target kinerja fisik yang ditetapkan sangat masif, yakni 20000 Ton pada Semester II. Dukungan anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp901.804.745,-. Realisasi anggaran berjalan sepanjang tahun, dengan rincian Realisasi Semester I sebesar Rp116.914.700,- dan meningkat signifikan pada Realisasi Semester II menjadi Rp781.856.270,-.

Ketiga, pada Kegiatan Utama "Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat", DLH menjalankan tiga Sub Kegiatan spesifik untuk mendukung indikator jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam:

1. Sub Kegiatan "Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH". Target capaian ditetapkan sebanyak 3 dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp14.082.800,-. Realisasi Semester I tercatat 0, sedangkan Realisasi Semester II terserap sebesar Rp13.514.300,-.
2. Sub Kegiatan "Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup". Kegiatan ini menargetkan output berupa 4 dokumen. Pagu anggaran dialokasikan sebesar Rp89.824.900,-. Penyerapan anggaran terdistribusi pada Realisasi Semester I sebesar Rp11.287.500,- dan Realisasi Semester II sebesar Rp55.950.181,-.

3. Sub Kegiatan "Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Target sasaran kegiatan ini adalah 4 entitas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp42.880.400,-. Pola realisasi menunjukkan kekosongan di awal tahun (Semester I: 0), namun terserap pada Realisasi Semester II sebesar Rp39.664.040,-.



Gambar 2.9 Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 2.10 Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan

11. Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan memegang peran strategis dalam mengintegrasikan promosi destinasi wisata dengan gaya hidup sehat melalui konsep *Sport Tourism*. Dalam kerangka implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun Anggaran 2025, instansi ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada aktivasi *event* olahraga yang berdampak ganda (*multiplier effect*).

Secara programatik, Dinas Pariwisata mengalokasikan sumber daya utamanya pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, yang secara spesifik difokuskan pada penyelenggaraan Lomba Dayung Perahu Naga. Untuk mendukung agenda strategis ini, dialokasikan Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp300.000.000.

Kinerja keuangan menunjukkan bahwa eksekusi kegiatan ini terkonsentrasi di paruh kedua tahun anggaran. Data realisasi Semester I tercatat kosong, namun pada Semester II terjadi penyerapan anggaran yang sangat optimal sebesar Rp294.000.000. Anggaran tersebut didayagunakan untuk membiayai Kegiatan Utama Penyelenggaraan event olahraga wisata dengan target fisik Semester II sebanyak 1

kali pelaksanaan. Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah *event* olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian dari daya tarik tujuan wisata.

Selain fokus pada *event*, Dinas Pariwisata juga memiliki mandat Kegiatan Utama Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata. Indikator kinerjanya adalah jumlah fasilitas pengadaan toilet bersih di tempat wisata. Namun, perlu dilaporkan bahwa pada dokumen matriks yang tersedia, kolom Sub Kegiatan, Alokasi Anggaran, serta Realisasi untuk item sanitasi ini masih tercatat kosong, sehingga analisis efisiensi biayanya belum dapat dilakukan.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, Dinas Pariwisata yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 09, Bangil, didukung oleh 57 pegawai (43 laki-laki dan 14 perempuan). Instansi ini berhasil mencatatkan skor total 27, dengan keunggulan utama pada budaya aktivitas fisik yang telah terinternalisasi dengan sangat baik.

Berdasarkan evaluasi tahun 2025, Dinas Pariwisata merupakan salah satu dari sedikit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meraih capaian sempurna pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik. Seluruh indikator kunci terlaksana secara konsisten, meliputi pelaksanaan senam rutin ("Ayo Bergerak") setiap minggu, penyediaan fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan kantor, serta kedisiplinan pegawai dalam melakukan peregangan otot pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB. Kebijakan penggunaan tangga sebagai sarana mobilitas fisik juga telah diterapkan, menegaskan komitmen instansi dalam melawan gaya hidup sedenter.

Kinerja positif juga terlihat pada klaster edukasi dan pemantauan. Instansi aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan konten kesehatan kreatif, melakukan orientasi pegawai sebagai agen perubahan, serta rutin menyelenggarakan penyuluhan PHBS. Pada aspek pemantauan, instansi ini tercatat disiplin dalam melakukan kegiatan pemantauan rutin dan pelaporan hasil kegiatan.

Namun, terdapat anomali signifikan pada aspek legalitas dan tata kelola (Klaster II). Meskipun kegiatan di lapangan berjalan sangat aktif, infrastruktur manajerial justru terlihat belum tertib. Indikator Komitmen Pimpinan tertulis, keberadaan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, serta dokumen perencanaan terintegrasi tercatat belum terpenuhi (Nilai: 0). Hal ini mengindikasikan bahwa

implementasi GERMAS di Dinas Pariwisata lebih didorong oleh budaya kerja organik dan inisiatif operasional, namun belum dipayungi oleh legalitas administratif yang formal.



Gambar 2.11 Kluster Peningkatan
Perilaku Hidup Sehat



Gambar 2.12 Kluster Peningkatan
Kualitas Lingkungan

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci Km. 09, Bangil, memainkan peran sentral dalam orkestrasi pembangunan kesehatan berbasis komunitas di tingkat desa.

Ditinjau dari perspektif perencanaan eksternal dalam matriks GERMAS Tahun 2025, DPMD memfokuskan intervensinya pada fungsi pengawalan kebijakan. Kegiatan Utama yang diemban adalah Sosialisasi kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana untuk memastikan GERMAS berjalan di level pemerintahan desa.

Secara spesifik, operasionalisasi kegiatan ini dituangkan dalam Sub Kegiatan melaksanakan monev posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal). Nomenklatur ini menegaskan bahwa fokus DPMD adalah memastikan Posyandu sebagai garda terdepan kesehatan desa memenuhi standar layanan minimum yang ditetapkan.

Namun, perlu dilaporkan secara objektif bahwa dalam dokumen matriks data yang tersedia saat ini, kolom Target Semester II, Alokasi Anggaran Tahun 2025, serta

Realisasi Anggaran (Semester I dan II) tercatat kosong atau tidak diisi. Hal ini membatasi kemampuan untuk menganalisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness*) dari kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Posyandu tersebut pada tahap pelaporan ini.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, DPMD didukung oleh kekuatan personel sebanyak 37 pegawai yang terdiri dari 22 laki-laki dan 15 perempuan. Instansi ini mencatatkan capaian kinerja implementasi GERMAS yang cukup baik pada aspek pembudayaan aktivitas fisik, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek pemeriksaan kesehatan klinis.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri tahun 2025, budaya gerak tubuh di lingkungan DPMD telah berjalan cukup dinamis. Berbeda dengan beberapa OPD lain yang sering terkendala dalam rutinitas harian, DPMD tercatat disiplin melaksanakan peregangan otot di sela jam kerja pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB, serta rutin menggelar senam bersama ("Ayo Bergerak") setiap minggu. Upaya melawan gaya hidup sedenter juga didukung dengan kebijakan penggunaan tangga, meskipun instansi ini mengakui belum memiliki fasilitas olahraga khusus yang permanen di area kantor.

Kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan juga tergolong tinggi. DPMD telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara efektif, menyediakan akses air minum aman, serta mengelola sanitasi dan limbah domestik dengan prinsip 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat). Dukungan nutrisi bagi pegawai juga telah diupayakan melalui penyediaan konsumsi buah dan sayur dalam setiap agenda rapat, walau keberadaan kantin sehat internal masih menjadi indikator yang belum terpenuhi.

Namun, evaluasi menyoroti adanya kekosongan yang signifikan pada Klaster Pemeriksaan Kesehatan (Klaster E). Seluruh indikator terkait deteksi dini medis bernilai negatif; DPMD tercatat belum memfasilitasi pemeriksaan kesehatan berkala, tidak melakukan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), serta belum menyentuh aspek skrining kesehatan mental bagi pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus kesehatan pegawai masih bertumpu pada aktivitas fisik luar, namun belum diimbangi dengan pemantauan kondisi medis klinis.

Secara manajerial, pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Komitmen Pimpinan yang telah dinyatakan ada, serta berjalannya mekanisme pemantauan (*monitoring*) rutin. Kendati demikian, legalitas formal berupa Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana dan dokumen perencanaan terintegrasi masih belum tersedia, yang menjadi celah administratif dalam menjamin keberlanjutan program jangka panjang.



Gambar 2.13 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik



Gambar 2.14 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik

13. DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Raci, memegang peran sentral dalam pembangunan manusia, khususnya pada sektor ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Dalam kerangka implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun Anggaran 2025, DP3AP2KB menunjukkan kinerja programatik yang sangat ekspansif dan terukur. Berdasarkan dokumen perencanaan, instansi ini mengelola sejumlah Sub Kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang signifikan.

Fokus pertama terletak pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera. Untuk mendukung sub kegiatan ini, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp111.500.000. Realisasi anggaran menunjukkan pola penyerapan awal yang tinggi, yakni Rp86.400.000 pada Semester I, dan Rp25.100.000 pada Semester II. Anggaran ini digunakan untuk mendukung Kegiatan Utama Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan konseling remaja

(PIK-R). Indikator kinerjanya mencakup tiga dimensi: (a) Presentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi, (b) Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling, serta (c) Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan. Secara spesifik pada Semester II, target fisik yang ditetapkan adalah terlaksananya 1 kali pertemuan dan pembinaan terhadap 1 kelompok.

Fokus kedua adalah intervensi pengendalian penduduk melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Ini merupakan pos anggaran terbesar dalam matriks GERMAS dinas ini, dengan alokasi mencapai Rp1.716.381.000. Pola realisasi anggaran menunjukkan akselerasi masif di akhir tahun, dimana Semester I terealisasi sebesar Rp345.743.000, sedangkan Semester II melonjak drastis menjadi Rp1.370.638.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan Penggerakan pelayanan KB MKJP dengan target Semester II berupa 2 kali momentum kegiatan. Indikator keberhasilannya diukur secara kuantitatif melalui jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW).

Selain itu, DP3AP2KB juga menjalankan fungsi edukasi melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan KIE di Tingkat Desa. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.078.200.000, instansi ini mencatatkan konsistensi penyerapan anggaran yang presisi, terbagi rata masing-masing Rp539.100.000 pada Semester I dan Semester II. Kegiatan utama yang dilakukan adalah Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak, dengan target fisik Semester II sebanyak 5 kali kegiatan.

Di luar kegiatan beranggaran di atas, instansi juga memiliki mandat kegiatan Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) dengan indikator jumlah kegiatan promosi, meskipun pada dokumen ini belum tercantum alokasi anggaran spesifik untuk item tersebut.

Pada dimensi internal kelembagaan, DP3AP2KB didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 65 orang (35 laki-laki dan 30 perempuan). Berdasarkan evaluasi mandiri tahun 2025, instansi ini berhasil mencatatkan skor total 30, menempatkannya dalam kategori pelaksana GERMAS yang sangat baik.

Keunggulan utama DP3AP2KB terletak pada kesempurnaan aspek Manajemen dan Tata Kelola (Klaster II). Berbeda dengan banyak OPD lain yang lemah di sektor administrasi, DP3AP2KB telah melengkapi seluruh instrumen legalitas, mulai dari Komitmen Pimpinan tertulis, penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, penyusunan dokumen perencanaan terintegrasi, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala. Keteraturan administratif ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan program kesehatan.

Pada aspek aktivitas fisik, budaya hidup sehat telah berjalan aktif. Pegawai tercatat rutin melaksanakan senam bersama ("Ayo Bergerak") setiap minggu serta disiplin melakukan peregangan otot pada jam kerja. Kebijakan penggunaan tangga sebagai pengganti lift juga diterapkan untuk mendorong mobilitas fisik. Satu-satunya catatan adalah indikator fisik penyediaan fasilitas olahraga khusus di tempat kerja yang bernilai nol, yang kemungkinan besar terkendala oleh keterbatasan infrastruktur ruang.

Di sektor kesehatan lingkungan dan edukasi, DP3AP2KB menunjukkan performa solid dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan kesehatan (konten kreatif/grup WA), melakukan orientasi pegawai sebagai agen perubahan, serta memastikan lingkungan kerja bebas asap rokok (KTR). Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi dinas yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan keluarga, menjadikan instansi ini sebagai *role model* internal yang konsisten.



Gambar 2.15 Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat



Gambar 2.16 Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik

14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, yang menempati Gedung "Wak Muqidin" di Kompleks Perkantoran Raci, merupakan salah satu instansi dengan basis sumber daya manusia terbesar dalam sampel evaluasi ini, yakni 107 pegawai yang terdiri dari 66 laki-laki dan 41 perempuan. Besarnya populasi pegawai ini diimbangi dengan kultur aktivitas fisik yang sangat kuat, di mana Dinas Pendidikan berhasil meraih nilai sempurna pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik. Seluruh indikator gerak tubuh terpenuhi dengan presisi: senam "Ayo Bergerak" dilaksanakan rutin, fasilitas olahraga tersedia dan dimanfaatkan, peregangan otot dilakukan disiplin dua kali sehari, serta himbauan penggunaan tangga berjalan efektif. Kondisi ini mencerminkan karakter instansi pendidikan yang dinamis dan energik, didukung oleh fasilitas penunjang seperti Kantin Sehat dan kotak P3K yang tersedia memadai.

Namun, terdapat sebuah ironi pada aspek fasilitas edukasi dan inklusivitas di lingkungan kerja. Berdasarkan data evaluasi, Dinas Pendidikan justru belum menyediakan Sudut Baca/Perpustakaan di ruang tunggu pelayanan, serta belum memiliki Ruang Laktasi (ASI) bagi pegawai perempuan. Selain itu, aspek pemantauan kesehatan klinis (Klaster D) masih sepenuhnya kosong; tidak ada pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT), tidak ada pemeriksaan kesehatan berkala, dan tidak ada skrining kesehatan mental, yang menjadi catatan kritis mengingat tingginya beban kerja di sektor pendidikan. Kelemahan lain yang cukup menonjol terletak pada aspek tata kelola (Klaster II), di mana bukti formalitas administrasi sangat minim. Dinas Pendidikan belum memiliki SK Tim Pelaksana GERMAS, dokumen perencanaan terintegrasi, maupun laporan formal, yang mengindikasikan pelaksanaan GERMAS masih bersifat organik namun belum terlembaga dalam sistem manajemen baku.

Beranjak pada akuntabilitas kinerja program eksternal tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan serangkaian kegiatan strategis dengan dinamika penganggaran yang bervariasi sebagai berikut:

Pertama, pada Kegiatan Utama Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), indikator kinerja difokuskan pada "Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan". Sub kegiatan yang dilaksanakan secara spesifik adalah "Pembangunan UKS/ Rehab UKS". Target capaian fisik pada Semester II ditetapkan sebanyak 3

Ruang. Untuk merealisasikan target tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp264.980.000,-. Pola penyerapan anggaran menunjukkan realisasi nihil pada Semester I (tanda strip/-), namun terserap secara optimal pada Realisasi Semester II sebesar Rp263.286.108,-.

Kedua, terkait Kegiatan Utama Penerapan KTR di sekolah dengan indikator "Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR", Dinas Pendidikan memberikan catatan administratif khusus pada kolom Sub Kegiatan. Tertulis penjelasan eksplisit: "Setiap Sekolah Ramah Anak menerapkan KTR sedangkan kita di OPD tidak ada anggaran untuk SRA/KTR". Konsisten dengan catatan tersebut, kolom target semester, alokasi anggaran, dan realisasi dibiarkan kosong (tanda strip/-).

Ketiga, untuk Kegiatan Utama Penerapan Sekolah Ramah Anak dengan indikator "Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)", kondisi serupa kembali ditemukan. Pada kolom Sub Kegiatan tertulis keterangan status: "Semua Sekolah di Kab. Pasuruan sudah SRA berdasarkan SK SRA Tahun 2025. akan tetapi kita tidak ada anggaran terkait SRA". Akibat ketiadaan alokasi anggaran tersebut, kolom target dan realisasi keuangan juga tercatat kosong (tanda strip/-).

Keempat, pada Kegiatan Utama Pendidikan keluarga untuk hidup sehat dengan indikator "Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat", seluruh kolom data mulai dari sub kegiatan, target semester, alokasi anggaran, hingga realisasi tercatat kosong (tanda strip/-), yang mengindikasikan tidak adanya pelaksanaan kegiatan pada pos ini.

Kelima, kinerja signifikan terlihat pada Kegiatan Utama Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah. Pada indikator "a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah", dilaksanakan Sub Kegiatan berupa "Pavingisasi Halaman Sekolah dan Pembangunan/Rehab Aula Terbuka". Target fisik yang ditetapkan pada Semester II cukup besar, yakni 3 Ruang dan 9 Unit. Dukungan anggaran untuk kegiatan infrastruktur ini mencapai Rp1.901.360.000,-. Realisasi anggaran terkonsentrasi penuh di akhir tahun, dengan Realisasi Semester II terserap 100% sebesar Rp1.901.360.000,-, sementara Semester I tercatat kosong. Namun, untuk indikator "b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan

aktivitas fisik/ olahraga di sekolah", tidak terdapat data sub kegiatan maupun anggaran (tanda strip/-).

Keenam, pada Kegiatan Utama Penyediaan sarana sanitasi sekolah, fokus diarahkan pada indikator "Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah". Sub Kegiatan konkret yang dijalankan adalah "Pembangunan Toilet / Rehab Toilet (Jamban Sehat)". Target volume kegiatan ini pada Semester II adalah sebanyak 8 Ruang. Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp689.000.000,- telah terserap seluruhnya pada Realisasi Semester II dengan angka yang sama persis, yakni Rp689.000.000,-, sedangkan Semester I tercatat kosong.



Gambar 2.17 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik



Gambar 2.18 Kluster Peningkatan
Perilaku Hidup Sehat

15. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Jl. Raya Wonorejo KM 17, Pakijangan, memiliki karakteristik demografi pegawai yang unik dibandingkan OPD lainnya, yakni dominasi laki-laki yang sangat signifikan (122 laki-laki dan 19 perempuan). Profil demografi ini memengaruhi pola implementasi GERMAS di lingkungan kerjanya. Dengan total skor 26, Dinas Perhubungan menempati kategori "Cukup", dengan kekuatan utama pada fasilitas fisik namun masih perlu penguatan pada aspek rutinitas harian dan tata kelola.

Pada aspek aktivitas fisik, Dishub menunjukkan komitmen yang baik dalam penyediaan infrastruktur. Instansi ini tercatat memiliki dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja serta rutin menyelenggarakan senam bersama. Namun, terdapat kesenjangan pada aktivitas harian; kegiatan peregangan otot (*stretching*)

pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB tercatat tidak dilaksanakan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh ritme kerja operasional lapangan yang dinamis, sehingga sulit menyeragamkan waktu untuk peregangan bersama. Di sisi manajemen (Klaster II), terdapat anomali di mana Dishub memiliki dokumen Perencanaan Terintegrasi dan Komitmen Pimpinan, namun belum memiliki SK Tim Pelaksana dan tidak melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), yang mengindikasikan eksekusi program belum memiliki wadah formal.

Dalam hal kinerja program pembangunan tahun 2025 yang berdampak pada keselamatan dan aktivitas fisik masyarakat luas, Dinas Perhubungan mengelola dua Kegiatan Utama dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, pada Kegiatan Utama "Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda", terdapat dua indikator kinerja yang dilaksanakan:

1. Indikator "Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan". Sub kegiatan yang dijalankan adalah "PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA". Target fisik pada Semester II ditetapkan sebanyak 1475, dengan rincian lokasi spesifik: Ruas Jalan Pandaan - Bangil, Ruas Jalan Gondang Wetan - Winongan, Ruas Jalan Durensewu - Prigen, dan 22 Kecamatan (Kecuali Tosari dan Nguling). Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran terbesar, yakni Rp35.102.737.950,-. Realisasi anggaran terkonsentrasi di akhir tahun, dengan Realisasi Semester II sebesar Rp34.370.111.918,-, sementara Semester I tercatat kosong (tanda strip/-).
2. Indikator "Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda". Anehnya, Sub Kegiatan untuk indikator fisik ini tertulis secara administratif sebagai "Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN". Target capaian ditetapkan 1 lokasi. Alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,-. Serapan anggaran menunjukkan angka Rp49.728.000,- pada Realisasi Semester II, dengan Semester I yang kosong.

Kedua, pada Kegiatan Utama "Konektivitas antar transportasi massal, termasuk 'park and ride' untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat", indikator yang diukur adalah "Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang

terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki". Sub Kegiatan yang menaungi indikator ini bernama "PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA". Target kinerja dirinci sangat spesifik pada Semester II, yaitu "16 Trayek (37 Armada Berbadan Hukum dan 99 Armada tidak Berbadan hukum)". Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 76.213.300,-. Pola realisasi mengikuti tren kegiatan sebelumnya, yaitu kosong pada Semester I, dan terserap sebesar Rp. 76.191.650,- pada Realisasi Semester II.



Gambar 2.19 Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 2.20 Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit

16. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, dengan komposisi pegawai sebanyak 49 orang (terdiri dari 35 laki-laki dan 14 perempuan), mencatatkan skor evaluasi mandiri sebesar 22, yang menempatkannya pada kategori "Cukup". Pola implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di instansi ini menunjukkan karakteristik yang unik: institusi ini tergolong cukup kuat dalam penyediaan fasilitas penunjang kesejahteraan pegawai, namun masih lemah dalam hal formalitas administrasi dan pemantauan kesehatan klinis.

Keunggulan Dinas Perikanan terlihat menonjol pada Klaster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat (Klaster B). Instansi ini telah memenuhi standar lingkungan kerja yang humanis dengan menyediakan Ruang Laktasi bagi ibu menyusui dan Sudut Baca/Perpustakaan untuk pegawai, sebuah fasilitas yang bahkan belum tentu dimiliki oleh OPD dengan skor evaluasi yang lebih tinggi. Selain itu, ketersediaan kotak P3K, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta penyediaan saluran pengaduan

(pelecehan/perundungan) menunjukkan kesadaran yang baik terhadap aspek perlindungan pegawai.

Namun, catatan evaluasi terlihat jelas pada Klaster Peningkatan Kesehatan (Klaster D) dan Tata Kelola (Klaster II & III). Dinas Perikanan belum melaksanakan satu pun indikator pemeriksaan kesehatan; tidak ada pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT), tidak ada skrining kebugaran, tidak ada pemeriksaan medis berkala, maupun skrining kesehatan mental. Hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan pegawai belum dipantau secara medis. Dari sisi manajemen, implementasi GERMAS di Dinas Perikanan tampak berjalan secara natural tanpa bingkai formal yang kuat. Meskipun pimpinan memiliki komitmen, namun instansi ini belum memiliki SK Tim Pelaksana, belum menyusun perencanaan terintegrasi, serta belum melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) maupun pelaporan kegiatan secara tertulis. Absennya struktur formal ini menyebabkan kegiatan promosi kesehatan (seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk edukasi) juga belum tergarap maksimal.

Dalam perspektif kinerja program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 mengelola dua kegiatan utama yang strategis dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, pada Kegiatan Utama Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Dinas Perikanan menetapkan dua indikator kinerja utama. Indikator pertama adalah "Meningkatnya konsumsi ikan nasional" dengan target capaian spesifik yang tertulis pada kolom Semester II yakni "62,97 kg/kapita/tahun (Tahun 2024)". Indikator kedua adalah "Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)". Kegiatan ini dioperasionalkan melalui Sub Kegiatan "PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA". Target lokasi intervensi stunting dirinci secara spesifik pada 3 Desa Lokus Stunting, yaitu: Desa Keduwung Kec. Puspo, Desa Galih Kec. Pasrepan, dan Desa Coban Blimbing Kec. Wonorejo. Untuk mendukung kegiatan strategis ini, Alokasi Anggaran TH 2025 ditetapkan sebesar Rp314.025.200,-. Pola penyerapan anggaran menunjukkan intensitas yang lebih tinggi di awal tahun, dimana Realisasi Semester I mencapai Rp201.078.522,- sedangkan Realisasi Semester II tercatat sebesar Rp105.408.950,-. Kedua, pada Kegiatan Utama Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan,

indikator keberhasilan diukur melalui "Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya". Sub Kegiatan yang menaungi indikator ini adalah "PEMBINAAN TERHADAP PENERAPAN PERSYARATAN PERIJINAN BERUSAHA PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN SESUAI SKALA USAHA DAN RISIKO". Target operasional pengawasan pada Semester II ditetapkan sebanyak 10 Sampel Dari 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Beji, Rejoso, Lekok, dan Kraton. Dukungan anggaran untuk fungsi pengawasan ini dialokasikan sebesar Rp112.023.000,-. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, penyerapan anggaran pada pos ini lebih besar di akhir tahun, dengan rincian Realisasi Semester I sebesar Rp24.628.300,- dan Realisasi Semester II meningkat menjadi Rp86.828.450,-.

17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan memegang mandat strategis dalam menjaga stabilitas kualitas konsumsi masyarakat dan standar industri pangan daerah. Dalam kerangka implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tahun 2025, Disperindag menjalankan peran ganda: sebagai regulator eksternal yang mengawasi keamanan pangan dan industri, serta sebagai entitas birokrasi yang menerapkan budaya hidup sehat secara internal.

Secara programatik, kontribusi eksternal Disperindag dioperasionalkan melalui Sub Kegiatan "Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri". Untuk mendukung agenda ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp195.000.000 pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan data keuangan berjalan, tercatat realisasi pada Semester I sebesar Rp45.550.166, sedangkan untuk Semester II belum terdapat data realisasi yang tercatat dalam dokumen pelaporan.

Anggaran tersebut didayagunakan untuk membiayai 6 (enam) Kegiatan Utama dengan indikator kinerja yang terukur secara spesifik, meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib, dengan indikator capaian berupa terlaksananya standardisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib).

2. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna, pengawet) alami, yang diukur melalui indikator jumlah sosialisasi dan *workshop* peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami.
3. Penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, dengan tolok ukur jumlah kegiatan pembinaan CPPOB produk makanan.
4. Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM), dengan indikator keberhasilan berbasis jumlah peserta sosialisasi PIPIMM.
5. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol, yang diukur melalui jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran/penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
6. Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri, dengan indikator jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk produk produksi dalam negeri.

Beralih pada perspektif internal kelembagaan, Disperindag yang beralamat di Jalan Raya Raci KM 9 Bangil, didukung oleh kekuatan personel sebanyak 71 orang, terdiri dari 41 laki-laki dan 30 perempuan. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri tahun 2025, instansi ini mencatatkan Nilai Total 35, sebuah angka yang mengindikasikan performa yang cukup solid dalam penerapan indikator kesehatan di lingkungan kerja.

Karakteristik implementasi GERMAS di lingkungan internal Disperindag menunjukkan orientasi "Aksi di atas Administrasi". Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A), instansi ini tampil prima dengan rutin melakukan senam bersama ("Ayo Bergerak"), menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja, serta menerapkan anjuran penggunaan tangga secara disiplin. Selain itu, Disperindag tergolong progresif dalam aspek edukasi digital, di mana instansi telah memanfaatkan teknologi informasi melalui penyebaran video edukatif, konten kreatif, dan grup *WhatsApp* untuk akselerasi penyebaran pesan kesehatan.

Namun, sisi administratif formal menjadi celah yang perlu diperbaiki segera. Terdapat paradoks pada aspek Tata Kelola (Klaster II dan III). Secara faktual, Disperindag memiliki Komitmen Pimpinan yang kuat serta aktif melakukan pemantauan rutin dan Monitoring & Evaluasi (Monev). Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut berjalan tanpa landasan dokumen formal yang lengkap; instansi ini tercatat tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana, tidak memiliki dokumen Perencanaan Terintegrasi, dan belum menyusun pelaporan hasil kegiatan secara tertulis. Catatan evaluasi lain juga muncul pada rutinitas harian, di mana kegiatan peregangan otot (*stretching*) pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB belum dilaksanakan, serta belum adanya orientasi kesehatan bagi pekerja sebagai agen perubahan.



Gambar 2.21 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik



Gambar 2.22 Kluster Peningkatan Kualitas
Lingkungan

18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), yang berkantor di Jalan Raya Raci Km 9 Bangil, menunjukkan anomali kinerja yang mencolok antara implementasi lapangan dengan ketertiban administrasi. Dalam lembar evaluasi yang diserahkan, DKPP tidak mencantumkan data demografi pegawai (jumlah laki-laki/perempuan kosong) serta tidak mengisi data penanggung jawab program. Ketidaklengkapan pengisian form dasar ini menjadi indikasi awal lemahnya aspek administratif di instansi ini.

Meskipun demikian, implementasi fisik GERMAS di DKPP tergolong sangat progresif. Berbeda dengan banyak OPD lain yang kesulitan menyediakan fasilitas,

DKPP tercatat telah memiliki Ruang Laktasi, Kantin Sehat, dan menyediakan Snack Buah saat rapat. Budaya aktivitas fisik juga berjalan baik dengan pelaksanaan senam rutin dan peregangan otot (*stretching*) pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB. Bahkan, instansi ini merupakan salah satu dari sedikit OPD yang menyatakan sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala dan skrining kebugaran jasmani, sebuah capaian yang biasanya hanya dimiliki oleh OPD dengan skor manajemen tinggi.

Namun, keunggulan operasional tersebut tidak didukung oleh tata kelola yang memadai (Klaster II dan III). DKPP mencatatkan nilai nol mutlak pada aspek legalitas formal; instansi ini belum memiliki SK Tim Pelaksana, belum menyusun dokumen perencanaan terintegrasi, serta tidak pernah melakukan monitoring dan pelaporan hasil kegiatan. Hal ini menciptakan paradoks di mana kegiatan kesehatan berjalan marak dan fasilitas tersedia lengkap, namun tidak tercatat, tidak dilaporkan, dan tidak memiliki payung hukum internal yang sah.

Satu-satunya celah dalam implementasi kesehatan fisik adalah pada pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT) dan skrining kesehatan mental yang belum dilaksanakan. Namun, secara umum, profil DKPP menggambarkan instansi teknis yang sangat berorientasi pada "kerja nyata" (penyediaan fasilitas dan kegiatan), namun cenderung mengabaikan aspek formalitas birokrasi dan dokumentasi.

19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), yang berlokasi strategis di Gedung Kompleks Perkantoran Raci, didukung oleh kekuatan sumber daya manusia sebanyak 54 pegawai, yang terdiri dari 35 laki-laki dan 19 perempuan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tahun 2025, instansi ini memperoleh skor 24 (kategori Cukup). Profil capaian Disperkim menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara ketersediaan fasilitas fisik dengan konsistensi tata kelola administrasi.

Dari segi infrastruktur (Klaster B), Disperkim patut diapresiasi karena telah menyediakan Ruang Laktasi yang memadai, sebuah fasilitas krusial yang sering terabaikan di dinas teknis. Selain itu, fasilitas dasar seperti kantin sehat, sarana air bersih, pengelolaan sampah, dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah

terpenuhi. Aktivitas fisik pegawai juga berjalan cukup baik dengan adanya rutinitas senam, peregangan otot, dan anjuran penggunaan tangga. Namun, kelemahan fatal terdapat pada Klaster Peningkatan Kesehatan (Klaster D), di mana Disperkim mencatatkan nilai nol untuk seluruh indikator pemeriksaan medis; tidak ada pengukuran kebugaran, cek kesehatan berkala, pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT), maupun skrining kesehatan mental.

Aspek yang menjadi sorotan utama adalah anomali logis pada tata kelola administrasi (Klaster II dan III). Data menunjukkan inkonsistensi di mana Disperkim menyatakan telah memiliki Laporan Hasil Kegiatan dan Perencanaan Terintegrasi, namun secara paradoks mengakui tidak memiliki SK Tim Pelaksana dan tidak melakukan kegiatan pemantauan rutin. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai validitas pelaporan yang disusun tanpa adanya struktur pelaksana resmi dan mekanisme monitoring lapangan yang riil, yang mengindikasikan bahwa pelaporan tersebut mungkin hanya bersifat formalitas administratif.

Beralih pada kinerja program pembangunan tahun 2025, Disperkim memfokuskan kegiatannya pada satu Kegiatan Utama yakni "Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum". Kegiatan ini dijabarkan ke dalam empat indikator kinerja spesifik yang tersebar dalam dua nomenklatur Sub Kegiatan, dengan rincian data sebagai berikut:

Pertama, di bawah payung Sub Kegiatan "Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian", terdapat indikator kinerja "Jumlah pemeliharaan drainase lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum". Target fisik yang ditetapkan pada Semester II adalah 1 lokasi. Kegiatan pemeliharaan ini memiliki Alokasi Anggaran TH 2025 sebesar Rp97.028.689,74. Berdasarkan data realisasi, kolom Semester I dibiarkan kosong, sedangkan pada Realisasi Semester II anggaran terserap sebesar Rp96.732.900,00.

Kedua, masih dalam Sub Kegiatan "Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian", dilaksanakan indikator "Jumlah pembangunan jalan lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum". Target volume kegiatan ini lebih besar, yakni 4 lokasi pada

Semester II. Pagu anggaran yang dialokasikan sangat signifikan, mencapai Rp679.431.000,00. Pola penyerapan anggaran terkonsentrasi di akhir tahun, di mana Realisasi Semester II tercatat sebesar Rp676.238.100,00, sementara Semester I tidak mencatatkan realisasi (kosong).

Ketiga, beralih pada Sub Kegiatan "Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh", Disperkim menjalankan indikator "Jumlah MCK Komunal yang terbangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum". Target capaian fisik pada Semester II adalah 1 lokasi. Untuk pembangunan fasilitas sanitasi komunal ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp145.010.400,-. Serapan anggaran menunjukkan angka Rp144.060.500,- pada Realisasi Semester II, sedangkan pada Semester I tercatat tanda strip (-).

Keempat, juga di bawah Sub Kegiatan "Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh", terdapat indikator "Jumlah jamban yang terbangun sebagai salah satu sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman". Kegiatan ini memiliki target volume terbanyak yakni 19 lokasi pada Semester II. Alokasi Anggaran yang disediakan adalah Rp88.000.000,-. Realisasi anggaran mencatatkan angka Rp87.435.500,- pada Semester II, dengan kolom Semester I yang tercatat tanda strip (-).



Gambar 2.23 Kluster Peningkatan
Aktifitas Fisik



Gambar 2.24 Kluster Peningkatan
Perilaku Hidup Sehat

20. Dinas Sosial

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan memegang mandat krusial dalam penanganan kesejahteraan sosial, dengan pendekatan implementasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang unik pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan matriks perencanaan, Dinsos tampaknya melakukan reorientasi kebijakan dengan meniadakan kegiatan fisik infrastruktur (seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dicoret dalam dokumen), dan memusatkan seluruh daya dukungnya pada Sub Kegiatan 1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Strategi programatik ini dijalankan melalui jejaring Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai ujung tombak edukasi. Terdapat dua Kegiatan Utama yang dilaksanakan secara simultan:

1. Sosialisasi Gernas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk kegiatan ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp27.000.000. Kinerja penyerapan anggaran pada Semester II tercatat sangat presisi dengan realisasi sebesar Rp26.100.360. Anggaran tersebut dikonversi menjadi *output* fisik berupa Pengadaan Flipchart P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) sebagai media edukasi visual bagi Keluarga Penerima Manfaat. Indikator keberhasilannya diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping.
2. Sosialisasi Pertemuan dan Edukasi P2K2 oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini memiliki target volume yang masif, yakni 1.195 Pertemuan dan Edukasi P2K2 yang dilaksanakan oleh pendamping PKH pada Semester II. Indikator kinerjanya menyasar pada jumlah pertemuan P2K2 yang melibatkan 239 SDM. Menariknya, kegiatan dengan volume ribuan pertemuan ini tercatat memiliki Alokasi Anggaran dan Realisasi 0 (Nihil) pada kolom keuangan, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini terintegrasi dengan tugas pokok harian pendamping tanpa pembebanan anggaran tambahan khusus GERMAS.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, Dinas Sosial yang berkantor di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 59A, memiliki komposisi pegawai sebanyak 46 orang (25 laki-laki dan 21 perempuan). Hasil evaluasi mandiri menempatkan Dinsos pada kategori "Cukup" dengan skor total 27. Profil instansi ini menunjukkan pola

dikotomi yang tajam: implementasi aktivitas fisik yang sempurna, namun berbanding terbalik dengan ketiadaan dukungan manajemen formal.

Keunggulan utama Dinsos terletak pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A), di mana instansi ini meraih skor sempurna (100%). Seluruh indikator terpenuhi secara organik: pelaksanaan senam rutin "Ayo Bergerak", ketersediaan fasilitas olahraga, anjuran penggunaan tangga, hingga kedisiplinan pelaksanaan peregangan otot (*stretching*) rutin pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB. Hal ini menandakan budaya gerak tubuh sudah terbentuk sangat baik di kalangan pegawai akar rumput.

Namun, semangat di lapangan ini berjalan tanpa dukungan struktural dari level manajerial. Pada Klaster Pengelolaan (Klaster II), Dinsos secara mengejutkan mengisi nilai nol pada indikator "Komitmen Pimpinan". Ini adalah temuan evaluatif yang langka, di mana instansi mengakui secara jujur belum adanya dukungan formal pimpinan. Konsekuensinya, aspek administratif lainnya pun kosong: tidak ada SK Tim Pelaksana, tidak ada perencanaan terintegrasi, dan tidak ada pelaporan tertulis. Uniknya, meski manajemen dinilai nol, Dinsos mengklaim tetap melakukan "Kegiatan Pemantauan Rutin" (Klaster III), yang kemungkinan besar bersifat informal.

Dari sisi fasilitas kesehatan (Klaster B), Dinsos telah menyediakan kantin sehat, KTR, dan saluran pengaduan. Namun, instansi ini belum memiliki Ruang Laktasi dan Sudut Baca. Serupa dengan tren OPD lainnya, aspek pemeriksaan medis (Klaster D) juga bernilai nol; tidak ada skrining kebugaran, tidak ada cek kesehatan berkala, dan tidak ada pemantauan kesehatan mental. Secara keseluruhan, Dinsos dapat digambarkan sebagai instansi dengan "Pasukan yang Bugar tanpa Panglima Kesehatan".



Gambar 2.25 Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 2.26 Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik

21. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas SDA), yang berkantor di Jalan Raya Raci Bangil, menunjukkan performa yang solid sebagai salah satu instansi teknis terbesar di Kabupaten Pasuruan. Dengan jumlah pegawai yang masif (234 orang), Dinas SDA mencatatkan skor evaluasi sebesar 30 (Kategori Baik). Hasil ini mencerminkan kapasitas manajemen dinas yang rapi, namun masih memiliki celah pada konsistensi aktivitas harian pegawai.

Keunggulan utama Dinas SDA terletak pada Klaster Pengelolaan (Klaster II) dan Klaster Pemantauan (Klaster III). Instansi ini menyapu bersih nilai sempurna pada aspek manajerial: Komitmen Pimpinan ada, SK Tim Pelaksana tersedia, Perencanaan terintegrasi, hingga Pelaporan hasil kegiatan pun tercatat rapi (Nilai 1). Hal ini sangat wajar mengingat kultur kerja dinas teknik yang terbiasa dengan dokumen kontrak dan pengawasan prosedural yang ketat.

Namun, pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A), tercatat skor hanya 50%. Meskipun Dinas SDA rutin melakukan senam "Ayo Bergerak" dan memiliki fasilitas olahraga yang memadai (lapangan/halaman luas), mereka tidak melakukan peregangan (*stretching*) pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB (Nilai 0). Ini adalah ironi umum di dinas teknis: pegawai sibuk bekerja fisik atau turun lapangan, namun lupa melakukan relaksasi otot saat berada di kantor. Selain itu, catatan merah juga terdapat pada aspek edukasi kesehatan (Klaster C), di mana indikator "Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan" bernilai nol.

Di sisi lain, sebagai instansi teknis dengan anggaran besar, Dinas SDA menunjukkan kinerja program pembangunan tahun 2025 yang sangat terperinci. Kegiatan difokuskan pada dua sektor utama, yakni penyediaan air minum dan pengelolaan limbah domestik:

Sektor Pertama: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di bawah payung Kegiatan Utama "Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota", dilaksanakan empat sub kegiatan strategis:

1. Sub Kegiatan "Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)". Indikator kinerja berupa jumlah dokumen rencana yang disusun dengan target 8 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp778.000.000,-. Pola realisasi menunjukkan kekosongan pada Semester I (tanda strip/-), namun terserap optimal pada Realisasi Semester II sebesar Rp771.058.000,-.
2. Sub Kegiatan "Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan". Indikator kinerja berfokus pada peningkatan kapasitas, dengan target gabungan 8 Dokumen dan 11 Lokasi Pekerjaan. Anggaran untuk peningkatan sistem ini sangat besar, yakni Rp2.979.118.708,-. Realisasi berjalan sejak awal tahun, tercatat Rp7.668.000,- pada Semester I dan meningkat tajam menjadi Rp2.660.957.499,- pada Semester II.
3. Sub Kegiatan "Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan". Indikator ini menargetkan kapasitas sistem yang dibangun baru, dengan volume 2 Dokumen dan 11 Lokasi Pekerjaan. Pagu anggaran dialokasikan sebesar Rp1.954.340.050,-. Serapan anggaran menunjukkan progres yang baik yakni Rp103.709.000,- pada Semester I dan Rp1.763.047.600,- pada Semester II.
4. Sub Kegiatan "Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan". Indikator kinerja diukur dari jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terlayani, dengan target fisik 2 Dokumen dan 3 Lokasi Pekerjaan. Alokasi anggaran sebesar Rp531.511.634,-. Realisasi Semester I tercatat Rp8.423.000,- dan Realisasi Semester II sebesar Rp511.155.950,-.

Sektor Kedua: Sistem Air Limbah Domestik Di bawah Kegiatan Utama "Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota", terdapat dua sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan "Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman". Indikator kinerja menyasar kapasitas sistem yang dibangun dengan target 1 Dokumen dan 2 Lokasi Pekerjaan. Anggaran dialokasikan sebesar Rp299.800.000,-. Realisasi Semester I sebesar Rp26.409.000,- dan Realisasi Semester II sebesar Rp271.987.300,-.
2. Sub Kegiatan "Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)". Indikator kinerja berupa jumlah dokumen rencana/kebijakan yang disusun dengan target 4 Dokumen. Alokasi anggaran sebesar Rp399.600.000,-. Pada Semester I tidak terdapat penyerapan anggaran (tanda strip/-), sedangkan pada Realisasi Semester II terserap sebesar Rp398.585.000,-.

22. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan, yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5, memegang peran strategis dalam menyisipkan nilai-nilai kesehatan ke dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat.

Dalam dokumen perencanaan matriks GERMAS Tahun 2025, Kemenag menunjukkan pola penganggaran yang sangat terfokus (*single-focus strategy*). Dari berbagai menu kegiatan yang direncanakan, alokasi sumber daya finansial terkonsentrasi sepenuhnya pada Kegiatan Utama Bimbingan kesehatan pranikah. Untuk mendukung agenda strategis ini, Kemenag mengalokasikan anggaran sebesar Rp108.405.000.

Kinerja realisasi anggaran menunjukkan penyerapan yang optimal pada paruh kedua tahun berjalan, di mana Semester I tercatat Rp0, namun pada Semester II melonjak drastis dengan realisasi sebesar Rp105.739.000. Anggaran tersebut didayagunakan untuk membiayai Sub Kegiatan Binwin (Bimbingan Perkawinan) Pra Nikah dengan target volume yang sangat masif, yakni 106 angkatan reguler. Selain itu, tercatat pula capaian partisipasi swadaya yang luar biasa melalui "Binwin mandiri

sebanyak 10.488 peserta", yang mengindikasikan tingginya antusiasme calon pengantin di Kabupaten Pasuruan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah kegiatan strategis berbasis institusi pendidikan agama yang tercantum dalam matriks namun memiliki target fisik "0 Kegiatan" dan tanpa dukungan anggaran pada tahun berjalan. Kegiatan tersebut meliputi: Penguatan UKS di madrasah, Penerapan KTR di madrasah, Penguatan Pos Kesehatan Pesantren, serta Penyediaan sarana sanitasi di 11 Madrasah. Hal ini menandakan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, intervensi GERMAS Kemenag lebih menitikberatkan pada sektor kesehatan keluarga (hulu) dibandingkan kesehatan lingkungan pendidikan (hilir).

Beralih ke tinjauan implementasi internal, Kemenag memiliki karakteristik demografi pegawai yang sangat seimbang (50:50), terdiri dari 42 laki-laki dan 42 perempuan. Evaluasi mandiri pelaksanaan GERMAS di instansi vertikal ini menghasilkan skor 27 (Kategori Cukup), dengan pola capaian yang menonjolkan kekuatan budaya aktivitas fisik namun masih lemah dalam kelengkapan fasilitas penunjang spesifik dan legalitas tim.

Kemenag mencatatkan prestasi gemilang pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A) dengan meraih nilai sempurna (100%). Seluruh indikator terpenuhi: pelaksanaan senam rutin "Ayo Bergerak", ketersediaan fasilitas olahraga, peregangan otot (*stretching*) pada jam 10.00 dan 14.00 WIB, serta kedisiplinan penggunaan tangga. Budaya gerak tubuh di lingkungan Kemenag tampaknya sudah berjalan secara organik dan konsisten.

Namun, terdapat anomali kritis pada aspek fasilitas kesehatan (Klaster B). Meskipun jumlah pegawai perempuan mencapai 50% dari total populasi, Kemenag justru belum menyediakan Ruang Laktasi. Ketiadaan fasilitas ini menjadi catatan evaluasi utama mengingat tingginya kebutuhan akan ruang menyusui yang layak bagi 42 pegawai perempuan tersebut. Selain itu, aspek pemeriksaan kesehatan medis (Klaster D) juga belum tersentuh sama sekali (nilai nol untuk indikator cek kesehatan fisik dan mental).

Dari sisi manajemen (Klaster II dan III), terlihat adanya inkonsistensi data atau "Paradoks Administratif". Kemenag menyatakan memiliki Komitmen Pimpinan dan

Perencanaan Terintegrasi (Nilai 1 pada Kluster II), namun fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: Tidak ada SK Tim Pelaksana, tidak ada kegiatan pemantauan rutin, dan tidak ada pelaporan hasil kegiatan (Nilai 0 pada Kluster III). Hal ini mengindikasikan bahwa klaim perencanaan tersebut kemungkinan besar belum diturunkan menjadi instrumen pengawasan yang operasional dan terdokumentasi.



Gambar 2.27 Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi



Gambar 2.28 Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit

23. Kodim 0819

Komando Distrik Militer (Kodim) 0819/Pasuruan, sebagai instansi vertikal TNI AD di daerah, menunjukkan peran aktif dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pendekatan komando kewilayahan. Berbeda dengan OPD teknis daerah yang berbasis anggaran APBD murni, perencanaan programatik Kodim 0819 dalam matriks Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada kontribusi personel dan *event* sosial.

Dalam dokumen matriks kegiatan, Kodim 0819 menetapkan 3 (tiga) Kegiatan Utama, di mana dua di antaranya memiliki target fisik spesifik pada Semester II, yaitu:

1. Pelaksanaan Donor Darah, yang dikaitkan dengan momentum strategis korps, yakni "Dalam Rangka HUT TNI Tahun 2025 dan Hari Juang Kartika Tahun 2025". Kegiatan ini menargetkan partisipasi sebanyak 150 pendonor.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara, dengan target fisik Semester II sebanyak 50 orang. Angka ini menarik untuk dicermati

mengingat mayoritas personel Kodim adalah laki-laki, yang mengindikasikan bahwa sasaran kegiatan ini kemungkinan besar mencakup anggota Persit (Persatuan Istri Tentara) atau pegawai sipil perempuan.

Selain itu, terdapat kegiatan Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular dan Pemeriksaan kesehatan berkala, namun tidak tercantum target angka spesifik untuk item ini. Perlu dilaporkan secara faktual bahwa seluruh kolom Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk semua kegiatan tersebut tercatat kosong, yang mengindikasikan pendanaan kegiatan kemungkinan terintegrasi dengan anggaran komando atas atau bersifat swadaya.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, Kodim 0819/Pasuruan merupakan instansi dengan jumlah personel terbesar dalam evaluasi ini, yakni total 711 orang (696 laki-laki dan 15 perempuan). Instansi ini menunjukkan performa yang solid dengan raihan skor total 30 (Kategori Baik). Hasil ini merefleksikan budaya disiplin komando yang kuat dalam menjaga kebugaran fisik dan kesiapsiagaan, meskipun terdapat beberapa indikator kesehatan sipil yang belum terakomodasi.

Kekuatan utama Kodim 0819 terlihat sangat menonjol pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A) dan Klaster Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Klaster F) yang meraih nilai sempurna (100%). Seluruh personel rutin melaksanakan senam/latihan fisik, fasilitas olahraga tersedia lengkap, dan prosedur tanggap darurat (simulasi evakuasi, ketersediaan APAR, P3K) berjalan sangat baik. Hal ini selaras dengan tupoksi TNI yang menuntut kesiapan fisik prima. Aspek manajerial pada Klaster Pengelolaan (Klaster II) dan Klaster Pemantauan (Klaster III) juga bernilai sempurna, menandakan tertib administrasi yang tinggi.

Namun, terdapat catatan pada aspek yang bersifat preventif dan fasilitas ramah gender. Pada Klaster Perilaku Hidup Sehat (Klaster B), indikator penyediaan buah-buahan dan ketersediaan Ruang Laktasi bernilai nol. Rendahnya jumlah personel perempuan (hanya 2% dari total pegawai) mungkin menjadi penyebab belum diprioritaskannya ruang laktasi, namun dalam standar GERMAS, fasilitas ini tetap wajib ada demi inklusivitas.

Selain itu, pada Klaster Dukungan Kesehatan (Klaster D), meskipun tes kebugaran fisik militer (Garjas) pasti dilakukan, indikator pemeriksaan kesehatan

berkala (*Medical Check-Up* umum) dan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) justru tidak terisi (Nilai 0). Fokus pemeriksaan kesehatan di lingkungan Kodim tampaknya lebih berat pada skrining penyakit menular dan tes fisik tempur, sehingga dimensi kesehatan preventif umum (seperti cek metabolik rutin) perlu ditingkatkan.

24. Polres Pasuruan

Kepolisian Resor (Polres) Pasuruan menutup rangkaian evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tahun Anggaran 2025 dengan capaian kinerja yang istimewa.

Ditinjau dari dokumen perencanaan matriks kegiatan, Polres Pasuruan mencantumkan 3 (tiga) Kegiatan Utama yang bersifat preventif dan promotif, yakni: (a) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala, (b) Penyuluhan kesehatan mengenai Penyakit Tidak Menular, dan (c) Sosialisasi kesehatan kerja.

Secara spesifik, kegiatan tersebut diturunkan ke dalam nomenklatur sub kegiatan yang sangat mendetail, antara lain "Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Anggota Polres Pasuruan" dan "Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Gigi Terhadap Anggota Polres Pasuruan".

Namun, perlu dilaporkan secara faktual bahwa pada kolom Target Semester II, Alokasi Anggaran, serta Realisasi Anggaran, seluruhnya tercatat dengan angka 0 (Nihil). Kondisi data matriks yang "kosong" ini berbanding terbalik secara ekstrem dengan hasil evaluasi kinerja di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kegiatan kesehatan di lingkungan Polres Pasuruan didanai secara mandiri melalui DIPA internal Polri atau mekanisme operasional rutin yang tidak membebani anggaran spesifik GERMAS daerah, namun tetap terlaksana dengan intensitas tinggi.

Beralih ke tinjauan implementasi internal, sebagai institusi penegak hukum dengan jumlah personel yang masif (799 orang), Polres Pasuruan berhasil meraih skor sempurna 35 (Kategori Sangat Baik). Capaian ini menempatkan Polres Pasuruan sejajar dengan sektor BUMN sebagai entitas dengan tingkat kepatuhan paripurna (100%) terhadap seluruh indikator GERMAS.

Keunggulan Polres Pasuruan terletak pada keseimbangan antara disiplin fisik dan perhatian terhadap kesehatan humanis. Pada Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik (Klaster A) dan Klaster Dukungan Kesehatan (Klaster D), seluruh indikator terpenuhi. Tidak hanya rutin melaksanakan latihan fisik dan tes kebugaran yang memang menjadi standar Polri, Polres juga tertib melaksanakan peregangan otot (*stretching*), skrining kesehatan berkala, hingga deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi seluruh personel.

Yang membedakan Polres dengan instansi vertikal lainnya adalah kepedulian pada Klaster Perilaku Hidup Sehat (Klaster B). Polres Pasuruan berhasil menyediakan Ruang Laktasi yang layak dan menerapkan penyediaan buah-buahan. Ini adalah capaian progresif bagi institusi yang secara demografis didominasi oleh laki-laki.

Selain itu, aspek manajerial pada Klaster Pengelolaan (Klaster II) dan Klaster Pemantauan (Klaster III) berjalan tanpa cela; dokumen komitmen, SK Tim, perencanaan, hingga pelaporan hasil kegiatan tersusun rapi. Polres Pasuruan membuktikan bahwa organisasi dengan hierarki komando yang ketat mampu menginternalisasi budaya hidup sehat secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik militer, tetapi juga pada aspek preventif medis dan manajemen lingkungan kerja.

2.2. Evaluasi Capaian dan Perkembangan

1. Bappelitbangda

Evaluasi menyeluruh terhadap dinamika implementasi GERMAS di lingkungan Bappelitbangda menyingkap adanya tantangan struktural yang cukup signifikan di tengah komitmen manajerial yang sebenarnya sudah terbangun dengan baik. Berdasarkan pemetaan kendala di lapangan, hambatan utama yang memengaruhi tidak tercapainya sejumlah indikator bersumber pada faktor keterbatasan kapasitas ruang (spasial) gedung kantor serta inkonsistensi dalam pelaksanaan rutinitas program.

Kendala infrastruktur fisik menjadi isu dominan yang menyebabkan belum tersedianya fasilitas olahraga khusus, kantin sehat, serta ruang kerja yang sepenuhnya ergonomis. Keterbatasan lahan dan desain bangunan yang ada tidak memungkinkan adanya penambahan ruang baru dalam jangka pendek. Menyikapi

realitas ini, strategi mitigasi yang ditempuh tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik baru, melainkan melalui optimalisasi sumber daya yang ada (*resource optimization*) dan kolaborasi lintas sektor. Bappelitbangda memutuskan untuk melakukan koordinasi pemanfaatan fasilitas umum terdekat, seperti Gelanggang Olahraga (GOR) atau ruang terbuka publik untuk kegiatan fisik pegawai, serta memodifikasi fungsi ruang yang ada sebagai area makan bersama (*communal dining*) guna menyiasati ketiadaan kantin sehat.

Selain aspek fisik, evaluasi juga menyoroti adanya diskontinuitas pada program peregrangan rutin di sela jam kerja. Kegiatan yang sebelumnya pernah berjalan efektif ini mengalami stagnasi pelaksanaan akibat melemahnya pengawasan harian. Sebagai langkah korektif, manajemen menetapkan rencana revitalisasi program melalui penunjukan petugas khusus (*Person in Charge*) yang bertanggung jawab mengingatkan pegawai setiap pukul 10.00 dan 14.00 WIB, didukung dengan instruksi yang disiarkan melalui media komunikasi internal kantor. Langkah ini diharapkan mampu membangun kembali kedisiplinan kolektif yang sempat memudar.

Perhatian serius juga diarahkan pada aspek perlindungan dan kenyamanan psikis pegawai, khususnya terkait mekanisme penanganan insiden pelecehan atau perundungan. Menyadari urgensi privasi dan keamanan pelapor, Bappelitbangda berkomitmen membangun saluran pelaporan terpadu yang responsif, baik melalui penunjukan administrator kepegawaian khusus maupun pemanfaatan aplikasi digital. Strategi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman tanpa harus terkendala oleh ketiadaan ruang pengaduan fisik secara khusus, sehingga setiap pegawai memiliki akses yang jelas dan terlindungi dalam menyampaikan keluhan. Dengan demikian, arah perbaikan ke depan akan lebih menitikberatkan pada inovasi tata kelola dan penguatan sistem pengawasan internal.

2. BNN Kabupaten Pasuruan

Evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan GERMAS di BNN Kabupaten Pasuruan menyoroti adanya dinamika antara keinginan kuat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan kendala administratif serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Meskipun secara umum aktivitas fisik berjalan optimal, analisis mendalam

menemukan hambatan spesifik terkait efisiensi anggaran dan belum lengkapnya payung hukum internal untuk beberapa indikator kunci.

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi berkaitan dengan konsistensi penyediaan pangan sehat dalam pertemuan dinas. Keterbatasan postur anggaran menyebabkan penyediaan buah sebagai kudapan rapat (*snack*) belum dapat dilakukan secara maksimal karena prioritas belanja lebih diarahkan pada kebutuhan operasional utama. Menyikapi kondisi ini, strategi tindak lanjut difokuskan pada penguatan komitmen pimpinan untuk tetap mengalokasikan anggaran pangan sehat secara proporsional sesuai kemampuan, serta membangun kesadaran kolektif pegawai bahwa konsumsi buah bukan sekadar pelengkap, melainkan investasi kesehatan jangka panjang.

Selain isu anggaran, evaluasi juga menemukan adanya kekosongan regulasi internal pada aspek pengelolaan gizi dan kesehatan mental. Saat ini, belum terdapat kebijakan tertulis yang mengatur standar pengelolaan kantin sehat maupun prosedur baku pelaksanaan skrining kesehatan mental bagi pegawai. Hal ini berdampak pada belum optimalnya kontrol terhadap asupan gizi di lingkungan kerja serta minimnya deteksi dini gangguan psikis. Sebagai langkah korektif, BNN Kabupaten Pasuruan merencanakan penyusunan dan penetapan kebijakan internal (SOP) terkait kantin sehat dan mekanisme skrining mental. Khusus untuk kesehatan mental, langkah ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan fasilitas layanan kesehatan setempat guna menjamin penanganan yang profesional.

Di sisi lain, aspek literasi gizi dan legalitas kelembagaan juga menjadi catatan perbaikan. Minimnya pemahaman pegawai mengenai gizi seimbang dan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) akan diintervensi melalui sosialisasi masif menggunakan media visual seperti poster dan selebaran edukatif. Sementara itu, untuk memperkuat landasan operasional tim pelaksana GERMAS yang saat ini belum memiliki legalitas formal, manajemen berkomitmen untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana. Langkah administratif ini krusial untuk menjamin akuntabilitas kinerja tim serta keberlanjutan program di masa mendatang.

3. BPJS Kesehatan

Evaluasi menyeluruh terhadap dinamika pelaksanaan GERMAS di BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, ditandai dengan nihilnya kendala struktural maupun operasional yang teridentifikasi dalam periode berjalan. Berdasarkan pemetaan masalah di lapangan, seluruh indikator utama mulai dari aktivitas fisik hingga tata kelola lingkungan telah berjalan sesuai target tanpa hambatan. Oleh karena itu, arah evaluasi dan tindak lanjut saat ini tidak lagi berfokus pada koreksi kesalahan atau penanganan masalah, melainkan pada strategi keberlanjutan (*sustainability*) untuk mempertahankan standar kinerja ekselen yang telah terbentuk.

Aspek konsistensi menjadi kunci utama dalam keberhasilan ini, di mana kegiatan olahraga bersama telah membudaya sebagai rutinitas mingguan yang tidak terputus. Lebih jauh lagi, BPJS Kesehatan telah melampaui standar kepatuhan dasar dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan (*go green*) secara masif, salah satunya melalui pembiasaan penggunaan botol minum guna ulang (*tumbler*) bagi seluruh pegawai untuk meminimalisasi sampah plastik. Dukungan terhadap penyediaan pangan sehat juga telah terintegrasi baik dalam agenda internal maupun eksternal, menciptakan ekosistem kerja yang tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga berwawasan lingkungan.

Pada dimensi infrastruktur dan inklusivitas, pengelolaan sampah kantor serta penyediaan fasilitas krusial seperti ruang laktasi dan layanan ramah disabilitas telah terlaksana secara merata di seluruh unit kerja. Rencana tindak lanjut yang dirumuskan manajemen kini difokuskan sepenuhnya untuk memastikan seluruh praktik baik tersebut dapat berjalan secara kontinu (*continuous implementation*). Dengan fondasi sistem yang sudah mapan, tantangan ke depan bagi BPJS Kesehatan adalah menjaga ritme kedisiplinan kolektif agar capaian ini tetap stabil dan mampu mempertahankan statusnya sebagai rujukan praktik terbaik (*best practice*) bagi instansi lain di Kabupaten Pasuruan.

4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan GERMAS di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menyingkap sebuah paradoks kinerja, di mana instansi pengampu

urusan keolahragaan justru menghadapi tantangan internal dalam menjaga konsistensi budaya gerak tubuh. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, hambatan utama tidak terletak pada ketersediaan ruang, melainkan pada faktor kesinambungan program (*sustainability*) dan kejenuhan pegawai terhadap rutinitas aktivitas fisik yang monoton. Kegiatan senam bersama yang semestinya menjadi prioritas institusi, saat ini masih bersifat insidental dan belum memiliki ritme yang ajeg.

Analisis akar masalah menunjukkan bahwa stagnasi pelaksanaan senam bersama disebabkan oleh kurangnya inovasi dari instruktur atau pemandu kegiatan, yang berujung pada penurunan motivasi peserta. Menyikapi hal ini, rencana tindak lanjut difokuskan pada revitalisasi program senam dengan variasi gerakan yang lebih dinamis guna mencegah kejenuhan. Sementara itu, untuk program peregangan rutin di sela jam kerja, kendala utamanya adalah belum adanya sosialisasi atau penyuluhan yang memadai mengenai urgensi aktivitas tersebut. Oleh karena itu, strategi intervensi akan diarahkan pada penyusunan program sosialisasi intensif serta penerapan mekanisme pemantauan harian untuk membangun kedisiplinan baru.

Selain aspek aktivitas fisik, evaluasi juga menyoroti kelemahan struktural dalam pemantauan status kesehatan pegawai secara klinis. Pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dan pemeriksaan kesehatan mental belum berjalan karena belum ditempatkan sebagai prioritas manajemen, ditambah dengan kendala teknis berupa ketersediaan alat ukur yang tidak memadai serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi medis terkait. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya data dasar (*baseline data*) mengenai tingkat kebugaran dan kesehatan mental pegawai Dispora.

Sebagai respons strategis atas defisit kapasitas tersebut, Dispora merencanakan pengadaan alat ukur kesehatan yang standar serta menginisiasi kerja sama lintas sektor dengan fasilitas layanan kesehatan yang kompeten. Kolaborasi ini dirancang untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan fisik dan skrining mental secara berkala, sehingga rekomendasi medis yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara profesional. Dengan demikian, kunci perbaikan kinerja GERMAS di Dispora ke depan akan sangat bergantung pada penguatan kemauan kolektif (*political will*) untuk menempatkan kesehatan pegawai sebagai prioritas utama, serta transformasi metode pelaksanaan kegiatan agar lebih variatif dan terukur.

5. Dinas Kesehatan

Evaluasi masalah pada Dinas Kesehatan (Dinkes) menyajikan sebuah temuan yang sangat spesifik dan esensial. Dari sekian banyak indikator GERMAS yang kompleks, Dinkes hanya mengidentifikasi satu masalah tunggal: ketiadaan aktivitas peregangan otot (stretching) rutin. Pengakuan ini tertuang jujur dalam dokumen identifikasi masalah, di mana rutinitas peregangan pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB belum terlaksana.

Kondisi ini mencerminkan tantangan khas pada instansi pelayanan publik yang memiliki beban kerja tinggi (high workload). Fokus aparatur Dinkes yang tersita untuk melayani kesehatan masyarakat dan mengurus administrasi kesehatan daerah, secara ironis membuat mereka mengabaikan aspek ergonomi kesehatan kerja diri sendiri. "Tukang jahit yang bajunya sobek" mungkin adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan situasi di mana pengawal kesehatan justru lupa meregangkan ototnya sendiri.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun sangat to-the-point: "Mengadakan peregangan setiap jam 10.00 dan 14.00 WIB". Selain itu, Dinkes juga mencantumkan rencana strategis berupa "Koordinasi antar OPD". Hal ini mengisyaratkan bahwa Dinkes menyadari perannya sebagai motor penggerak; jika Dinkes berhasil menghidupkan kembali alarm peregangan otot ini, maka legitimasi mereka untuk menegur OPD lain akan semakin kuat. Secara keseluruhan, Dinkes hanya membutuhkan sedikit "sentuhan ulang" pada kedisiplinan jadwal untuk mencapai performa GERMAS yang sempurna.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika

Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan GERMAS di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyingkap fakta bahwa hambatan terbesar yang dihadapi bukanlah defisit sumber daya manusia, melainkan kekosongan perencanaan dan belum terbangunnya mekanisme koordinasi internal yang efektif. Berdasarkan pemetaan masalah yang dilakukan, hampir seluruh indikator yang belum tercapai mulai dari aktivitas fisik, deteksi dini penyakit, hingga edukasi memiliki akar masalah yang seragam, yakni ketiadaan jadwal pelaksanaan dan belum adanya penunjukan penanggung jawab teknis yang spesifik.

Pada aspek infrastruktur dan lingkungan fisik, Diskominfo menghadapi kendala spasial berupa tidak tersedianya ruang khusus untuk fasilitas olahraga maupun kantin sehat di area kantor. Keterbatasan fasilitas ini diperparah dengan belum adanya upaya optimalisasi ruang alternatif atau kebijakan substitusi. Terkait indikator penggunaan tangga, kondisi gedung yang hanya terdiri dari satu lantai menjadi alasan teknis tidak adanya tangga, namun hal ini diatasi dengan rencana pemasangan stiker imbauan untuk tetap bergerak aktif. Sementara itu, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas teknis lapangan juga masih menjadi catatan merah yang memerlukan pengadaan segera demi keselamatan kerja.

Kesenjangan yang paling krusial terlihat pada aspek programatik kesehatan dan edukasi. Kegiatan-kegiatan vital seperti skrining kesehatan fisik dan mental, pengukuran kebugaran jasmani, hingga penyuluhan PHBS tercatat sama sekali tidak berjalan dengan alasan belum dijadwalkan. Ironisnya, pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan internal yang semestinya menjadi kompetensi inti Diskominfo juga belum tergarap karena belum masuk dalam agenda prioritas dinas. Kondisi ini mencerminkan adanya inersia manajerial di mana kesehatan pegawai belum dipandang sebagai bagian integral dari kinerja organisasi.

Menyikapi berbagai ketertinggalan tersebut, strategi tindak lanjut yang dirumuskan saat ini masih berada pada tahap inisiasi dasar. Fokus utama perbaikan adalah memecah kebuntuan komunikasi antar-bidang melalui koordinasi intensif untuk menyusun jadwal kegiatan yang baku. Manajemen Diskominfo perlu segera mentransformasi rencana "akan dikoordinasikan" menjadi "siap dilaksanakan" dengan menetapkan target waktu yang jelas. Tanpa adanya percepatan langkah dari sekadar wacana koordinasi menuju eksekusi program, capaian indikator GERMAS di lingkungan Diskominfo berisiko mengalami stagnasi berkepanjangan.

7. Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan GERMAS di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyingkap akar masalah yang fundamental: ketiadaan sistem yang terorganisir. Meskipun memiliki sumber daya pegawai yang besar dengan aktivitas lapangan yang tinggi, evaluasi mencatat bahwa aktivitas fisik tersebut tidak pernah dikonversi menjadi indikator kinerja kesehatan karena tidak terpantau dan tidak

tercatat dalam sebuah skema manajemen yang baku. Masalah ini diperkuat oleh pengakuan internal bahwa kendala utama bukanlah fasilitas, melainkan belum terbangunnya sistem aktivitas fisik yang terstruktur bagi ASN.

Analisis faktor keberhasilan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada faktor Peran Pimpinan. Absennya Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana dan nihilnya kebijakan formal lainnya berkorelasi langsung dengan belum optimalnya dukungan pimpinan dalam menetapkan GERMAS sebagai prioritas organisasi. Hal ini terlihat jelas pada penanganan isu kesehatan mental dan etika kerja; meskipun konsultasi non-formal terkait perundungan (*bullying*) mungkin terjadi, DLH mengakui belum memiliki saluran pelaporan formal. Rencana tindak lanjut kini difokuskan pada formalisasi prosedur tersebut agar perlindungan pegawai terjamin secara regulatif, bukan sekadar inisiatif personal.

Dari aspek kesehatan fisik dan gizi, tantangan unik teridentifikasi pada pola konsumsi pegawai. Keberadaan kantin umum yang dikelola pihak swasta di sekitar kantor menyulitkan kontrol terhadap kandungan gizi makanan. Masalah yang muncul bukan kekurangan gizi, melainkan "kelebihan kalori" akibat kurangnya kesadaran pegawai dalam memilih menu seimbang. Selain itu, ketersediaan fasilitas pertolongan pertama (kotak P3K) yang belum merata juga menjadi sorotan yang akan segera ditindaklanjuti melalui penganggaran tahun berikutnya.

Kesimpulannya, strategi perbaikan di tubuh DLH tidak bisa dilakukan secara parsial. Solusi utama yang dirumuskan adalah pembangunan sistem kesehatan kerja yang terpusat di bawah komando pimpinan. Transformasi ini mencakup penerbitan instruksi pimpinan untuk senam rutin, penyediaan saluran pengaduan formal, serta kampanye edukasi gizi untuk mengubah perilaku makan pegawai. Tanpa intervensi manajerial yang kuat dari pucuk pimpinan, inisiatif kesehatan di DLH dikhawatirkan akan tetap berjalan sporadis dan tidak terukur.

8. Dinas Pariwisata

Evaluasi mendalam terhadap dinamika pelaksanaan GERMAS di Dinas Pariwisata menyingkap sebuah fenomena menarik di mana budaya aktivitas fisik yang prima berhadapan dengan kendala infrastruktur fisik gedung. Meskipun indikator senam dan peregangan mencapai nilai sempurna, implementasi indikator yang membutuhkan

dukungan fasilitas (seperti kantin sehat dan layanan pengaduan) terhambat oleh faktor spasial.

Berdasarkan dokumen identifikasi masalah, hambatan utama yang berulang kali muncul adalah "Ketiadaan Ruang yang Memadai". Alasan ini menjadi dasar tidak terlaksananya penyediaan kantin sehat internal maupun penyediaan saluran pelaporan formal untuk kasus perundungan/pelecehan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen Dinas Pariwisata memiliki persepsi bahwa setiap indikator GERMAS harus diterjemahkan dalam bentuk fasilitas fisik (ruangan khusus), sehingga ketika kapasitas gedung terbatas, program tersebut dianggap tidak dapat dijalankan.

Terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas Pariwisata menyatakan belum menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan alasan "Tidak ada ruangan yang memerlukan APD". Argumentasi ini perlu ditinjau ulang mengingat tugas fungsi pariwisata seringkali melibatkan mobilitas lapangan yang tinggi, di mana risiko tidak hanya berada di dalam ruangan kantor, melainkan juga pada aktivitas luar ruang.

Strategi tindak lanjut yang dirumuskan perlu difokuskan pada transformasi metode pelaksanaan. Keterbatasan ruang fisik untuk saluran pengaduan dapat disiasati dengan digitalisasi layanan (menggunakan *Google Form* atau *Hotline WhatsApp*) yang tidak memakan tempat. Demikian pula ketiadaan kantin fisik dapat disubstitusi dengan kebijakan bekal sehat atau kerja sama katering sehat. Selain itu, aspek administrasi (SK Tim dan Komitmen Pimpinan) yang saat ini masih kosong harus segera dilengkapi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi aktivitas fisik yang sebenarnya sudah berjalan sangat baik di lapangan.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan GERMAS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memperlihatkan sebuah hambatan persepsi yang signifikan terkait pelaksanaan deteksi dini kesehatan. Meskipun budaya aktivitas fisik (senam/peregangan) berjalan cukup baik karena tidak memerlukan alat khusus, seluruh indikator klinis seperti pengukuran IMT, skrining kesehatan mental, dan cek kebugaran terhenti total. Akar masalah yang teridentifikasi dalam dokumen evaluasi adalah ketiadaan sarana dan fasilitas medis secara mandiri di lingkungan kantor.

Pola jawaban yang seragam pada identifikasi masalah, yakni "Tidak ada sarana dan fasilitas di tempat kerja", mengindikasikan bahwa manajemen DPMD memandang pelaksanaan skrining kesehatan sebagai beban infrastruktur internal. Padahal, dalam kerangka kerja GERMAS, instansi non-kesehatan tidak dituntut untuk memiliki fasilitas medis sendiri, melainkan didorong untuk membangun jejaring kemitraan dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Kesalahpahaman ini menyebabkan stagnasi program, di mana ketiadaan alat ukur (tensi, timbangan, alat cek gula darah) dijadikan alasan utama untuk tidak melakukan pemantauan kesehatan pegawai.

Selain kendala fasilitas, evaluasi juga menyoroti adanya ketergantungan birokratis yang tinggi. Solusi yang dirumuskan secara internal berbunyi "Akan dilaksanakan lagi sesuai instruksi yang ada", menyiratkan sikap pasif menunggu arahan komando. Hal ini menjelaskan mengapa dokumen perencanaan dan SK Tim Pelaksana belum terbentuk; inisiatif internal belum tumbuh karena manajemen masih menunggu instruksi teknis yang bersifat *top-down*.

Strategi tindak lanjut untuk DPMD ke depan harus difokuskan pada pergeseran paradigma dari "pengadaan fasilitas" menjadi "pembentukan kolaborasi". Solusi konkretnya bukanlah membeli alat medis, melainkan mengundang tenaga kesehatan dari fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan berkala (sistem jemput bola). Secara paralel, "instruksi" yang dinantikan tersebut harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan internal (SK Kepala Dinas) agar kegiatan tidak lagi bergantung pada perintah insidental, melainkan menjadi sistem yang baku dan berkelanjutan.

10. DP3AP2KB

Evaluasi mendalam terhadap DP3AP2KB menunjukkan bahwa instansi ini memiliki kematangan sistem yang tinggi, terutama dalam indikator yang beririsan dengan tugas pokok dan fungsinya. Berbeda dengan mayoritas OPD yang terkendala dalam penyediaan saluran pengaduan kasus perundungan dan pelecehan, DP3AP2KB justru menunjukkan kesiapan paripurna. Instansi ini telah mengintegrasikan indikator tersebut dengan layanan publik yang mereka miliki, yakni Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PUSPAGA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (PUSYANGATRA), serta inovasi digital berupa *barcode* keluhan pelanggan. Hal ini menjadikan DP3AP2KB sebagai *best practice* dalam penanganan aspek psikososial di lingkungan kerja.

Kendala utama yang teridentifikasi bersifat fisik-spasial. Indikator penyediaan fasilitas olahraga dan kantin sehat internal tidak dapat dipenuhi dengan alasan klasik: "Tidak ada ruangan yang memadai". Keterbatasan luas gedung kantor di kompleks perkantoran terpadu memang menjadi hambatan struktural bagi instansi untuk menyediakan sarana fisik tambahan, sehingga strategi pemenuhan indikator ini perlu dialihkan pada optimalisasi area publik di sekitar kantor.

Catatan evaluasi yang cukup krusial ditemukan pada aspek konsistensi aktivitas fisik. Dalam identifikasi masalah, tercatat keterangan jujur mengenai peregangan otot (*stretching*) jam 10.00 dan 14.00 WIB: "*Sebelumnya sudah ada kegiatan tersebut namun sekarang sudah tidak dilaksanakan*". Pengakuan ini menjadi temuan penting bahwa meskipun secara administratif (SK/SOP) kegiatan mungkin tercatat ada, namun pelaksanaannya di lapangan mengalami pasang surut (inkonsistensi). Hal ini menuntut adanya reaktivasi peran "Agen Perubahan" untuk menghidupkan kembali rutinitas yang sempat terhenti tersebut agar kembali menjadi budaya kerja.

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Evaluasi mendalam terhadap Dinas Pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan antara konsep "deteksi dini" dengan "pengobatan". Hal ini terlihat jelas pada strategi skrining kesehatan mental yang diterapkan. Manajemen menyatakan bahwa pemeriksaan mental hanya dilakukan kepada staf yang "*terindikasi mengidap gangguan mental*". Pendekatan reaktif ini bertentangan dengan prinsip GERMAS yang mengutamakan pencegahan; skrining seharusnya dilakukan secara massal kepada seluruh pegawai yang sehat untuk mendeteksi tingkat stres kerja sebelum berkembang menjadi gangguan klinis. Pola penanganan saat ini berisiko menciptakan stigma negatif bagi pegawai yang diperiksa.

Terkait pemeriksaan kesehatan fisik dan kebugaran, Dinas Pendidikan menunjukkan pola ketergantungan pada agenda eksternal. Ketidadaan jadwal pemeriksaan mandiri disebabkan karena instansi hanya mengikuti agenda yang

diselenggarakan oleh PMI atau Pemerintah Kabupaten. Solusi yang ditawarkan, yakni mengusulkan anggaran khusus dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, merupakan langkah strategis yang tepat untuk memutus ketergantungan tersebut dan menjadikan pemantauan kesehatan sebagai agenda rutin internal.

Isu lingkungan juga menjadi sorotan, di mana pengelolaan limbah domestik masih bersifat pasif ("diserahkan sepenuhnya kepada DLH"). Rencana tindak lanjut untuk mengadakan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) serta membekali SDM dengan edukasi pemilahan sampah merupakan langkah awal yang baik untuk mengubah pola pikir dari sekadar "membuang" menjadi "mengelola".

12. Dinas Perhubungan

Evaluasi terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) memperlihatkan karakteristik instansi teknis lapangan yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan beban kerja operasional dengan rutinitas kesehatan internal. Dalam dokumen identifikasi masalah, Dishub secara spesifik menyoroti kendala "Padatnya kegiatan" sebagai penyebab utama tidak terlaksananya peregangan otot (*stretching*) pada jam 10.00 dan 14.00 WIB. Ritme kerja yang dinamis, terutama bagi personil yang bertugas di lapangan atau pengaturan lalu lintas, membuat penyeragaman waktu istirahat sejenak menjadi sulit diterapkan dibandingkan dengan instansi yang berbasis kerja di belakang meja.

Temuan menarik lainnya adalah persepsi Dishub mengenai "Agen Perubahan". Instansi ini mengakui bahwa agen perubahan sebenarnya sudah terbentuk, namun mandatnya masih terbatas pada peningkatan layanan perhubungan (eksternal), belum menyentuh aspek promosi kesehatan (internal). Rekomendasi tindak lanjut yang dirumuskan adalah perluasan peran agen perubahan tersebut atau pemilihan pegawai baru yang khusus didedikasikan untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan pegawai.

Secara administratif, hambatan utama pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah belum disusunnya SK Tim Kesehatan OPD. Ketiadaan payung hukum ini menyebabkan tidak adanya standar baku dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan. Dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL), Dishub telah menargetkan penyusunan SK yang

didalamnya akan memuat standar operasional prosedur (SOP) monitoring, sehingga kegiatan kesehatan ke depan dapat terukur kinerjanya.

Selain aspek internal, Dishub juga memasukkan isu strategis transportasi sehat dalam evaluasinya, seperti integrasi angkutan umum dengan jalur sepeda dan pejalan kaki. Meskipun ini merupakan indikator makro kabupaten, kesadaran untuk menghubungkan tugas fungsi dinas dengan visi GERMAS patut diapresiasi, asalkan tidak mengalihkan fokus utama pemenuhan indikator kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi pegawai internalnya sendiri.

13. Dinas Perikanan

Evaluasi mendalam terhadap Dinas Perikanan mengungkap tantangan mendasar dalam *mindset* perencanaan. Dokumen identifikasi masalah menunjukkan pola ketergantungan yang tinggi pada alasan infrastruktur. Hampir seluruh kendala mulai dari ketiadaan fasilitas olahraga, APD, kantin sehat, hingga saluran pengaduan dijawab dengan satu alasan seragam: "Tidak ada ruangan yang memadai". Padahal, beberapa indikator seperti saluran pengaduan (pelecehan/perundungan) sejatinya dapat diimplementasikan melalui mekanisme non-fisik (digital/hotline) tanpa memerlukan ruangan khusus.

Selain itu, ditemukan indikasi ketidakcermatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pada kolom Rencana Tindak Lanjut (RTL) terkait fasilitas ergonomis, tertulis sasaran lokasi pembangunan adalah di "Bapperida", bukan di Dinas Perikanan. Hal ini mengindikasikan adanya proses penyalinan dokumen (*copy-paste*) yang tidak melalui verifikasi ulang, mencerminkan lemahnya aspek administratif yang sejalan dengan temuan sebelumnya (ketiadaan SK Tim dan laporan Monev).

Terkait aktivitas fisik, Dinas Perikanan mengakui bahwa peregangan otot (*stretching*) belum dilaksanakan karena "Belum pernah disosialisasikan". Sikap ini cenderung pasif, mengingat instruksi pelaksanaan GERMAS sudah berlaku umum. Rencana tindak lanjut yang hanya berbunyi "Akan dilaksanakan sesuai instruksi yang ada" menunjukkan posisi instansi yang masih menunggu arahan eksternal (top-down) ketimbang berinisiatif membangun budaya sehat dari dalam (bottom-up).

Secara keseluruhan, Dinas Perikanan memiliki modal fasilitas dasar yang baik (Ruang Laktasi/Sudut Baca), namun memerlukan revitalisasi total pada aspek manajemen (tata kelola) dan inisiatif program agar tidak terjebak pada alasan klasik keterbatasan ruang.

14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Evaluasi terhadap dokumen identifikasi masalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyingkap sebuah temuan mendasar mengenai persepsi instansi terhadap program GERMAS. Dalam dokumen tersebut, satu-satunya masalah yang diangkat adalah "Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib masih terfokus pada lokasi tertentu". Masalah ini sejatinya merupakan isu teknis pelayanan publik (eksternal) yang menjadi tugas pokok fungsi dinas, dan bukan merupakan isu implementasi budaya hidup sehat bagi pegawai (internal).

Temuan ini mengindikasikan adanya miskonsepsi (salah pemahaman) yang cukup serius. Manajemen Disperindag tampaknya memandang evaluasi GERMAS sebagai evaluasi kinerja layanan dinas kepada masyarakat, sehingga luput memperhatikan kesejahteraan kesehatan pegawainya sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa masalah-masalah krusial yang ditemukan pada evaluasi kuantitatif seperti ketiadaan pemeriksaan kesehatan berkala, tidak adanya peregangan otot, hingga absennya SK Tim Pelaksana sama sekali tidak tercatat dalam daftar masalah yang perlu diselesaikan.

Akibat dari orientasi yang sepenuhnya eksternal ini, upaya perbaikan kesehatan internal menjadi terabaikan. Padahal, data menunjukkan bahwa tidak ada satupun pegawai yang mendapatkan skrining kesehatan fisik maupun mental. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun pun menjadi tidak relevan dengan tujuan GERMAS Tempat Kerja, karena solusinya hanya berfokus pada "melibatkan IKM secara maksimal", tanpa menyentuh strategi untuk meningkatkan kebugaran atau memformalkan tim kesehatan di lingkungan kantor.

Oleh karena itu, langkah perbaikan pertama bagi Disperindag bukanlah pengadaan fasilitas, melainkan sosialisasi ulang kepada jajaran manajemen mengenai esensi GERMAS Tempat Kerja: bahwa sebelum melayani masyarakat

dengan produk ber-SNI, aparaturnya yang melayani harus dipastikan sehat dan bugar terlebih dahulu.

15. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Analisis terhadap dokumen identifikasi masalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang mendasar mengenai tujuan evaluasi GERMAS Tatanan Tempat Kerja. Masalah yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut sepenuhnya berfokus pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas terhadap masyarakat luas, yaitu kendala promosi produk lokal melalui "Festival Produk Pertanian" dan pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi standar "Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)".

Tidak ditemukan satu pun catatan mengenai masalah kesehatan internal pegawai, hambatan fasilitas kantor, atau kendala kebugaran staf. Hal ini menegaskan temuan pada subbab sebelumnya bahwa DKPP sangat berorientasi pada pelayanan eksternal (masyarakat), namun cenderung mengabaikan administrasi dan evaluasi kesehatan internal. Padahal, data kuantitatif menunjukkan bahwa instansi ini memiliki fasilitas internal yang baik (Ruang Laktasi, Kantin Sehat), namun lemah dalam pendataan pegawai dan legalitas tim pelaksana.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun, seperti "Festival Produk Pertanian dijadikan agenda rutin" dan "Sosialisasi B2SA terus menerus", sangat baik untuk kinerja sektor pertanian kabupaten, namun tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan status kesehatan ASN di lingkungan DKPP. Oleh karena itu, rekomendasi utama bagi DKPP adalah meluruskan pemahaman bahwa GERMAS Tempat Kerja adalah tentang "Sehatnya Aparatur", bukan hanya "Suksesnya Program Dinas". Diperlukan intervensi untuk mengalihkan sebagian fokus manajemen agar mulai memperhatikan data kesehatan, kebugaran, dan keselamatan kerja pegawainya sendiri dengan bobot yang setara dengan perhatian mereka terhadap produk pertanian.

16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dokumen identifikasi masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) memperlihatkan disorientasi fokus yang serupa dengan beberapa OPD

teknis lainnya. Masalah yang dicatat dalam dokumen evaluasi sepenuhnya berkaitan dengan infrastruktur publik dan layanan masyarakat, antara lain: kebutuhan pemeliharaan drainase lingkungan untuk mencegah genangan, pembangunan jalan lingkungan untuk aktivitas fisik warga, serta penyediaan MCK Komunal dan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun isu-isu tersebut sangat relevan dengan indikator GERMAS dalam tatanan masyarakat luas (Tatanan Permukiman), namun hal tersebut tidak relevan dengan konteks evaluasi "GERMAS Tatanan Tempat Kerja". Disperkim tidak mengidentifikasi satupun masalah terkait kesehatan internal, seperti kebugaran pegawai yang duduk terlalu lama, ketersediaan fasilitas olahraga kantor, atau pemantauan kesehatan staf.

Kesalahpahaman ini berdampak sistemik pada hasil evaluasi kuantitatif sebelumnya. Rendahnya skor pada indikator pemeriksaan kesehatan dan manajemen internal bukan disebabkan oleh ketidakmampuan sumber daya, melainkan karena manajemen Disperkim tidak menyadari bahwa merekalah objek evaluasinya. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun pun berfokus pada "Aspek Teknis dan Perencanaan Pembangunan", yang sama sekali tidak menyentuh perbaikan kualitas hidup aparatur di dalam kantor Disperkim sendiri. Oleh karena itu, rekomendasi utama bagi Disperkim adalah penyamaan persepsi mengenai definisi operasional GERMAS Tempat Kerja sebelum melangkah pada intervensi fisik maupun medis.

17. Dinas Sosial

Evaluasi terhadap dokumen identifikasi masalah Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan profil instansi yang memiliki kesadaran diri (*self-awareness*) yang tinggi terhadap kekurangan internalnya. Dokumen ini sangat lugas: Dinsos mengakui secara terbuka bahwa kelemahan utama mereka adalah ketiadaan legalitas dan administrasi. Masalah seperti "Tidak adanya dokumen komitmen pimpinan", "Tidak adanya SK Tim", dan "Tidak adanya laporan hasil" diidentifikasi dengan jujur, tanpa berlindung di balik alasan klasik seperti keterbatasan anggaran atau sarana.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun pun sangat praktis dan solutif. Untuk masalah administrasi, solusinya tegas: "Segera dibuatkan dokumen/SK". Hal ini mengonfirmasi analisis sebelumnya bahwa Dinsos adalah tipe instansi yang

"bergerak dulu, administrasi belakangan". Kegiatan fisik sudah jalan (skor 100%), namun payung hukumnya tertinggal. Kini, mereka telah memiliki peta jalan untuk membereskan aspek formal tersebut.

Terkait isu kesehatan medis (Klaster D) yang nilainya nol, Dinsos mengambil langkah yang paling tepat secara birokrasi, yaitu "Mengusulkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan". Ini adalah solusi cerdas yang membedakan Dinsos dengan OPD lain yang seringkali beralasan "tidak ada ruangan medis". Dinsos memahami bahwa untuk melakukan cek kesehatan, mereka tidak perlu membangun klinik sendiri, melainkan cukup bersinergi dengan instansi yang berwenang.

Secara keseluruhan, Dinsos menutup evaluasi ini dengan potensi perbaikan yang sangat besar. Dengan budaya aktivitas fisik yang sudah sangat kuat, jika tahun depan mereka berhasil merealisasikan pembuatan SK dan kerjasama pemeriksaan kesehatan, Dinsos berpotensi besar melompat menjadi salah satu OPD percontohan (Role Model) di Kabupaten Pasuruan.

18. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Dokumen identifikasi masalah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan pola pengisian yang unik. Pada seluruh kolom "Deskripsi Masalah", Kemenag menuliskan "Tidak Ada". Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tim pelaksana merasa tidak menemui kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan, atau belum melakukan evaluasi mendalam terhadap kesenjangan antara standar GERMAS dengan kondisi aktual (seperti ketiadaan Ruang Laktasi yang teridentifikasi pada subbab sebelumnya).

Meskipun menyatakan tidak ada masalah, Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun cukup konstruktif. Terkait kekosongan data kesehatan medis, Kemenag merencanakan solusi yang tepat guna yaitu "Melaksanakan skrining rutin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan". Langkah kolaboratif ini sangat strategis bagi instansi vertikal untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis internal. Selain itu, komitmen terhadap penyediaan *snack* buah sesuai kemampuan anggaran juga patut diapresiasi sebagai langkah realistis.

Namun, terdapat satu catatan kritis pada aspek kesehatan lingkungan. Dalam poin pengelolaan sampah, Kemenag mencantumkan praktik "kegiatan pembakaran untuk sampah kertas" sebagai bagian dari solusi/faktor keberhasilan. Perlu ditekankan bahwa dalam kerangka GERMAS dan standar kesehatan lingkungan (*environmental health*), pembakaran sampah terbuka tidak direkomendasikan karena dampak polusi udara yang ditimbulkan. Rekomendasi bagi Kemenag adalah mengalihkan praktik ini menuju metode daur ulang atau pemilahan sampah terpadu (Bank Sampah), selaras dengan semangat instansi yang sehat dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Kemenag memiliki modal sosial yang kuat (kekompakan pegawai), namun perlu penyelarasan teknis pada aspek standar kesehatan lingkungan dan medis.

2.3. Tantangan Pelaksanaan Gernas

Berdasarkan komparasi mendalam antara data evaluasi mandiri (implementasi budaya sehat internal pada 24 Instansi) dengan Matrik Laporan Pelaksanaan GERMAS sesuai Tugas dan Fungsi (layanan eksternal), teridentifikasi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang menghambat akselerasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pasuruan. Tantangan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek disorientasi paradigma, asimetri manajemen sumber daya, hingga kesenjangan tata kelola administratif. Berikut adalah uraian rinci mengenai tantangan pelaksanaan GERMAS Tahun 2025:

A. Disorientasi Paradigma: Dikotomi Antara *Service Provider* dan *Role Model*

Tantangan fundamental yang teridentifikasi dalam evaluasi tahun ini adalah adanya miskonsepsi peran yang signifikan pada sebagian besar Perangkat Daerah. Terdapat kecenderungan kuat di mana OPD memandang GERMAS semata-mata sebagai indikator kinerja pelayanan publik (*external service provider*) sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), namun mengabaikan implementasinya sebagai budaya kerja internal (*role model*).

Fenomena ini menciptakan "Jebakan Tupoksi Semu" dalam pelaporan. Data menunjukkan bahwa fokus berlebihan pada indikator eksternal seringkali mengaburkan esensi perilaku hidup sehat di lingkungan kerja sendiri. Sebagai ilustrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Ketahanan Pangan dalam dokumen evaluasi internal justru melaporkan capaian

infrastruktur fisik (seperti drainase dan jalan lingkungan) serta kegiatan festival pangan sebagai bentuk keberhasilan GERMAS. Padahal, instrumen evaluasi menghendaki pengukuran derajat kesehatan aparatur sipil negara.

Dampak turunan dari disorientasi ini adalah inkonsistensi nilai. Instansi pemerintah dituntut melakukan pembinaan kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya menerapkan nilai tersebut di internal. Kementerian Agama (Kemenag), misalnya, memiliki target strategis pembinaan sanitasi di 11 Madrasah, namun dalam evaluasi internal teridentifikasi masih melakukan praktik pembakaran sampah kertas yang kontraproduktif terhadap standar kesehatan lingkungan. Demikian pula Dinas Perindustrian (Disperindag) yang memiliki fungsi pengawasan standar gizi produk industri (SNI), namun belum menyediakan fasilitas kantin sehat bagi pegawainya sendiri. Kondisi ini menegaskan perlunya reorientasi pemahaman bahwa instansi pemerintah harus menyelesaikan urusan kesehatan internalnya terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsi pembinaan eksternal secara efektif.

B. Paradoks Anggaran dan Asimetri Sumber Daya (*Silo Mentality*)

Analisis terhadap distribusi sumber daya keuangan dan fasilitas kesehatan menunjukkan adanya kesenjangan ekstrem antara ketersediaan anggaran di tingkat kabupaten dengan aksesibilitas di tingkat OPD. Kondisi ini menciptakan situasi paradoksal "Miskin di Tengah Lumbung Padi", di mana kendala pelaksanaan bukan terletak pada ketiadaan dana daerah, melainkan pada mekanisme distribusi dan sinergi antar-sektor yang belum optimal.

Merujuk pada Matrik Laporan GERMAS 2025, BPJS Kesehatan mencatatkan alokasi anggaran promotif dan preventif yang sangat masif, yakni sebesar Rp 5.005.800.800,- (Lima Miliar Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan skrining riwayat kesehatan. Bappelitbangda juga memiliki alokasi anggaran koordinasi yang terealisasi. Namun, fakta lapangan yang terekam dalam survei internal menunjukkan kondisi kontradiktif: hampir seluruh OPD non-kesehatan (seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Perikanan) mengeluhkan ketiadaan anggaran sebagai alasan utama tidak terlaksananya pemeriksaan kesehatan pegawai.

Hal ini mengindikasikan masih kuatnya ego sektoral (*silo mentality*) dalam tata kelola pemerintahan, di mana belum terbentuk mekanisme kerjasama lintas sektor atau sistem "Bapak Angkat". Sumber daya besar yang berada pada *leading sector* (Dinkes/BPJS) belum terintegrasi secara sistematis untuk melayani pegawai di OPD lain. Akibatnya, OPD teknis merasa tidak memiliki kapasitas fiskal untuk melaksanakan amanat GERMAS, padahal potensi pembiayaan tersedia secara lintas sektoral.

C. Hambatan Operasional: Mitos Infrastruktur versus Determinasi Manajemen

Evaluasi tahun ini juga mematahkan asumsi umum bahwa pelaksanaan GERMAS sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur mewah atau anggaran operasional yang besar. Temuan data menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi lebih ditentukan oleh determinasi manajemen (*management will*) daripada fasilitas fisik.

Analisis terhadap Dinas Sosial dan Kementerian Agama memberikan bukti empiris mengenai kekuatan "Aktivitas Tanpa Biaya" (*Zero Cost Activity*). Kedua instansi ini berhasil meraih skor sempurna (100%) pada Klaster Aktivitas Fisik tanpa dukungan anggaran khusus olahraga maupun fasilitas gymnasium. Faktor kunci keberhasilan mereka adalah konsistensi pimpinan dalam mengalokasikan waktu (Jadwal Senam Jumat rutin, serta *Stretching* pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB).

Sebaliknya, instansi dengan fasilitas gedung dan halaman yang memadai, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan, justru memiliki capaian aktivitas fisik yang rendah. Alasan yang dikemukakan cenderung repetitif, seperti "tidak ada instruktur" atau "keterbatasan ruangan". Fenomena ini mengonfirmasi bahwa hambatan utama bukanlah infrastruktur fisik, melainkan mentalitas yang berlandung di balik alasan sarana prasarana ("Mitos Keterbatasan Ruangan").

D. Kesenjangan Tata Kelola Administratif dan Pemanfaatan Teknologi

Tantangan terakhir terletak pada diskrepansi antara perencanaan strategis di tingkat kabupaten dengan eksekusi taktis di tingkat OPD, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi.

Meskipun Bappelitbangda telah memfasilitasi koordinasi dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) GERMAS secara makro, output kebijakan tersebut belum sepenuhnya terjemahkan menjadi instrumen operasional mikro di tingkat dinas. Mayoritas OPD (termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial) terkonfirmasi belum memiliki Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Internal dan Dokumen Rencana Kerja yang formal. Selain itu, validitas data pelaporan (*Monitoring & Evaluasi*) masih menjadi catatan kritis, di mana ditemukan indikasi pelaporan administratif yang tidak terverifikasi lapangan, seperti adanya pelaporan data sanitasi dengan realisasi "0 kegiatan" namun diklaim "tidak ada masalah" dalam evaluasi internal.

Dari sisi teknologi, Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur digital untuk intervensi kesehatan pegawai. Sementara BPJS Kesehatan sukses melakukan skrining riwayat kesehatan digital kepada 219.866 peserta, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data daerah belum menginisiasi adaptasi teknologi serupa untuk internal pemerintah daerah (seperti notifikasi peregangan otot otomatis pada PC pegawai). Hal ini menjadi peluang besar yang terlewatkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan aparatur secara efisien.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT

3.1. Rekomendasi Secara Umum

Berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah yang disandingkan melalui analisis silang (*cross-analysis*) dengan Matrik Laporan Pelaksanaan GERMAS Sesuai Tupoksi Tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan bahwa status implementasi GERMAS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini berada pada fase "Transisi Administratif menuju Budaya Kerja".

Meskipun kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik mulai tumbuh secara organik di beberapa instansi (seperti Dinas Sosial dan Kementerian Agama), namun terdapat disparitas yang tajam dalam hal akses layanan kesehatan medis dan pemahaman substansial mengenai tata kelola lingkungan sehat. Tantangan utama yang teridentifikasi bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan adanya *silo mentality* (ego sektoral) dan keterputusan rantai kebijakan dari tingkat kabupaten ke tingkat operasional dinas.

Guna mengakselerasi transformasi GERMAS dari sekadar "kewajiban menggugurkan pelaporan" menjadi "kultur birokrasi yang produktif", maka dirumuskan 5 (lima) pilar rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Payung Hukum dan Institusionalisasi Kebijakan

Lemahnya kepatuhan administratif di tingkat mikro yang ditandai dengan banyaknya OPD tidak memiliki SK Tim Pelaksana dan Dokumen Rencana Kerja mengindikasikan bahwa GERMAS masih dianggap sebagai program *ad-hoc* atau tugas tambahan sukarela. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulasi yang bersifat *top-down* dan mengikat:

- a. Penerbitan Instruksi atau Surat Edaran (SE) Bupati: Direkomendasikan agar Bupati Pasuruan menerbitkan regulasi tegas tentang "Gerakan Wajib Lapor dan Wajib Sehat bagi ASN". Regulasi ini harus memuat klausul yang mewajibkan setiap Kepala OPD untuk membentuk Tim Pelaksana GERMAS internal dan mengalokasikan jam kerja khusus (15-

30 menit) pada hari Jumat untuk aktivitas fisik, yang tidak boleh diganggu oleh agenda rapat rutin.

- b. Integrasi Indikator Kesehatan dalam Manajemen Kinerja (SKP): Untuk mengubah perilaku individu ASN, indikator kesehatan partisipatif (seperti kepesertaan dalam skrining kesehatan tahunan atau partisipasi senam rutin) perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai salah satu komponen Penilaian Perilaku Kerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini bertujuan mengubah stigma GERMAS dari beban kerja menjadi indikator performa aparatur.

2. Restrukturisasi Sumber Daya Melalui Skema Kemitraan Lintas Sektor ("Bapak Angkat")

Analisis data memperlihatkan adanya paradoks anggaran: *leading sector* (BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan) memiliki alokasi dana promotif/preventif yang sangat besar (mencapai miliaran rupiah), sementara OPD teknis lainnya mengalami kendala biaya untuk pemeriksaan kesehatan dasar. Untuk meruntuhkan tembok ego sektoral ini, direkomendasikan strategi redistribusi sumber daya:

- a. Penerapan Mekanisme "Bapak Angkat": Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, dan BPJS Kesehatan perlu ditetapkan secara formal sebagai pembina teknis atau "Bapak Angkat" bagi klaster OPD non-kesehatan.
- b. Kanalisasi Program Prolanis dan Skrining: Anggaran besar yang tersedia di BPJS Kesehatan untuk program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan skrining riwayat kesehatan harus dikanalisasi secara agresif ke seluruh OPD. OPD teknis hanya bertugas memobilisasi pegawai (sebagai peserta), sementara BPJS/Dinkes menyediakan layanan medis dan pembiayaan. Dengan demikian, alasan "tidak ada anggaran" di tingkat OPD dapat dieliminasi tanpa membebani APBD tambahan.

3. Reorientasi Paradigma Operasional: Dari Pendekatan Infrastruktur ke Pendekatan Kultur

Evaluasi membuktikan bahwa ketersediaan fasilitas mewah tidak berkorelasi lurus dengan tingkat kebugaran pegawai. Instansi dengan fasilitas minim justru terbukti mampu mencetak skor aktivitas fisik 100% berkat komitmen manajemen yang kuat. Oleh karena itu, narasi pembangunan fisik harus digeser menjadi pembangunan kultur:

- a. Gerakan "Zero Cost Activity" (Aktivitas Tanpa Biaya): Menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk menghentikan ketergantungan pada instruktur senam berbayar atau pembangunan gedung olahraga. Fokus harus dialihkan pada optimalisasi sarana yang ada, seperti kewajiban peregangan otot (*stretching*) mandiri pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB yang dipandu melalui pengeras suara kantor, serta kampanye penggunaan tangga bagi kantor bertingkat.
 - b. Inovasi Pemanfaatan Ruang (Space Efficiency): Bagi OPD yang terkendala ruangan untuk Laktasi atau Klinik (seperti DPMD atau Dinas Perikanan), diwajibkan melakukan rekayasa ruangan sederhana menggunakan partisi (*partitioning*) yang higienis dan layak. Pemerintah daerah perlu menegaskan bahwa Ruang Laktasi tidak harus berupa gedung terpisah, melainkan ruang privat yang aman dan nyaman.
4. Transformasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berbasis Bukti
- Kualitas data pelaporan saat ini masih rentan terhadap praktik "Asal Bapak Senang" (ABS), di mana laporan administratif seringkali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan (contoh: klaim lingkungan sehat namun terdapat pembakaran sampah). Untuk menjamin validitas data, sistem Monev harus diperbarui:
- a. Digitalisasi Pelaporan Satu Pintu: Bappelitbangda disarankan untuk mengembangkan atau mengintegrasikan modul pelaporan GERMAS ke dalam aplikasi kinerja daerah yang sudah ada. Pelaporan harus berbasis bukti digital *real-time* (foto kegiatan bertanda waktu/lokasi), bukan sekadar dokumen narasi yang menumpuk di akhir tahun.
 - b. Mekanisme Uji Petik (Random Sampling Audit): Tim Pembina GERMAS Kabupaten wajib melaksanakan inspeksi mendadak atau uji petik

minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Fokus audit bukan pada kelengkapan dokumen, melainkan pada observasi fisik: kebersihan toilet, ketersediaan sabun cuci tangan, keberadaan puntung rokok di area terlarang, dan ketersediaan buah pada menu rapat.

5. Standardisasi Kesehatan Lingkungan Perkantoran (Green Office)

Merespons temuan spesifik mengenai praktik pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan (pembakaran sampah kertas) di beberapa instansi vertikal maupun daerah, diperlukan penegakan standar kesehatan lingkungan yang lebih ketat:

- a. Larangan Total Pembakaran Sampah: Pemerintah Kabupaten harus mengeluarkan larangan tegas terhadap segala bentuk pembakaran sampah di lingkungan kantor pemerintah. Sebagai solusinya, setiap OPD diwajibkan menjalin kerjasama (MOU) dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Bank Sampah terdekat untuk pengangkutan dan daur ulang limbah kertas/plastik.
- b. Supervisi Kantin Sehat: Dinas Kesehatan perlu melakukan supervisi berkala terhadap kantin-kantin di lingkungan perkantoran pemerintah untuk memastikan standar higiene sanitasi pangan dan ketersediaan menu gizi seimbang, guna mendukung penurunan risiko penyakit tidak menular (hipertensi/diabetes) di kalangan ASN.

Rekomendasi ini disusun sebagai kerangka kerja komprehensif yang diharapkan dapat diadopsi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya, guna mewujudkan birokrasi Kabupaten Pasuruan yang sehat, produktif, dan menjadi teladan bagi masyarakat luas.

3.2. Langkah Tindak Lanjut

Guna memastikan bahwa rekomendasi strategis yang telah dirumuskan tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan sebuah Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang bersifat imperatif. RTL ini dirancang sebagai peta jalan atau roadmap operasional yang berfungsi menerjemahkan kebijakan makro menjadi langkah-langkah kerja mikro yang konkret

di tingkat Perangkat Daerah. Strategi pelaksanaan tindak lanjut ini disusun secara bertahap dan sistematis ke dalam tiga fase prioritas utama, yakni Fase Inisiasi untuk jangka pendek, Fase Stabilisasi untuk jangka menengah, dan Fase Institusionalisasi untuk jangka panjang. Pembagian fase ini bertujuan strategis untuk mengurai berbagai sumbatan administratif terlebih dahulu sebelum melangkah pada intervensi programatik yang lebih kompleks.

A. Fase Pertama: Inisiasi dan Legalitas (Bulan ke-1 hingga Bulan ke-3)

Fase awal ini menempatkan fokus utama pada upaya melengkapi instrumen administrasi yang belum terpenuhi serta memulai aktivitas fisik sederhana yang tidak membebani anggaran, atau sering disebut sebagai strategi *Low Hanging Fruits*. Target fundamental pada triwulan pertama ini adalah membangun kepatuhan formal di seluruh lini organisasi. Langkah prioritas dimulai dengan penerbitan Instruksi Bupati tentang Percepatan GERMAS. Mengingat masih lemahnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membentuk tim internal, diperlukan landasan yuridis yang kuat dan mengikat. Oleh karena itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Bappelitbangda harus segera menyusun Surat Edaran atau Instruksi Bupati yang secara spesifik mewajibkan pelaksanaan peregangan otot atau *stretching* pada pukul 10.00 dan 14.00 WIB, penyediaan buah-buahan lokal dalam setiap rapat dinas untuk menggantikan kudapan tinggi gula, serta penerapan larangan merokok di ruang kerja tertutup tanpa toleransi sedikit pun.

Bersamaan dengan penguatan regulasi, langkah selanjutnya adalah pembentukan Satuan Tugas atau Satgas GERMAS di tingkat unit kerja. Berdasarkan temuan evaluasi sebelumnya, mayoritas OPD belum memiliki struktur pelaksana yang jelas. Pada fase ini, seluruh Kepala OPD diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana GERMAS Internal. Penerbitan SK ini ditekankan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai penunjukan *Person in Charge* (PIC) yang secara nyata bertanggung jawab menggerakkan senam rutin dan memantau kebersihan kantor. Pemerintah Kabupaten menargetkan bahwa seratus persen OPD harus sudah memiliki SK ini dalam triwulan pertama.

Melengkapi aspek legalitas dan struktur, fase ini juga ditandai dengan peluncuran Gerakan "Kantor Resik" yang mengusung semangat Meja Bersih dan Paru

Sehat. Gerakan ini merupakan respons cepat terhadap temuan praktik pembakaran sampah kertas dan keberadaan puntung rokok di area kerja, sebagaimana ditemukan dalam studi kasus di Kemenag dan beberapa dinas teknis lainnya. Gerakan pembersihan dilakukan secara serentak, di mana setiap OPD diwajibkan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Lingkungan Hidup atau Bank Sampah lokal untuk pengelolaan dan pengangkutan limbah kertas. Selain itu, gerakan ini juga mencakup penertiban seluruh asbak dari ruang kerja berpendingin udara (AC) untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

B. Fase Kedua: Stabilisasi dan Kemitraan (Bulan ke-4 hingga Bulan ke-6)

Memasuki bulan keempat, fokus beralih pada upaya memecahkan masalah klasik terkait ketiadaan anggaran melalui kolaborasi lintas sektor yang konkret. Strategi utamanya adalah eksekusi skema "Bapak Angkat" Kesehatan. Dalam skema ini, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan mulai bergerak aktif sebagai pengampu bagi OPD non-kesehatan dengan mekanisme kerja "Jemput Bola". BPJS Kesehatan memiliki peran untuk mengalokasikan jadwal layanan *mobile screening* atau Skrining Riwayat Kesehatan ke kantor-kantor dinas teknis yang selama ini capaian skriningnya rendah, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat akan melakukan kunjungan berkala untuk pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM) dasar, meliputi pemeriksaan tensi dan gula darah sewaktu bagi ASN yang berisiko tinggi. Dengan pendekatan jemput bola ini, hambatan biaya dan akses di tingkat OPD dapat dieliminasi secara efektif.

Sejalan dengan intervensi medis, aspek teknologi juga dimaksimalkan melalui digitalisasi intervensi kesehatan pegawai. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengambil peran sentral dalam mengembangkan atau menginstal sistem notifikasi sederhana berupa *pop-up* pada jaringan intranet Pemkab. Sistem ini dirancang untuk memunculkan instruksi peregangan otot secara otomatis di layar komputer seluruh pegawai setiap jam yang telah ditentukan. Inovasi ini merupakan solusi teknologi berbiaya rendah yang sangat krusial untuk menjaga konsistensi perilaku sehat pegawai tanpa harus terus-menerus bergantung pada instruksi lisan pimpinan.

Selain itu, fase stabilisasi ini juga menyasar intervensi infrastruktur minimalis, khususnya terkait penyediaan Ruang Laktasi dan kantin sehat. Dinas Pemberdayaan Perempuan (DP3AP2KB) bersama Dinas Kesehatan akan melakukan supervisi teknis ke OPD yang belum memiliki fasilitas tersebut. Pendampingan yang diberikan ditekankan pada solusi praktis, bukan untuk membangun gedung baru yang memakan biaya besar, melainkan mengajarkan cara membuat "Pojok Laktasi" dengan menggunakan partisi atau sekat yang tetap memenuhi standar privasi dan higiene bagi ibu menyusui.

C. Fase Ketiga: Institusionalisasi dan Budaya (Bulan ke-7 hingga Bulan ke-12)

Fase terakhir yang berlangsung pada semester kedua bertujuan menjadikan perilaku sehat sebagai bagian dari indikator kinerja dan budaya organisasi yang permanen. Langkah strategis pertama adalah integrasi GERMAS dalam manajemen kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) mulai memasukkan parameter kesehatan ke dalam sistem penilaian kinerja elektronik (e-Kinerja). Partisipasi aktif dalam cek kesehatan tahunan dan aktivitas senam rutin dijadikan salah satu poin penilaian dalam aspek Perilaku Kerja ASN. Kebijakan ini menegaskan pesan bahwa kesehatan fisik merupakan prasyarat mutlak bagi produktivitas kerja.

Untuk memacu motivasi antar-instansi, Bappelitbangda akan menyelenggarakan kompetisi tahunan bertajuk "GERMAS Award". Kriteria penilaian dalam kompetisi ini diubah total dari paradigma lama. Penilaian tidak lagi didasarkan pada kemewahan fasilitas gedung, melainkan pada besarnya usaha atau *effort* manajemen dalam menerapkan budaya sehat. Indikator utama yang dinilai meliputi persentase pegawai yang sudah melakukan skrining kesehatan, tingkat kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok, serta kreativitas dalam menciptakan aktivitas fisik tanpa biaya.

Rangkaian pelaksanaan RTL ini akan ditutup dengan audit lingkungan dan kesehatan akhir tahun. Tim Pembina GERMAS Kabupaten akan melaksanakan uji petik atau audit komprehensif untuk memvalidasi data pelaporan dari setiap OPD. Langkah audit ini sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi manipulasi data

sekadar "Asal Bapak Senang", serta memastikan kondisi sanitasi dan toilet kantor benar-benar memenuhi standar kesehatan lingkungan kerja yang layak.

Tabel 3.2 Matriks Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025-2026

No	Kegiatan Strategis	Indikator Output	Penanggungjawab	Waktu
A ASPEK REGULASI & ADMINISTRASI				
1	Penerbitan SE Bupati tentang Wajib GERMAS ASN	Terbitnya Surat Edaran	Bagian Hukum & Bappelitbangda	Bulan 1
2	Penetapan SK Tim Pelaksana di seluruh OPD	100% OPD memiliki SK	Seluruh Kepala OPD	Bulan 1-2
3	MoU Pengelolaan Limbah Kertas/Plastik Kantor	Terlaksananya MoU dengan Bank Sampah/DLH	Sekretaris Dinas (Sekdin) tiap OPD	Bulan ke-2
B ASPEK PELAYANAN KESEHATAN (MEDIS)				
4	Skrining Kesehatan Keliling (Skema Bapak Angkat)	Terlaksananya cek kesehatan di 17 OPD	Dinkes & BPJS Kesehatan	Bulan 4-6 (Triwulan II)
5	Pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN untuk Skrining Mandiri	100% ASN mengisi skrining digital	BKPSDM & BPJS Kesehatan	Bulan 3
C ASPEK AKTIVITAS FISIK & LINGKUNGAN				
6	Aktivasi Notifikasi <i>Stretching</i> Digital (Pop-up PC)	Aplikasi terinstal di PC ASN	Diskominfo	Bulan 4
7	Penertiban Pembakaran Sampah & Kawasan Tanpa Rokok	MoU Pengangkutan Sampah & Nihil Asbak	DLH & Satpol PP	Bulan 2-3
8	Penyediaan Ruang Laktasi Minimalis (Partisi)	Tersedianya ruang privat menyusui	DP3AP2KB & Umum OPD	Bulan 5-8
D MONITORING & EVALUASI				
9	Integrasi Indikator Sehat dalam SKP ASN	Revisi pedoman penilaian perilaku kerja	BKPSDM	Bulan ke-9

No	Kegiatan Strategis	Indikator Output	Penanggungjawab	Waktu
10	Uji Petik Lapangan (Sidak Germas)	Laporan Hasil Sidak Semesteran	Tim Pembina GERMAS Kab.	Bulan 6 & 12
11	Penganugerahan Germas Award	Terpilihnya 3 OPD Terbaik	Bappelitbangda	Bulan 12

Secara keseluruhan, matriks pelaksanaan rencana tindak lanjut tahun 2025-2026 ini mencakup empat aspek utama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pada aspek Regulasi dan Administrasi, Bagian Hukum dan Bappelitbangda bertanggung jawab atas penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Wajib GERMAS ASN pada bulan pertama, yang diikuti oleh penetapan SK Tim Pelaksana GERMAS Internal oleh seluruh Kepala OPD pada bulan pertama hingga kedua, serta pelaksanaan MoU pengelolaan limbah kertas dengan Bank Sampah yang dikoordinir oleh Sekretaris Dinas tiap OPD pada bulan kedua.

Pada aspek Pelayanan Kesehatan Medis, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan memegang kendali atas pelaksanaan skema "Bapak Angkat" dan cek kesehatan keliling di 17 OPD sasaran pada triwulan kedua, sementara BKPSDM bersama BPJS Kesehatan memastikan pemanfaatan aplikasi Mobile JKN untuk skrining mandiri tuntas pada bulan ketiga. Beranjak ke aspek Aktivitas Fisik dan Lingkungan, Diskominfo bertanggung jawab atas aktivasi notifikasi *stretching* digital pada bulan keempat. Satpol PP bersama bagian umum OPD bertugas menertibkan Kawasan Tanpa Rokok internal dengan target nihil asbak pada bulan kedua hingga ketiga, sedangkan DP3AP2KB mengawal penyediaan ruang laktasi minimalis pada bulan kelima hingga kedelapan.

Terakhir, pada aspek Monitoring dan Evaluasi, BKPSDM akan merevisi pedoman penilaian perilaku kerja untuk mengintegrasikan indikator sehat dalam SKP ASN pada bulan kesembilan. Tim Pembina GERMAS Kabupaten akan melakukan uji petik lapangan atau sidak semesteran pada bulan keenam dan kedua belas, yang kemudian dipuncaki dengan penganugerahan "Germas Award" oleh Bappelitbangda pada akhir tahun untuk memilih tiga OPD terbaik dan tiga OPD terbawah sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi kinerja.

BAB IV LAMPIRAN

4.1. Bappelitbangda

Tabel 4.1 Formulir Identifikasi Masalah Bappelitbangda

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	Tidak ada ruangan yang memadai di Bapperida	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pemanfaatan fasilitas olahraga terdekat (lapangan, GOR, atau ruang terbuka publik) serta mengatur jadwal kegiatan olahraga rutin bagi pegawai Bapperida.	Dukungan pimpinan terhadap kegiatan GERMAS, Partisipasi aktif pegawai, Ketersediaan fasilitas olahraga di sekitar kantor
2	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	Sebelumnya sudah ada kegiatan tersebut namun sekarang sudah tidak laksanakan	Mengaktifkan kembali kegiatan peregangan bersama setiap hari kerja pukul 10.00 WIB dengan penugasan petugas pengingat (PIC) serta penyampaian instruksi melalui media internal.	Komitmen pimpinan dan pegawai, Kemudahan pelaksanaan tanpa sarana khusus, Sosialisasi yang konsisten
3	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Bapperida	Mengusulkan pengadaan dan penataan fasilitas kerja ergonomis (kursi, meja kerja, dan tata ruang) secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas kebutuhan.	Dukungan anggaran, Perencanaan pengadaan yang tepat, Kesadaran pegawai akan pentingnya ergonomi kerja

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
4	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memerlukan APD	Melakukan identifikasi ulang kebutuhan APD sesuai jenis aktivitas kerja dan memastikan ketersediaan APD apabila terdapat kegiatan atau kondisi kerja yang memerlukan perlindungan khusus.	Evaluasi risiko kerja yang akurat, Kesiapsiagaan organisasi terhadap kondisi darurat, Kepatuhan terhadap standar K3
5	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	Tidak ada ruangan yang memadai di Bapperida	Menetapkan mekanisme pelaporan kejadian kecelakaan kerja melalui saluran internal (admin kepegawaian atau aplikasi pelaporan) serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.	Kejelasan prosedur pelaporan, Respons cepat dari penanggung jawab, Kesadaran pegawai untuk melapor
6	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Bapperida	Mengupayakan pemanfaatan ruang yang ada sebagai area makan bersama serta mendorong konsumsi pangan sehat melalui imbauan dan kerja sama dengan penyedia makanan sehat.	Dukungan kebijakan internal, Perubahan perilaku hidup sehat pegawai, Ketersediaan alternatif pangan sehat

Tabel 4.2 Formulir Evaluasi Bappelitbangda

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		50	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		62.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
	4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		0		
	5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		
	6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
	7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
	8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
	1	Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
	2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
	3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
	4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		100	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			
	6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
	1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
	2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
	3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	1			
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	29			

4.2. BNN Kabupaten Pasuruan

Tabel 4.3 Formulir Identifikasi Masalah BNN Kabupaten Pasuruan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan snack buah saat rapat	Keterbatasan anggaran sehingga konsumsi rapat difokuskan pada kebutuhan utama dan efisiensi belanja	Meningkatkan penerapan prinsip GERMAS pada setiap kegiatan perkantoran termasuk pengaturan konsumsi buah sesuai kemampuan anggaran	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan GERMAS khususnya dalam mengalokasikan anggaran snack buah saat rapat
2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman dan seimbang di tempat kerja	Belum adanya kebijakan internal khusus yang mengatur pengelolaan kantin sehat di tempat kerja	Menyusun dan menetapkan kebijakan internal mengenai pengelolaan ruang makan atau kantin sehat di tempat kerja	Terbitnya regulasi dan pedoman teknis terkait pengelolaan ruang makan atau kantin sehat di tempat kerja serta partisipasi dan kepatuhan pegawai dalam menerapkan kebiasaan konsumsi makanan sehat
3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	Minimnya edukasi dan informasi terkait gizi seimbang di tempat kerja	Sosialisasi tentang kecukupan gizi seimbang melalui poster, leaflet, infografis, dan konten digital serta mengintegrasikan materi gizi seimbang ke dalam kegiatan rutin perkantoran seperti apel, rapat atau pembinaan pegawai	Meningkatnya pemahaman pegawai dalam menerapkan gizi seimbang yang ditunjukkan melalui pengetahuan tentang porsi makan, variasi pangan, serta pemilihan makanan yang sehat dalam aktivitas sehari-hari

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
4	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental	Belum adanya kebijakan internal khusus yang mengatur pelaksanaan skrining kesehatan mental di tempat kerja	Menyusun dan menetapkan kebijakan internal terkait pelaksanaan skrining kesehatan mental serta bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan	Terjalinnya kerja sama dengan fasilitasi layanan kesehatan dalam menyelenggarakan skrining kesehatan mental
5	Adanya koordinator/ Tim Pelaksana GERMAS tertuang dalam bentuk SK	Belum terbentuknya SK tim pelaksana GERMAS di lingkungan kerja	Menyusun dan menetapkan nama-nama dalam tim pelaksana berikut dengan koordinator GERMAS di lingkungan kantor	Terbitnya SK tim pelaksana GERMAS di lingkungan kerja

Tabel 4.4 Formulir Evaluasi BNN Kabupaten Pasuruan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		100	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;		0	25	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		66.66666667	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		100	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		1			
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		75	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	30			

4.3. BPJS Kesehatan

Tabel 4.5 Formulir Identifikasi Masalah BPJS Kesehatan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Olahraga bersama untuk semua pegawai	tidak ada	kegiatan rutin dilaksanakan setiap minggu	indikator berhasil dan telah dilakukan secara rutin
2	mendukung go green dengan menggunakan tumbler bagi semua pegawai	tidak ada	dilakukan oleh semua pegawai	terlaksana
3	dalam pelaksanaan kegiatan didukung dengan makanan menyehatkan	tidak ada	dapat rutin dilakukan baik di internal dan eksternal	telah terlaksana
4	pengelolaan sampah kantor	tidak ada	pelaksanaan dapat berkelanjutan	telah terlaksana di semua unit kerja
5	menyediakan ruang laktasi dan layanan disabilitas	tidak ada	pelaksanaan dapat berkelanjutan	telah terlaksana di semua unit kerja

Tabel 4.6 Formulir Evaluasi BPJS Kesehatan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		100	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1		Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		100	
2		Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
3		Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		100	
2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		1			
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		100	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		1			
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		100	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	35			

4.4. Bupati Pasuruan

Tabel 4.7 Formulir Evaluasi Bupati Pasuruan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		100	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
2		Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		1		100	
2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		1			
3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		100	
2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
5		Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		1			
3	Adanya Perencanaan terintegrasi		1			
4	Adanya Monitoring & Evaluasi		1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		1			
2	Adanya pelaporan hasil kegiatan					
	TOTAL		34			

4.5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 4.8 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	Belum adanya kegiatan senam bersama yang berkesinambungan, hanya terdapat kegiatan senam bersama dengan frekuensi yang tidak rutin.	menjadikan kegiatan ayo bergerak atau senam bersama sebagai prioritas, dan mengimplementasikan dengan rutin	Penentu keberhasilan utama adalah adanya kemauan yang tinggi dari peserta kegiatan ayo bergerak atau senam bersama, karena kegiatan ini bersifat rutin sehingga berpotensi mudah mengalami jenuh. Serta perlu adanya inovasi yang berkelanjutan oleh instruktur senam atau pemandu kegiatan olahraga
2	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	Belum dilakukan penyuluhan terhadap pelaksanaan kegiatan peregangan 5 menit dalam sehari	Menyusun program sosialisasi dan promosi terhadap kegiatan peregangan 5 menit dalam sehari, serta adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut	Adanya penyuluhan yang berkesinambungan dan harus disertai dengan monitoring/evaluasi secara berkala agar kegiatan dapat tetap berlangsung optimal
3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	Belum pernah dilakukan pengukuran IMT dalam rangka mengukur kecukupan gizi serta tingkat kesehatan karyawan/karyawati di dispora, karena IMT merupakan indikator awal terhadap tingkat kesehatan seseorang	Mengadakan tes dan pengukuran IMT minimal setahun sekali, sehingga terdapat kegiatan untuk memantau kesehatan karyawan/karyawati	untuk mencapai keberhasilan program ini perlu adanya alat yang memadai serta sdm yang memiliki kompetensi untuk mengukur IMT

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
4	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental)	belum adanya pemeriksaan kesehatan berkala utamanya kesehatan mental terhadap seluruh karyawan/karyawati	Mengadakan pemeriksaan kesehatan utamanya kesehatan mental, karena mental yang sehat merupakan pondasi dalam memberikan pelayanan yang optimal	Perlu adanya kerja sama dengan instansi terkait yang memiliki kompetensi untuk mengukur kesehatan mental karyawan/karyawati, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan

Tabel 4.9 Formulir Evaluasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu		0	25	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)		0		
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		75	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		0		
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		50	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F		Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :				
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		75	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		0		
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II		PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS				
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		25	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	20			

4.6. Dinas Kesehatan

Tabel 4.10 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Kesehatan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Aktifitas Fisik	Tidak ada peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit di tempat kerja	Mengadakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit di tempat kerja	Koordinasi antar OPD terkait peregangan di tempat kerja

Tabel 4.11 Formulir Evaluasi Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		100	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1	Menyediakan snack buah saat rapat;		1		100	
2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		1			
3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		1			
4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		100	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	34			

4.7. Dinas Ketenagakerjaan

Tabel 4.12 Formulir Evaluasi Dinas Ketenagakerjaan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		87.5	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.			0		
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1	Menyediakan snack buah saat rapat;		1		50	
2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
	3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
	4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		1			
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).			0	75	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	1			
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin				
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan				

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
		TOTAL	25			

4.8. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.13 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga ditempat	Tidak tersedianya tempat khusus dan perlengkapan olahraga, serta tidak adanya jadwal khusus untuk melaksanakan kegiatan	Akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan bidang yang bersangkutan	-
2	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan Jam 14.00 WIB minimal 5 menit	Tidak terjadwal	Akan dilakukan koordinasi	-
3	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	Gedung terletak di lantai satu	Menempelkan stiker/himbauan untuk penggunaan tangga	-
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja	belum ada sosialisasi serta sarana dan fasilitas pendukung ergonomis	Akan di koordinasikan lebih lanjut	-
5	Menyediakan alat pelindung diri (APD) secara GRATIS	Belum tersedianya alat APD	Akan di koordinasikan lebih lanjut	-

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
	sesuai dengan resiko bahaya di tempat kerja			
6	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman dan seimbang di tempat kerja	Tidak tersedianya kantin di gedung perkantoran	Akan dikoordinasikan lebih lanjut	-
7	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan menggunakan IMT	Belum pernah dilakukan pengukuran IMT dalam rangka mengukur kecukupan gizi serta tingkat kesehatan karyawan/karyawati Dinas Kominfo	Mengadakan test dan pengukuran IMT minimal setahun sekali, sehingga dapat memantau kesehatan dan pemenuhan gizi sehat bagi para karyawan/karyawati	-
8	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahu sekali	Belum pernah dilakukan skrining kebugaran jasmani di dinas kominfo	Mengadakan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali	-
9	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental)	Belum adanya pemeriksaan berkala utamanya kesehatan mental terhadap karyawan/karyawati dinas kominfo	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dalam rangka memastikan kesehatan para karyawan/karyawati sebagai pondasi utama sehingga lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik	-
10	Melaksanakan skiring gangguan kesehatan mental	tidak terjadwalkan	Akan dikoordinasikan lebih lanjut	-

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
11	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran	tidak terjadwalkan dan belum ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran	akan di lakukan koordinasi lebih lanjut serta memanfaatkan sampah dan limbah domestik menjadi sesuatu yang bermanfaat	-
12	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan	Belum terjadwal	Akan dikoordinasikan lebih lanjut	-

Tabel 4.14 Formulir Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		25	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)		0		
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		75	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		0		
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		50	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33333333	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		75	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0		
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan		0	0	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	17			

4.9. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.15 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Lingkungan Hidup

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Aktifitas Fisik	kegiatan peningkatan fisik yang dilakukan belum tersistem atau terorganisir dengan baik, sehingga tidak terpantau dan tercatat	kedepan akan dibangun sistem peningkatan aktifitas fisik bagi ASN DLH Kab. Pasuruan	Butuh peran Pimpinan dalam mendukung berjalannya sistem
2	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	belum tersedia kotak P3K	kedepan akan difasilitasi kotak P3K	direncanakan dalam penganggaran
		belum terdapat saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja yang bersifat formal, sebetulnya sudah ada upaya konsultasi secara non formal	perlu dibuatkan saluran yang formal untuk pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja	Butuh peran Pimpinan dalam mendukung terciptanya saluran pelaporan yang formal
3	Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	sudah terdapat kantin umum yang dikelola oleh swasta, namun kesadaran untuk memilih makanan yang sesuai kebutuhan yang masih kurang, sehingga masalah gizi lebih ke kelebihan kalori	kampanye makan dengan gizi seimbang	Butuh peran Pimpinan untuk menjadi figur teladan

Tabel 4.16 Formulir Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR EVALUASI			NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER			Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA						
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik						
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu			0	0	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja			0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit			0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)			0		
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :						
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		75	tempat sampah, toilet, wastafel

NO	INDIKATOR EVALUASI			NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER			Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);			1			tidak boleh merokok di kawasan kantor
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;			1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;			1			sarana kantor ergonomis (kursi rapat)
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;			1			alat pelindung diri bagi pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (APD bagi PPLHD)
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.				0		
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa				0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			seluruh ASN sudah tercover BPJS
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
	1	Menyediakan snack buah saat rapat;	1		50	terdapat komponen buah pada nasi kotak rapat
	2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
	3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
	4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			disediakan ruang laktasi dan kulkas penyimpanan ASI

NO	INDIKATOR EVALUASI			NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER			Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit						
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;			0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);			0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;			0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan						
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		1			
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		50	sosialisasi pengelolaan lingkungan (persampahan)
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.			0		
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan		0	0	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL		16		

4.10. Dinas Pariwisata

Tabel 4.17 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pariwisata

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memerlukan APD		
2	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Pariwisata		
3	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Pariwisata		

Tabel 4.18 Formulir Evaluasi Dinas Pariwisata

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		75	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		n/a
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		50	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		100	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan			0	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK				

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi				
4		Adanya Monitoring & Evaluasi				
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			
		TOTAL	27			

4.11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.19 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	Tidak ada ruangan yang memadai di DPMD	Akan di laksanakan lagi sesuai intruksi yang ada	
2	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	Tidak ada sarana dan fasilitas di tempat kerja	Akan di laksanakan lagi sesuai intruksi yang ada	
3	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	Tidak ada sarana dan fasilitas di tempat kerja	Akan di laksanakan lagi sesuai intruksi yang ada	
4	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	Tidak ada sarana dan fasilitas di tempat kerja	Akan di laksanakan lagi sesuai intruksi yang ada	
5	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	Tidak ada sarana dan fasilitas di tempat kerja	Akan di laksanakan lagi sesuai intruksi yang ada	

Tabel 4.20 Formulir Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		62.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		0		
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33333333	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		100	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		1			
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		50	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3	Adanya Perencanaan terintegrasi			0		
4	Adanya Monitoring & Evaluasi		1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		1			
2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		1			
	TOTAL		24			

4.12. DP3AP2KB

Tabel 4.21 Formulir Identifikasi Masalah DP3AP2KB

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	Tidak ada ruangan yang memadai di Dp3ap2kb		
2	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	Sebelumnya sudah ada kegiatan tersebut namun sekarang sudah tidak laksanakan		
3	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	ada sarana dan fasilitas yang aronomis di tempat kerja		
4	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memerlukan APD		
5	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	ada melalui pusyangatra dan puspaga dan aplikasi barcode keluhan pelanggan		
6	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Dp3ap2kb		

Tabel 4.22 Formulir Evaluasi DP3AP2KB

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		100	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1	Menyediakan snack buah saat rapat;		1		75	
2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT			0		
4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;			0	0	
2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);			0		
3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;			0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		100	
2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		1			
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
	1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
	2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
	3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	1			
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
		TOTAL	30			

4.13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 4.23 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	Dinas tidak menyelenggarakan skrining kebugaran sendiri tetapi mengikuti agenda PMI dan Kabupaten	Mengusulkan anggaran biaya skrining untuk pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan	Tim Pelaksana Germas mengusulkan pada bagian Perencana Program
2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	Dinas tidak menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala	Mengusulkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan	Tim Germas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pemeriksaan secara berkala
3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	Dilaksanakan pemeriksaan hanya kepada staf yang terindikasi mengidap gangguan mental	Mengusulkan kegiatan pemeriksaan oleh psikolog	Tim Germas mendatangkan psikolog untuk melakukan konseling
4	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	Sampah yang dihasilkan diserahkan sepenuhnya kepada DLH	Mengusulkan pengadaan tempat sampah terpilah (organik dan anorganik) pada Dinas Pendidikan dan Membekali SDM untuk menerapkan pemilahan sampah	Bak sampah terpilah tersedia pada Dinas Pendidikan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
5	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	Belum pernah dilakukan	Menunjuk staf yang kompeten sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan	Staf/selaku agen perubahan berperan aktif dalam promosi kesehatan
6	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	Belum menyusun SK	Menyusun SK Tim Pelaksana Germas	Tersusun SK Tim Pelaksana Germas
7	Adanya Perencanaan terintegrasi	Belum menyusun perencanaan terintegrasi	Tim Pelaksana menyusun perencanaan pelaksanaan Germas	Kegiatan Germas terfasilitasi pada RKA Dinas Pendidikan
8	Adanya Monitoring & Evaluasi	Belum pernah dilakukan monitoring dan Evaluasi	Menyusun jadwal monitoring dan Evaluasi oleh Tim Pelaksana Germas	Tim Germas melaksanakan monitoring dan evaluasi
9	Adanya pelaporan hasil kegiatan	Belum menyusun laporan hasil kegiatan	Tim Pelaksana Germas menyusun Germas	Tersusunnya laporan Germas oleh Tim Pelaksana

Tabel 4.24 Formulir Evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		100	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1		Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
2		Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
3		Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33333333	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		
	6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		75	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.			0		
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		25	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	26			

4.14. Dinas Perhubungan

Tabel 4.25 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perhubungan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Tersedianya angkutan penumpang yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	Masih terdapat angkutan di zona yang terkoneksi dengan jalur sepeda ataupun jalur pejalan kaki yang belum berbadan hukum sehingga terkait perizinan belum diurus ataupun diperpanjang	Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yaitu dengan mensosialisasikan kepada pengemudi terkait kewajiban angkutan berbadan hukum serta menyediakan sistem layanan perizinan kepengurusan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan yang lebih efektif dan efisien	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan untuk penggunaan jalan dan penggunaan sepeda	Perlunya Penetapan Wilayah yang khusus dalam pengembangan Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda yang nyaman dan sesuai dengan kondisi Tata Guna Lahan	Kajian Pengembangn Lokasi Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda	
	Melaksanakan peregangn setiap jam 10.00 WIB dan jam	padatnya kegiatan dan kurangnya komitmen menyebabkan kegiatan ini	himbauan kepada kepala seksi untuk mengajak dan mengingatkan staf di setiap	

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
	14.00 WIB minimal 5 menit	jarang dilaksanakan di setiap ruangan di dinas perhubungan	sesksinya untuk melaksanakan kegiatan peregangan	
	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dengan melakukan pengukuran IMT di lingkungan Dinas Perhububungan	mensosialisasikan perhitungan IMT online yang dapat dilaksanakan menggunakan gadget masing2 pegawai	
	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	efisiensi anggaran hanya pada kegiatan pendukung IKU Dinas Perhubungan	merencanakan penganggaran kegiatan pada tahun berikutnya	
	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	masih terbatasnya pemilahan sampah sejak dari sumber, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai sesuai standar, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi aparatur	Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah di Sumber, Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana, dan Peningkatan Kesadaran dan Perilaku Aparatur	

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
		dalam menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.		
	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	Agen Perubahan di Dinas Perhubungan masih berfokus pada agen perubahan oeningkatan layanan perhubungan	pemilihan pegawai yang menjadi agen perubahan kesehatan	
	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	belum di susun SK tim Kesehatan OPD	penyusunan SK Tim Kesehatan OPD	
	Adanya Monitoring & Evaluasi	belum ada standar monitoring dan evaluasi	pada SK tim di susun standar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
	Adanya kegiatan pemantauan rutin	belum ada standar pemantauan	pada SK tim di susun standar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	
	Adanya pelaporan hasil kegiatan	belum ada standar laporan kegiatan tersebut	pada SK tim di susun standar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	

Tabel 4.26 Formulir Evaluasi Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		100	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		66.66666667	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33333333	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		75	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0		
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		50	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	26			

4.15. Dinas Perikanan

Tabel 4.27 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perikanan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Perikanan		
2	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	Belum pernah disosialisasikan	Akan dilaksanakan sesuai intruksi yang ada	
3	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Perikanan	Akan dibangun fasilitas ergonomis di Bapperida	
4	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memerlukan APD		
5	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Perikanan		
6	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	Tidak ada ruangan yang memadai di Dinas Perikanan		

Tabel 4.28 Formulir Evaluasi Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		50	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		62.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		0		
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		100	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		50	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.				
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).				
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		25	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	22			

4.16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.29 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	masih terfokus pada lokasi tertentu belum menyeluruh	melaksanakan kegiatan lebih menyeluruh	keberhasilan pelaksanaan didukung oleh peran serta ikm secara maksimal

Tabel 4.30 Formulir Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		87.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		0		
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		50	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		0		
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33333333	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		75	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0		
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		50	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3	Adanya Perencanaan terintegrasi			0		
4	Adanya Monitoring & Evaluasi		1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		1			
2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		0			
	TOTAL		23			

4.17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 4.31 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Festival Produk Pertanian	Sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian dan ketahanan pangan, namun banyak produk pertanian lokal belum dikenal luas akibat terbatasnya promosi, inovasi pemasaran, dan akses pasar. Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian serta kurangnya informasi masyarakat tentang kualitas dan keunggulan produk lokal turut memperlambat peningkatan daya saing petani dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Festival Produk Pertanian sebagai wadah promosi, edukasi, dan penguatan jejaring usaha guna meningkatkan nilai jual produk, memperluas pasar, serta menumbuhkan minat masyarakat terhadap sektor pertanian.	Festival Produk Pertanian dijadikan agenda rutin untuk memperkuat promosi produk lokal secara berkelanjutan, disertai peningkatan kualitas kemasan, branding, dan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing produk. Pelibatan generasi muda, UMKM, serta kemitraan dengan berbagai pihak perlu diperkuat untuk mendorong inovasi dan perluasan pasar. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pembentukan tim koordinasi, penyelenggaraan pelatihan lanjutan, pengembangan database dan platform promosi produk, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan dampak nyata terhadap peningkatan penjualan dan kesejahteraan petani.	Kerjasama lintas sektor mulai hulu hingga hilir, sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan
2	Pelatihan Pangan Beragam, Bergizi	Perilaku konsumsi pangan masyarakat yang masih belum menerapkan prinsip gizi seimbang maupun prinsip B2SA	Untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan pola makan yang bergizi, seimbang, aman berbasis pangan lokal diperlukan upaya yang terus-menerus melalui kegiatan sosialisasi, promosi, pembinaan, pameran aneka produk	Perubahan perilaku masyarakat setelah mendapatkan pelatihan untuk menerapkan prinsip pangan B2SA

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
	Seimbang, dan Aman		olahan, lomba cipta menu, maupun media publikasi lainnya seperti penyebaran leaflet, banner dan poster serta spot iklan yang berisikan informasi tentang penganekaragaman pangan dan pangan Beragam Berigizi Seimbang dan Aman (B2SA).	

Tabel 4.32 Formulir Evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		87.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		n/a		
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		66.66666667	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		100	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		1			
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		25	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
4		Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	26			

4.18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.33 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Drainase yang baik diperlukan untuk membuat lingkungan permukiman menjadi sehat. Jika tidak tertangani dengan baik maka akan terjadi genangan, menjadi sumber penyakit dan merusak infrastruktur yang lain	Pemeliharaan drainase lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Aspek Teknis dan Perencanaan yang Matang, Manajemen dan Kerja Sama antar instansi, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat
		Jalan lingkungan yang baik dan aman menjadi tempat ideal bagi warga untuk berjalan kaki santai, lari pagi/sore, atau bersepeda. Dengan nyaman melakukan aktifitas jalan kaki / berolahraga maka bisa meningkatkan kesehatan	Pembangunan jalan lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Aspek Teknis dan Perencanaan yang Matang, Manajemen dan Kerja Sama antar instansi, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat
		Daerah padat penduduk / permukiman, sering kali tidak memiliki fasilitas sanitasi pribadi yang memadai. Seringkali dalam satu area tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuat jamban pribadi karena alasan kecukupan ruang dan kesehatan. jadi jarak antara sumber air dan jamban terlalu dekat.	Pembangunan MCK Komunal dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Aspek Teknis dan Perencanaan yang Matang, Manajemen dan Kerja Sama antar instansi, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
		Daerah padat penduduk / permukiman, sering kali tidak memiliki fasilitas sanitasi pribadi yang memadai di rumah masing-masing dan terkadang dibuang di saluran air (sungai / saluran). Seringkali karena terkendala anggaran untuk membangun jamban sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan menyediakan akses mudah ke layanan dasar sanitasi yang higienis	Jumlah jamban yang terbangun sebagai salah satu sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman	Aspek Teknis dan Perencanaan yang Matang, Manajemen dan Kerja Sama antar instansi, Partisipasi dan Dukungan Masyarakat

Tabel 4.34 Formulir Evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		75	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja		0		
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		87.5	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		0		
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		0		
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		0	0	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.33	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		0	25	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		0		
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0		
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		75	
2		Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin		0		
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	1	0		
			1			
		TOTAL	24			

4.19. Dinas Sosial

Tabel 4.35 Formulir Identifikasi Masalah Dinas Sosial

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Adakah Komitmen Pimpinan	tidak adanya dokumen tentang komitmen pimpinan	segera dibuatkan dokumen Komitmen Pimpinan	tersusunnya dokumen komitmen Pimpinan tentang GERMAS
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	tidak adanya SK Tim Pelaksana Germas	Segera dibuatkan SK Tim Pelaksana	tersusunnya SK TIM Pelaksana GERMAS
3	Adanya Perencanaan terintegrasi	tidak adanya dokumen perencanaan yang spesifik dalam Kegiatan Germas	Tim Pelaksana menyusun perencanaan pelaksanaan Germas	Tim GERMAS menyusun perencanaan kegiatan GERMAS di perkantoran
4	Adanya Monitoring & Evaluasi	tidak adanya kegiatan monitoring dan Evaluasi	Segera dibuatkan jadwal tentang monitoring dan Evaluasi Kegiatan GERMAS	Tim Germas yang sudah dibentuk melakukan monitoring dan evaluasi
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	tidak adanya tempat pengelolaan Sampah dan limbah di lingkungan perkantoran ,	mengusulkan tempat pengelolaan sampah dan limbah perkantoran	adanya tempat pengelolaan sampah dan limbah
6	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala	tidak menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala	Mengusulkan kerjasama dengan Dinas Kesehatan	terlaksananya pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
	(pemeriksaan secara fisik dan mental);			
7	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	tidak adanya skrining kesehatan mental yang dilakukan secara rutin, hanya dilakukan pada waktu awal masuk bekerja	Mengusulkan kegiatan pemeriksaan oleh psikolog	terlaksananya skrining kesehatan mental minimal 1 tahun sekali
8	Adanya pelaporan hasil kegiatan	tidak adanya laporan hasil kegiatan tentang GERMAS	segera dibuatkan laporan kegiatan GERMAS yang dilakukan di lingkungan Kantor	tersedianya laporan kegiatan GERMAS di lingkungan perkantoran

Tabel 4.36 Formulir Evaluasi Dinas Sosial

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			kantor hanya 1 lantai
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		100	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
	4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	1			
	5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	1			
	6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
	7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
	8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
	1	Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
	2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
	3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		33.3	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		83.3	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		
	6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
	1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
	2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
	3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan		0	0	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi		0		
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi		0		
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		0		
		TOTAL	27			

4.20. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 4.37 Formulir Evaluasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		50	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit		0		
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		100	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
	1	Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
	2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
	3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
	4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		33.33333333	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
3		Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		0		
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
1		Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
2		Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
3		Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
4		Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
5		Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
	1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		75	
	2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
	3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0		
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		1		66.66666667	
3	Adanya Perencanaan terintegrasi		1			
4	Adanya Monitoring & Evaluasi		1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		1		66.66666667	
2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		1			
	TOTAL		30			

4.21. Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

Tabel 4.38 Formulir Identifikasi Masalah Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

NO	KEGIATAN GERMAS	DESKRIPSI MASALAH	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	FAKTOR KEBERHASILAN/PEMBELAJARAN
1	2	3	4	5
1	Menyediakan snack buah saat rapat	tidak ada	Menerapkan prinsip GERMAS pada setiap kegiatan perkantoran termasuk pengaturan konsumsi buah sesuai kemampuan anggaran	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan GERMAS khususnya dalam mengalokasikan anggaran snack buah saat rapat
2	Olahraga bersama untuk semua pegawai	tidak ada	kegiatan rutin dilaksanakan hari jum'at, rutin setiap minggu	indikator berhasil dan telah dilakukan secara rutin
3	Melaksanakan skrining kesehatan pegawai	tidak ada	Melaksanakan skrining kesehatan secara rutin dengan bekerja sama dengan Dinas kesehatan dan instansi terkait	Terjalinnya kerja sama dengan fasilitasi layanan kesehatan dalam menyelenggarakan skrining kesehatan
4	Pengelolaan sampah kantor	tidak ada	Penyediaan fasilitas tempat sampah dan kegiatan pembakaran untuk sampah kertas	telah terlaksana di semua unit kerja

Tabel 4.39 Formulir Evaluasi Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		75	
	2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;	1			
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;	0			
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;	0			
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		75	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	0			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			
4		Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
	1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;	1		66.66666667	
	2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);	1			
	3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;	0			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
	1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);	1		100	
	2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;	1			
	3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023	1			
	4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);	1			
	5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		75	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			
3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.		0			
4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).		1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1	Adakah Komitmen Pimpinan		1		75	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		0			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLAUSTER	
3		Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
4		Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1		Adanya kegiatan pemantauan rutin	0			
2		Adanya pelaporan hasil kegiatan	0			
		TOTAL	27			

4.22. Kodim 0819

Tabel 4.40 Formulir Evaluasi Kodim 0819

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					
	1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;	1		62.5	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
2		Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);	1			
3		Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		0		
4		Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		0		
5		Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		0		
6		Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.	1			
7		Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa	1			
8		Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja	1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					
1		Menyediakan snack buah saat rapat;	1		100	
2		Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;	1			
3		Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		1		100	
2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		1			
3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					
1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		66.66666667	
2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);			0		

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
5		Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		0		
6		Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja	1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1		Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).	1		100	
2		Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.	1			
3		Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
4		Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
1		Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK		1			
3	Adanya Perencanaan terintegrasi		1			
4	Adanya Monitoring & Evaluasi		1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
1	Adanya kegiatan pemantauan rutin		1			
2	Adanya pelaporan hasil kegiatan		1			
	TOTAL		30			

4.23. Polres Pasuruan

Tabel 4.41 Formulir Evaluasi Polres Pasuruan

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
I	IMPLEMENTASI GERMAS DI TEMPAT KERJA					
A	Kluster Peningkatan Aktifitas Fisik					
	1	Melakukan gerakan “Ayo Bergerak” atau senam bersama di tempat kerja secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu	1		100	
	2	Menyediakan dan memanfaatkan fasilitas olahraga di tempat kerja	1			
	3	Melaksanakan peregangan setiap jam 10.00 WIB dan jam 14.00 WIB minimal 5 menit	1			
	4	Menganjurkan penggunaan tangga daripada lift/eskalator (untuk tempat kerja yang memiliki lebih dari 1 lantai)	1			
B	Kluster Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menyediakan sarana dan menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di tempat kerja;		1		100	
2	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);		1			
3	Menyediakan ruang laktasi di tempat kerja;		1			
4	Menyediakan sarana dan fasilitas yang ergonomis di tempat kerja;		1			
5	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja;		1			
6	Menyediakan saluran pelaporan terkait kejadian pelecehan dan perundungan di tempat kerja.		1			
7	Menyediakan kotak P3K berisi obat dengan lengkap dan tidak kadaluarsa		1			
8	Instansi sudah mengikutsertakan pekerja dalam jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja		1			
C	Kluster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menyediakan snack buah saat rapat;		1		100	
2	Menyediakan ruang makan atau kantin dengan pangan bergizi, aman, dan seimbang di tempat kerja;		1			
3	Memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pekerja dengan pengukuran IMT		1			
4	Memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang menyusui dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja		1			
D	Kluster Pencegahan dan Deteksi dini Penyakit					
1	Melakukan skrining kebugaran jasmani minimal satu tahun sekali;		1		100	
2	Menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan secara fisik dan mental);		1			
3	Melaksanakan skrining gangguan kesehatan mental;		1			
E	Kluster Peningkatan Kualitas Lingkungan					

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
1	Menerapkan program green office (hemat energi dan air, penghijauan di tempat kerja);		1		100	
2	Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di beberapa titik;		1			
3	Menyediakan akses air minum aman yang memenuhi standar sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023		1			
4	Menyediakan sarana sanitasi aman yang responsif terhadap GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion);		1			
5	Melakukan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkantoran;		1			
6	Menerapkan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat) di tempat kerja		1			
F	Kluster Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :					
1	Sosialisasi dan kampanye kesehatan melalui berbagai media (media massa, media sosial, baliho, dan kegiatan masyarakat).		1		100	
2	Penyuluhan dan edukasi di tempat kerja tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Program Prioritas.		1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
	3	Melakukan orientasi pada pekerja sebagai agen perubahan dalam promosi kesehatan.	1			
	4	Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyebaran pesan kesehatan (video edukatif/webinar/konten kreatif/group WA, dll).	1			
II	PENGELOLAAN PELAKSANAAN GERMAS					
	1	Adakah Komitmen Pimpinan	1		100	
	2	Adanya Koordinator/Tim Pelaksana tertuang dalam bentuk SK	1			
	3	Adanya Perencanaan terintegrasi	1			
	4	Adanya Monitoring & Evaluasi	1			
III	PEMANTAUAN DAN EVALUASI					
	1	Adanya kegiatan pemantauan rutin	1			
	2	Adanya pelaporan hasil kegiatan	1			

NO	INDIKATOR EVALUASI		NILAI		NILAI	KET
	KEGIATAN GERMAS SESUAI KLUSTER		Ada/ya (1)	Tdk ada (0)	PER KLASTER	
		TOTAL	35			

4.24. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Tabel 4.42 Matrik Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
1	Bappelitbangda	Koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1. Surat Edaran untuk pelaksanaan Inpres tentang Germas Hidup Sehat					
			2. Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan Germas Hidup Sehat					
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Germas di Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi Germas di Kab/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Kali Pertemuan	17.280.000	8.640.000	8.640.000
		Melaporkan pelaksanaan Germas Hidup Sehat (Germas) kepada Bappeda Provinsi	Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)					
2	Dinas Kesehatan	a. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimum 5 (lima) kali kampanye Germas	Pengelolaan Promosi Kesehatan	8 Kegiatan	1,589,581,800	0	1,349,629,695
		b. Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	4 kegiatan	175.375.000	625,000	152,795,852

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		c. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	a. Persentase posyandu aktif	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98,40%	126,912,000	0	118,410,010
			b. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	365 Desa	126,912,000	0	118,410,010
		Sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Pengelolaan Promosi Kesehatan	3 Kegiatan	1,589,581,800		1,349,629,695
		Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	a. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)	0	36 orang Konselor Menyusui	0	0	0
			b. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Kegiatan	67,054,000	0	58,291,668
		Deteksi dini penyakit	a. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan detensi dini kanker payudara dan leher rahim perempuan usia 30-50 tahun	Pengelolaan kesehatan Usia Produktif	7251	125,000,000	11,131,800	98,217,118
			b. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta (dan sekolah)	Pengelolaan kesehatan Usia Produktif		2	0	0

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 kegiatan	2,621,636,000	0	19,035,000
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	a. Kampanye gemar olahraga	a. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	2823	5,881,768,500	1,147,471,800	3,940,002,211
		b. Fasilitas penyelenggaraan olahraga masyarakat	b. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	9	3,424,356,300	149,500,000	1,983,354,350
		c. Fasilitas penyediaan sarana olahraga masyarakat	c. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	4	473,815,100		143,158,400
			d. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	1	50,000,000	0	50,000,000
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan	Pembangunan UKS/ Rehab UKS	3 Ruang	264.980.000	-	263.286.108

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		b. Penerapan KTR di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR	Setiap Sekolah Ramah Anak menerapkan KTR sedangkan kita di OPD tidak ada anggaran untuk SRA/KTR	-	-	-	-
		c. Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)	Semua Sekolah di Kab. Pasuruan sudah SRA berdasarkan SK SRA Tahun 2025. akan tetapi kita tidak ada anggaran terkait SRA	-	-	-	-
		d. Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	-	-	-	-	-
		Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	a. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah	Pavingisasi Halaman Sekolah dan Pembangunan/Rehab Aula Terbuka	3 Ruang dan 9 Unit	1.901.360.000	-	1.901.360.000
			b. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah	-	-	-	-	-
		Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	Pembangunan Toilet / Rehab Toilet (Jamban Sehat)	8 Ruang	689.000.000	-	689.000.000
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif					

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		b. Fasilitas pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah					
6	Dinas Perikanan	a. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	a. Meningkatnya konsumsi ikan nasional	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA	62,97 kg/kapita/tahun (Tahun 2024)	314,025,200	201,078,522	105,408,950
			b. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)		3 Desa Lokus Stunting (Desa Keduwung Kec. Puspo, Desa Galih Kec. Pasrepan dan Desa Coban Blimbing Kec. Wonorejo)			
		b. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasilperikanannya dari residu dan bahan berbahaya	PEMBINAAN TERHADAP PENERAPAN PERSYARATAN PERIJINAN BERUSAHA PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN SESUAI SKALA USAHA DAN RISIKO	10 Sampel Dari 4 Kecamatan (Beji, Rejoso Lekok dan Kraton)	112,023,000	24,628,300	86,828,450
7	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	a. Fasilitas penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan					
			Jumlah pemeliharaan drainase lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	1 lokasi	97.028.689,74		96.732.900,00

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
			Jumlah pembangunan jalan lingkungan sebagai sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	4 lokasi	679.431.000,00		676.238.100,00
			Jumlah MCK Komunal yang terbangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	1 lokasi	145,010,400	-	144,060,500
			Jumlah jamban yang terbangun sebagai salah satu sarana aktifitas fisik di kawasan permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	19 lokasi	88,000,000	-	87,435,500
		b. Fasilitas dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi					
		c. Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi					
8	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	a. Fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar dalam fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum					
		Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	a. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8 Dokumen	778,000,000	-	771,058,000

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		(SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	b. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8 Dokumen, 11 Lokasi Pekerjaan	2,979,118,708	7,668,000	2,660,957,499
			c. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Dokumen, 11 Lokasi Pekerjaan	1,954,340,050	103,709,000	1,763,047,600
			d. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2 Dokumen, 3 Lokasi Pekerjaan	531,511,634	8,423,000	511,155,950
		Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota						
			a. Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen, 2 Lokasi Pekerjaan	299,800,000	26,409,000	271,987,300
			b. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4 Dokumen	399,600,000	-	398,585,000
9	Dinas Perhubungan	a. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1475 (Ruas Jalan Pandaan - Bangil, Ruas Jalan Gondang Wetan - Winongan, Ruas Jalan Durensewu - Prigen, dan	35,102,737,950	-	34,370,111,918

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
					22 Kecamatan (Kecuali Tosari dan Nguling)			
			b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 lokasi	50,000,000	-	49,728,000
		b. Konektivitas antar transportasi massal, termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	16 Trayek (37 Armada Berbadan Hukum dan 99 Armada tidak Berbadan hukum)	Rp. 76.213.300	-	Rp. 76.191.650
10	Dinas Lingkungan Hidup	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas					
		b. Penghapusan penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri	-	-	-	-	-
		c. Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	20000 Ton	901,804,745	116,914,700	781,856,270

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		d. Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konversi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3 dokumen	14,082,800	0	13,514,300
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4 dokumen	89,824,900	11,287,500	55,950,181
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 entitas	42,880,400	0	39,664,040
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	a. Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	a. Standarisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		195,000,000	45,550,166	
			b. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium	-				
		b. Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami	-				

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		(pewarna makanan, pengawet) alami						
		c. Penerapan dan pembinaan keamanan pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah kegiatan pembinaan cara produksi pangan yang baik (CPPOB) produk makanan	-				
		d. Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM)	Jumlah Peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PPIMM)	-				
		e. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alokohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	-				
		f. Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	-				
12	Dinas Ketenagakerjaan	a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja					
		b. Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga					

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		c. Fasilitas penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui					
		d. Fasilitas penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yg menerapkan kebijakan KTR di area kerja					
		e. Sosialisasi kepada provinsi dan kab/kota untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desaf.	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa					
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan desiminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat					
		b. Melakukan pengawasan iklan/tayangan yg tidak mendukung Germas	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas					
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan konseling remaja (PIK-R)	a. Presentase Poktan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera	1 kali pertemuan	111,500,000	86,400,000	25,100,000

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
			b. Presentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di Provinsi dan kab/Kota					
			c. Jumlah kelompok PIK-R yang aktif mendapatkan pembinaan	Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera	1 kelompok	111,500,000	86,400,000	25,100,000
		Penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP, MOW)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2 kali momentum	1,716,381,000	345,743,000	1,370,638,000
		Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM					
		Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat	Pelaksanaan KIE di Tingkat Desa	5 kali	1,078,200,000	539,100,000	539,100,000
15	Bupati Pasuruan	Penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman	Jumlah desa di kab/kota yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal					

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		Penerapan kebijakan KTR	Terlaksananya kebijakan KTR di wilayahnya					
		Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah	Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah					
		Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah (termasuk mengacu pada SPM kabupaten/kota yang terkait Germas)	Jumlah kegiatan yang mendukung Germas di wilayahnya					
			Laporan pelaksanaan Germas di wilayahnya					
16	Dinas Pariwisata	Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (lomba dayng perahu naga)	1 kali	300,000,000		294,000,000
		Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitas pengadaan toilet bersih di tempat wisata					
17	Dinas Sosial	a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)					

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
							TH 2025	Semester I Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		b.Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarling) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)					
		Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH	1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Flipchart P2K2	27.000.000		26.100.360
		Sosialisasi Pertemuan dan Edukasi P2K2 oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Pertemuan P2K2 Sebanyak 239 SDM	1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1195 Pertemuan dan Edukasi P2K2 oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	0	0	0
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sosialisasi kepada provinsi dan kab/kota untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa	melaksanakan movev posyandu 6 SPM				
19	Kodim 0819	a. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI secara berkala	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala					
			Donor darah	Pelaksanaan Donor Darah Dalam Rangka HUT TNI Tahun 2025 dan Hari Juang Kartika Tahun 2025	150			

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
		b. Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit menular	Jumlah personel TNI yang mengikuti penyuluhan kesehatan					
		c. Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Pelaksanaan Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara	50			
20	Polres Pasuruan	a. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel POLRI secara berkala	Jumlah personel POLRI yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN TERHADAP ANGGOTA POLRES PASURUAN	0	0	0	0
		b. Penyuluhan kesehatan mengenai Penyakit Tidak Menular	Jumlah personel POLRI yang mengikuti penyuluhan kesehatan	PELAKSANAAN PENYULUHAN KESEHATAN GIGI TERHADAP ANGGOTA POLRES PASURUAN	0	0	0	0
		c. Sosialisasi kesehatan kerja	Jumlah personel POLRI yang mengikuti sosialisasi kesehatan kerja					
21	BNN Kabupaten Pasuruan	Diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat	a. Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba	Rapat Koordinasi Pendidikan Anti Narkoba pada Keluarga	9 Kegiatan	5,440,000	5,440,000	
				Workshop Pendidikan Anti Narkoba pada Keluarga		17,135,000	17,135,000	
				Pelatihan Pendidik Sebaya Anti Narkoba	1 Kegiatan	22,940,000	14,650,000	8,290,000

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
				Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kepada Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan Pendidikan	6 Kegiatan	Swadaya Masyarakat		
				Pembentukan Relawan Anti Narkoba	-	16,220,000	16,220,000	
				Pemasangan Media Edukasi Baliho/Banner	-	16,000,000	16,000,000	
			b. Presentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba	Pemberdayaan melalui Lifeskill dengan Pelatihan Pembuatan Pie Mangga	1 Kegiatan (2 Hari)	45,990,000		45,990,000
				Pembentukan Penggiat P4GN		43,000,000		43,000,000
				Pelaksanaan Tes Urine di Lingkungan Pendidikan	1 Kegiatan	4,550,000		4,550,000
			TOTAL			171,275,000		
22	Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan	a. Bimbingan kesehatan pranikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah	Pemeriksaan Kesehatan Catin di Puskesmas	0 Kegiatan	-		-
				Binwin Pra Nikah	106 angkatan	108,405,000	0	105,739,000

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
					Binwin mandiri sebanyak 10.488 peserta	0	0	0
		b. Penguatan UKS di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik	Bimbingan tentang UKS	0 Kegiatan			
		c. Penerapan KTR di madrasah	Jumlah madrasah yang menerapkan KTR	Penerapan Kawasan Bebas Rokok	0 Kegiatan			
		d. Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)					
		Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	a. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga	11 Madrasah	0 Kegiatan			
			b. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	11 Madrasah	0 Kegiatan			
		a. Fasilitasi rumah ibadah sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat					
		b. Penyediaan sarana sanitasi di madrasah	Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi	11 Madrasah	0 Kegiatan			

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	Semester II	ANGGARAN		
						ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	
						TH 2025	Semester I	Semester II
-1	-2	-3	-4		-8	-9	-10	-11
23	BUMN	a. Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN					
		b. Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN	Jumlah fasilitas penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN					
24	BPJS Kesehatan	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	- Skrining Riwayat Kesehatan - kegiatan Prolanis	- Skrining Riwayat Kesehatan : 219.866 peserta - kegiatan Prolanis : 387 frekuensi kegiatan	Alokasi anggaran untuk kegiatan Prolanis : Rp. 5.005.800.800	Rp. 2.169.874.500	Rp. 2.380.853.500

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.